

**Pendidikan  
Multikulturisme  
Konsep, Tata Kelola, dan Praktik  
Penyelesaian Konflik  
Multikultural**

**Dr. Suharno, M.Si**

**Hak Cipta Buku Kemenkum dan HAM Nomor :  
000285142**



# **Pendidikan Multikulturisme Konsep, Tata Kelola, dan Praktik Penyelesaian Konflik Multikultural**

iv + 129 hlm.; 15,5 x 23 cm

---

**ISBN : 978-623-97994-0-3**

**Penulis** : Suharno

**Editor** : Danang Prasetyo

**Tata Letak** : Fidya Arie Pratama

**Desain Sampul** : Farhan Saefullah

**Cetakan 1** : September 2021

Copyright © 2021 by Penerbit Insania  
All rights reserved

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang No 19 Tahun 2002.

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektris maupun mekanis, termasuk memfotocopy, merekam atau dengan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Penulis dan Penerbit.

## **Isi di luar tanggung jawab percetakan**

Penerbit Insania  
Grup Publikasi Yayasan Insan shodiqin Gunung Jati  
Anggota IKAPI  
Jl. Evakuasi, Gg. Langgar, No. 11, Kalikebat Karyamulya, Kesambi,  
Cirebon Telp. 085724676697  
e-mail: [penerbit.insania@gmail.com](mailto:penerbit.insania@gmail.com)  
Web : <http://insaniapublishing.com>

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur penulis sampaikan kepada Allah Azza Wa Jalla, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat merampungkan penyusunan buku ini. Tema yang di angkat pada buku ini, mengenai Pendidikan Multikulturisme Konsep, Tata Kelola, dan Praktik Penyelesaian Konflik Multikultural.

Masyarakat multikultural mengandung potensi konflik. Konflik adalah situasi dan kondisi dalam kehidupan masyarakat yang kacau atau tidak adanya ketertiban, saling klaim antar pihak, berselisih, bersengketa, bermusuhan dari yang sifatnya ancaman kekerasan sampai kepada kekerasan fisik. Konflik terjadi karena masyarakat tersebut mengandung berbagai kepentingan, lembaga, organisasi, dan kelas sosial yang tidak selalu memiliki kepentingan yang sama dan serasi. Konflik bisa disebabkan oleh banyak hal. Konflik dapat disebabkan oleh polarisasi sosial yang memisahkan masyarakat berdasarkan penggolongan-penggolongan tertentu dapat menyebabkan timbulnya ketidakpercayaan dan permusuhan antar kelompok yang berbeda dalam masyarakat yang dapat berujung pada munculnya kekerasan yang terbuka. Konflik tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial. Terjadinya konflik juga tidak terelakkan dalam masyarakat. Masyarakat dipandang sebagai struktur sosial yang mencakup proses-proses asosiatif dan disosiatif yang hanya dapat dibedakan secara analisis. Lebih lanjut dia mengatakan bahwa konflik

merupakan pencerminan pertentangan kepentingan dan naluri untuk bermusuhan

Penulis berharap bagi para pembaca buku ini untuk dapat lebih kritis dalam memahami sebuah sudut pandang penulis yang tertera di dalam buku ini. Penulis menyarankan kepada para pembaca buku ini untuk dapat menggali informasi pembandingan eksternal dari teori-teori yang tersusun di dalam buku ini untuk menyikapi nilai kemaslahatannya.

Akhir kata, penulis menginginkan agar para pembaca bisa memilah dan memilih baik dan buruknya dari isi buku ini dengan pikiran terbuka.

Yogyakarta, September 2021

Penulis

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
BAB I Pendahuluan	01
A. Mengapa Multikulturalisme	01
B. Multikulturalisme sebagai Objek Studi Ilmiah	07
C. Urgensi Pendidikan Multikultural di Pendidikan Tinggi	16
BAB II Epistemologi Multikulturalisme	22
A. Konsep Multikulturalisme	22
B. Multikulturalisme dan Konflik	24
C. Multikulturalisme sebagai Isu Kebijakan	33
BAB III Tata Kelola Multikulturalisme	49
A. Multikulturalisme sebagai Keniscayaan	49
B. Tantangan Kebinekaan Indonesia	52
C. Tata Kelola Multikulturalisme Indonesia	53
BAB IV Pendidikan Multikulturalisme dan Tantangannya	59
A. Dinamika Pendidikan Multikulturalisme	59
B. Pendidikan Multikulturalisme di Tingkat Dasar dan Menengah	65
BAB V Praktik Penyelesaian Konflik Multikultural	71
A. Kearifan Lokal di Indonesia	71
B. Kearifan Lokal sebagai Basis Resolusi Konflik	74
C. Beberapa Contoh Penyelesaian Konflik Multikultural	79
BAB VI Penutup	116

A. Penutup	116
B. Prakarsa Pendidikan Multikultural	118
Daftar Pustaka	121

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Mengapa Multikulturalisme

Indonesia, sebagai negara multikultural, menghadapi potensi konflik yang tinggi antar elemen pembentuk multikulturalismenya. Anasir konflik dapat bermula dari persoalan perbedaan identitas hingga perjuangan pemenuhan kepentingan dan kebutuhan masing-masing. Elemen identitas yang berbeda berupa etnis, agama, adat istiadat, bahasa dan lain-lainnya secara alamiah merupakan penanda keberagaman yang secara sosial dapat memunculkan friksi atau gesekan. Agar minimalisasi potensi konflik dimungkinkan diperlukan ruang koeksistensi (*space of co-existence*) bagi sebagian besar identitas. Negara, sebagai institusi yang mengikat, memaksa, dan mencakup semua (*all-encompassing, all-embracing*), seharusnya mampu menghadirkan kebijakan yang memberikan ruang itu. Intervensi kebijakan dapat diambil dalam tiga ranah: preventif, kuratif, dan preservatif.

Persoalannya dalam banyak kebijakan negara menonjol politik monokultural, bahkan sejak sebelum Indonesia menjadi. Pendekatan monokultural diambil untuk semata-mata stabilitas dan integrasi sosial. Pemerintah Hindia-Belanda menyederhanakan pluralitas kompleks masyarakat dengan cara pandang para elite priyayi dari sejumlah kerajaan dan kesultanan di Nusantara yang telah ter-Eropakan di lembaga pendidikan kolonial. Sebagai keturunan priyayi dari kerajaan-kerajaan pan-Nusantara, mereka

(merasa) memiliki legitimasi budaya untuk kemudian menyatukan pluralitas geografis, historis, etnis, dan bahasa yang beragam lewat status dan peran mereka di sebuah negara yang baru lahir itu. Melalui mereka pula segenap manusia yang berbeda-beda (merasa) terpenuhi subyektivitasnya lewat lembaga kekuasaan yang baru tersebut. Kondisi ini mirip gagasan Ernest Renan bahwa bangsa merupakan sebuah identitas superior yang mengendap dari kesamaan nasib dan cita-cita sekelompok orang, beserta visi masa depan yang didirikannya bersama.

Politik monokulturalisme juga dilakukan Pemerintah Orde Baru. Politik monokulturalisme telah menghancurkan *local cultural geniuses* seperti tradisi "*pela gandong*" di Ambon, nagari di Sumatera Barat dan lain-lain, diantaranya melalui Undang-Undang No. 5 tahun 1974 tentang Pemerintahan di Daerah yang menyeragamkan struktur desa di seluruh Indonesia seperti struktur desa di Jawa. Padahal, struktur desa yang dimiliki beberapa masyarakat tertentu seperti sistem pemerintahan nagari di Sumatera Barat, pemerintahan marga di Sumatera Selatan, pemerintahan Saniri di Maluku, tidak hanya mengandung sistem pelayanan administrasi namun juga pelayanan adat, dan bahkan memiliki mekanisme resolusi jika terjadi konflik. Saniri, misalnya, selain berperan sebagai pemerintahan, juga berperan dalam menjaga kelestarian alam sekaligus mencegah eksploitasi alam oleh suatu pihak yang dapat merugikan pihak lain yang dapat menimbulkan konflik. Dalam sistem pemerintahan Saniri terdapat lembaga Sasi. Sasi laut, misalnya, melarang seluruh aktivitas masyarakat yang terkait dengan pemanfaatan atau pengambilan faedah tertentu dari suatu wilayah laut sampai ketika Saniri dibuka dan laut dinikmati bersama-sama oleh seluruh masyarakat.



Dalam konflik Ambon, Saniri sebagai bagian dari resolusi berhasil mencegah kehancuran lebih luas masyarakat di wilayah Pulau Seram.

Kebijakan politik monokulturalisme mempersempit ruang koeksistensi antar berbagai elemen multikultural. Dengan demikian, kebijakan tersebut menambah potensi alamiah konflik dengan bobot politis, apalagi kebijakan monokultural tersebut diinstrumentasi dengan sentralisme, dan bahkan otoritarianisme. Dari sisi kebijakan, perpaduan antara kebijakan monokultural dan kegagalan otoritarianisme negara mengawal kebijakan tersebut merupakan salah satu faktor penting yang memicu, memendam energi, atau membiarkan berlarut-larut berbagai konflik antar identitas kultural atau konflik multikultural atau multietnik.

Berbagai konflik etnik yang terjadi menggambarkan fenomena tersebut dalam kurun yang lama. Stabilitas dan integrasi sosial yang diimajinasikan tidak terwujud, sebaliknya berbagai konflik terjadi, baik laten maupun manifes. Antara 1952 hingga 2000, misalnya, konflik di Kalimantan Barat antar berbagai etnis paling tidak telah terjadi 12 kali. Konflik-konflik tersebut antara lain: pertikaian antara Etnis Madura dan Etnis Dayak di tahun 1952, peristiwa pengusiran orang-orang yang berlatarbelakang Etnis Cina oleh orang Dayak di tahun 1967, peristiwa kerusuhan antara Etnis Madura dengan Etnis Dayak tahun 1979 yang terjadi di Kalimantan, peristiwa pertikaian antara Etnis Madura dan Etnis Dayak yang terjadi di tahun 1983, peristiwa kerusuhan Etnis Dayak dengan Etnis Madura yang terjadi di Sanggau Ledo di tahun 1997, konflik antara Etnis Madura dengan Etnis Dayak yang terjadi di Kalimantan pada tahun 1998, konflik antara etnis Melayu dengan Etnis

Madura yang terjadi di Sambas, dan kerusuhan etnis Melayu Pontianak dengan Etnis Madura yang terjadi pada tanggal 25 Oktober 2000.

Konflik antar etnik sebagaimana terjadi di Sampit dan Sambas membutuhkan penanganan komprehensif sebab bisa menjalar ke daerah lain. Peristiwa konflik multikultur yang terjadi di Sampit ditengarai juga tidak lepas dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di Sambas.

Konflik yang destruktif mengganggu proses integrasi bangsa. Untuk itu, diperlukan upaya penyelesaian konflik antar etnis secara lebih permanen, bukan penyelesaian-penyelesaian yang "hanya sering lebih bernuansa politis" sehingga justru masih sering menyisakan masalah-masalah yang dapat berkembang menjadi bibit konflik baru.

Pada pendekatan kebijakan yang digunakan Pemerintah Daerah Provinsi untuk menangani Konflik Sampit, misalnya, Pemerintah Daerah Provinsi sempat mengeluarkan peraturan yang isinya mengatur tentang larangan bagi Etnis Madura untuk masuk wilayah Kalbar maupun Kalteng. Namun Perda tersebut tidak bertahan lama dan mengalami revisi ketika Etnis Madura yang datang ke Kalteng menunjukkan sikap-sikap asimilasi yang signifikan. Pada akhirnya, Pemprov Kalteng menerbitkan Perda No. 9 Tahun 2003 tertanggal 6 November 2004 tentang Penanganan Penduduk Dampak Konflik Etnik. Terbitnya Perda diikuti dengan lahirnya Perda Kabupaten Kotim yaitu Perda No. 5 tahun 2004 tertanggal 8 Juli 2004 tentang Penanganan Penduduk Dampak Konflik Etnik. Kurang lebih setahun sebelumnya atau tepatnya 26 Juli 2003, Pemda Kabupaten Kapuas telah terlebih dulu menerbitkan Perda, yang isinya kurang lebih sama, tentang Penyelenggaraan Pengembalian Pengungsi Dampak Konflik Etnik.

Kasus yang terjadi di Kalteng ini menarik untuk dikaji lebih mendalam khususnya mengenai peranan politik, khususnya politik pengakuan (politik rekognisi), dalam mengembalikan harmoni sosial, serta pengaruh politik pengakuan tersebut dapat mengeliminasi dan meminimalisasi potensi konflik yang dapat terulang jika keberagaman tidak dikelola secara cerdas dan bijaksana. Konflik multietnis di Kalteng memang tidak repetitif seperti konflik di Kalbar, namun tingkat kengerian dan kekejaman konflik diakui oleh banyak kalangan sebagai konflik terkejut. Selain itu, respons Pemprov Kalteng, Pemkab Kotim dan Pemkab Kapuas dengan menerbitkan Perda penanganan konflik merupakan upaya yang layak diapresiasi dan dikaji.

Pentingnya penekanan prinsip-prinsip politik rekognisi dalam penyelesaian secara permanen konflik multietnik ini karena keunikan dari sifat konflik yang tajam dan bervariasi antara pihak-pihak, sehingga sulit diselesaikan dengan cara-cara sederhana, seragam, dan menegasikan perbedaan para pihak tanpa keterlibatan mereka. Politik rekognisi menekankan adanya itikad baik dari pihak yang dominan untuk memberi pengakuan kepada pihak-pihak yang secara hak dan kedudukan dicap sebagai minoritas atau *disadvantaged groups*. Dengan adanya pengakuan ini, hak dan kedudukan kelompok minoritas diakui dan dapat diangkat sehingga setara dengan kelompok dominan atau hanya sampai batas-batas tertentu yang diberikan pengakuan.

Hal tersebut sangat berbeda dengan penyelesaian konflik antar etnis yang selama ini sering dilaksanakan dalam bentuk keputusan politik melalui DPRD berupa Perda yang sering menegasikan keterlibatan pihak-pihak yang berkonflik dalam upaya penyelesaian konflik. Perda-Perda

sebelumnya misalnya memuat larangan warga etnis tertentu untuk masuk ke wilayah Kalimantan Barat dan Tengah, yang berarti tidak mengakui keberadaan suatu etnis di wilayah tersebut. Penyusunan Perda yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dengan memperhatikan pertimbangan tokoh-tokoh adat, agama dan sosial di daerah tersebut juga akan menyajikan suasana berbeda dengan Keppres yang mengatur status darurat sipil atau darurat militer sebagaimana yang terjadi di Ambon atau Aceh. Perdamaian dan ketenteraman di dua daerah tersebut tercapai setelah pihak yang terlibat saling mengakui posisi masing masing melalui perundingan yang adil dalam kesepakatan atau piagam tertulis yang ditegakkan bersama.

Sekalipun Perda Nomor 5 Tahun 2004 ini memuat judul Peraturan Daerah tentang Penanganan Penduduk Dampak Konflik, namun dalam perspektif lebih luas, inilah salah satu bentuk kebijakan publik yang dituangkan dalam peraturan perundangan yang secara khusus menampung dan mengakui adanya keragaman sekaligus mengandung niat dari pihak-pihak yang mayoritas untuk mengakui (merekognisi) pihak-pihak pendatang yang minoritas. Hal ini antara lain tercermin dalam Pasal 2 yang menyatakan “Pengembalian penduduk berdasarkan kesetaraan sebagai anak bangsa, untuk hidup berdampingan secara damai di Kalimantan Tengah”. Pada titik ini, masyarakat yang berorak multikultur dikelola dengan memberikan pengakuan (rekognisi) atas eksistensi komponen kemajemukan tersebut. Pengakuan tersebut dalam fenomena kontemporer merupakan tuntutan (*demand*). Oleh karenanya ketiadaan pengakuan, yang berarti nihilnya pemenuhan tuntutan, sangat potensial terhadap munculnya berbagai konflik.

## B. Multikulturalisme sebagai Objek Studi Ilmiah

Multikulturalisme, dengan keragaman dan kecenderungan perkembangan konsep dan praktek, oleh Parekh dibedakan menjadi lima macam. *Pertama*, isolasionis, yang mengacu kepada masyarakat yang memiliki berbagai kelompok kultural yang ada di dalamnya menjalankan hidup secara otonom dan terlibat dalam interaksi yang hanya minimal antara yang satu dengan yang lainnya.

*Kedua*, akomodatif, yakni masyarakat plural yang memiliki kultur dominan, yang membuat penyesuaian dan akomodasi-akomodasi tertentu bagi kebutuhan kultural kaum minoritas. *Ketiga*, otonomis, yaitu masyarakat plural dimana kelompok-kelompok kultural utama berusaha mewujudkan kesetaraan (*equality*) dengan budaya dominan dan menginginkan kehidupan otonom dalam kerangka politik yang secara kolektif dapat diterima.

*Keempat*, kritis atau interaktif yakni masyarakat plural dimana kelompok-kelompok kultural tidak terlalu concern dengan kehidupan kultural otonom, tetapi lebih menuntut penciptaan kultur kolektif yang mencerminkan dan menegaskan perspektif-perspektif distingtif mereka. *Kelima*, kosmopolitan, masyarakat ini berusaha menghapuskan batas-batas kultural sama sekali untuk menciptakan sebuah masyarakat dimana setiap individu tidak lagi terikat dan *committed* kepada budaya tertentu, sebaliknya secara bebas terlibat dalam eksperimen interkultural dan sekaligus mengembangkan kehidupan kultural masing-masing.

Untuk mengkaji multikulturalisme secara lebih jernih, perlu dicermati pemetaan yang dikemukakan oleh Bhikku Parekh atas masyarakat multikultural. *Pertama*, adalah kelompok masyarakat yang memiliki budaya sebagaimana umumnya masyarakat, namun dalam beberapa hal mereka

memiliki keyakinan dan praktek keyakinan yang berbeda sesuai dengan wilayah kehidupan dan cara hidup yang berlainan. Mereka tidak berkeinginan untuk melahirkan budaya alternatif, akan tetapi menganekaragamkannya dengan kehadiran mereka yang berbeda tersebut. Parekh menyebut kelompok ini sebagai keberagaman subkultur (*subculture diversity*).

*Kedua*, kelompok masyarakat yang di dalamnya ada kalangan yang kritis terhadap berbagai nilai dan prinsip utama yang ada dalam budaya dominan masyarakat tersebut, untuk kemudian berupaya mengkonstruksinya kembali. Parekh menyebut fenomena ini sebagai keanekaragaman pandangan (*perspectival diversity*).

*Ketiga*, kelompok masyarakat yang memiliki kesadaran diri yang berbeda, terorganisir dengan baik, dan mereka memiliki hidup dengan sistem keyakinan dan praktek keyakinan yang berlainan. Gejala ini disebut keanekaragaman komunal (*communal diversity*).

Masyarakat multikultural merupakan masyarakat yang komponennya menggambarkan lebih dari satu unsur, kultur-sub kultur, budaya, keyakinan, sistem keyakinan, agama, suku bangsa dan lain-lain. Jadi, masyarakat multikultural merupakan masyarakat yang komponennya menggambarkan salah satu, dua, atau ketiga klasifikasi tersebut. Benang merah dari paparan tersebut, multikulturalisme merupakan konsep pengelolaan masyarakat yang secara kultural majemuk, sekecil apapun tingkat dan lingkup kemajemukan budaya tersebut, dengan memberikan pengakuan (rekognisi) atas eksistensi komponen kemajemukan tersebut. Pengakuan tersebut dalam fenomena kontemporer merupakan tuntutan (*demand*). Oleh karenanya ketiadaan pengakuan, yang berarti

nihilnya pemenuhan tuntutan, sangat potensial terhadap munculnya berbagai konflik.

Masyarakat multikultural mengandung potensi konflik. Konflik adalah situasi dan kondisi dalam kehidupan masyarakat yang kacau atau tidak adanya ketertiban, saling klaim antar pihak, berselisih, bersengketa, bermusuhan dari yang sifatnya ancaman kekerasan sampai kepada kekerasan fisik. Konflik terjadi karena masyarakat tersebut mengandung berbagai kepentingan, lembaga, organisasi, dan kelas sosial yang tidak selalu memiliki kepentingan yang sama dan serasi. Konflik bisa disebabkan oleh banyak hal. Konflik dapat disebabkan oleh polarisasi sosial yang memisahkan masyarakat berdasarkan penggolongan-penggolongan tertentu dapat menyebabkan timbulnya ketidakpercayaan dan permusuhan antar kelompok yang berbeda dalam masyarakat yang dapat berujung pada munculnya kekerasan yang terbuka.

Konflik tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial. Terjadinya konflik juga tidak terelakkan dalam masyarakat. Masyarakat dipandang sebagai struktur sosial yang mencakup proses-proses asosiatif dan disosiatif yang hanya dapat dibedakan secara analisis. Lebih lanjut dia mengatakan bahwa konflik merupakan pencerminan pertentangan kepentingan dan naluri untuk bermusuhan.

Menurut Galtung, terdapat 3 (tiga) unsur utama konflik:

- a) Ketidaksesuaian diantara kepentingan dan kontradiksi di antara kepentingan, atau secara akademis sering disebut "ketidaksesuaian antara nilai-nilai sosial dan struktur sosial."
- b) Perilaku negatif dalam bentuk persepsi atau stereotip yang berkembang diantara pihak-pihak yang berkonflik.
- 3) Perilaku kekerasan dan ancaman yang diperlihatkan.

Konflik berlangsung melalui beberapa fase. 1) Fase sengketa, merupakan permulaan sebuah konflik. Ini ditandai dengan klaim yang saling berlawanan melalui proses-proses institusional, tanpa penggunaan kekerasan dan ancaman. 2) Fase krisis, posisi berlawanan yang terdapat dalam proses institusional menggunakan ancaman kekerasan dalam memperjuangkan klaimnya. 3) Fase kekerasan terbatas, dimana masing-masing klaim mulai diekspresikan dengan penggunaan kekerasan reguler dan sistematis, namun belum menggunakan kekuatan yang tidak terkendali. 4) Fase kekerasan massif, ditandai dengan penggunaan kekerasan secara reguler dan sistematis, dengan kekuatan yang tidak bisa dikendalikan. Ekspektasi para pihak di level ini adalah destruksi atau penghilangan pihak lawan. 5) Fase penurunan/peredaan, ini ditandai dengan karakter dimana setiap pihak yang sebelumnya melakukan perlawanan, menggunakan kekerasan, dan bermaksud menghilangkan pihak lawan mulai melakukan tindakan tertentu untuk menahan. 6) Fase penyelesaian, ditandai dengan resolusi atas pertentangan yang menyebabkan konflik dimana pengakuan (rekognisi) proses institutional mengakomodasi secara damai tuntutan-tuntutan yang berlawanan.

Konflik bisa ditinjau dari aspek sosial dan politik. Konflik sosial bisa diartikan sebagai perjuangan untuk mendapatkan nilai-nilai atau pengakuan status, kekuasaan dan sumber daya langka. Tujuan kelompok-kelompok yang berkonflik tidak hanya mendapatkan nilai-nilai yang diinginkan tetapi juga menetralkan, melukai atau mengurangi saingan-saingan mereka. Konflik bisa terjadi di antara individu dan individu, antara individu dan organisasi atau kelompok, antara organisasi yang satu dengan



organisasi yang lain, dan dalam komponen sebuah organisasi atau kelompok.

Konflik adalah unsur penting bagi integrasi sosial. Selama ini konflik selalu dipandang sebagai faktor negatif yang memecah belah. Konflik sosial dalam beberapa cara memberikan sumbangan pada keutamaan kelompok serta mempererat hubungan interpersonal.

Setiap fenomena politik memiliki aspek konflik dan integrasi. Kekuasaan merupakan salah satu fenomena politik yang penting. Kekuasaan merupakan sumber daya langka yang menjadi penyebab konflik. Orang yang mempunyai kekuasaan cenderung untuk mempertahankan kekuasaan. Di samping itu, ada pihak lain yang menentang kekuasaan dan ingin merebut kekuasaan itu untuk tujuan yang sama. Kekuasaan mempunyai aspek integrasi dalam arti bahwa kekuasaan dipergunakan untuk menegakkan ketertiban dan keadilan; sebagai pelindung kepentingan dan kesejahteraan umum melawan tindakan berbagai kelompok kepentingan.

Konflik yang terjadi mutlak harus diselesaikan agar tidak merugikan dan melahirkan perpecahan (disintegrasi) dalam masyarakat bahkan potensi konflik yang ada harus dikelola sehingga tidak menjadi konflik yang terbuka. Untuk bisa memberikan sebuah penyelesaian (solusi) dari suatu konflik, maka perlu diketahui lebih dahulu apa yang menjadi penyebabnya. Penyebab-penyebab konflik sebagaimana dikemukakan di atas adalah penyebab konflik secara umum.

Schmeidl dan Jenkins mengkategorikan konflik etnik sebagai konflik dengan karakter tertentu. Konflik etnik pada umumnya merupakan perjuangan terhadap sumber daya yang langka yang tidak didistribusikan secara merata bagi kelompok-kelompok etnik. Konflik etnik ini sangat sulit untuk dilepaskan secara tersendiri dari perang sipil.

Beberapa perang sipil bermula dari sengketa kekuasaan dan sumber daya ekonomi namun kemudian melebar kepada tuntutan-tuntutan (etnik atau etnonasionalis).

Konflik etnik/ konflik multikultural sebagai konflik dengan karakter tertentu memiliki penyebab yang kompleks. Penyebab tersebut dapat dikemukakan berbagai faktor sebagai berikut: *Pertama*, faktor sosial ekonomi (akses terhadap sumber daya ekonomi) yang dicerminkan dengan kondisi: a) saling mengklaim dalam menguasai sumber daya yang terbatas akibat tekanan penduduk dan kerusakan lingkungan atau ada eksploitasi sumber daya oleh sekelompok masyarakat tanpa mengindahkan norma-norma masyarakat disekitarnya, b) kecemburuan sosial yang bersumber dari ketimpangan ekonomi antara kaum migran (pendatang) dengan penduduk asli (lokal).

*Kedua* adalah faktor sosial budaya yang dicerminkan oleh: a) dorongan emosional kesukuan yang karena ikatan-ikatan norma tradisional melahirkan sebuah kefanatikan, b) sentimen antar pemeluk agama yang terjadi karena kurangnya pengetahuan dalam memahami suatu ajaran agama.

*Ketiga* adalah faktor sosial politik yang dicerminkan dengan: a) distribusi kekuasaan yang tidak merata. Ini berarti bahwa konflik sosial pasti akan muncul karena secara rasional tidaklah mungkin dilakukan distribusi kekuasaan secara merata kepada seluruh anggota masyarakat sehingga konflik akhirnya merupakan suatu keniscayaan dalam masyarakat, b) tidak tunduknya individu atau kelompok sebagai pihak yang dikuasai terhadap sanksi yang diberikan oleh pihak yang sedang berada dalam posisi menguasai, c) ketegangan antara kelompok yang sedang berkuasa dengan kelompok yang dikuasai di mana kelompok yang berkuasa

ingin mempertahankan *set of properties* yang melekat pada kekuasaannya sementara yang dikuasai selalu terobsesi untuk mewujudkan perubahan yang dianggapnya merupakan satu-satunya jalan untuk menggapai perbaikan posisi dirinya.

Bilamana ini terjadi, maka pihak yang berkonflik berada pada sebuah zona tawar-menawar yang distributif. Dalam hal ini suatu aturan berusaha untuk membagi sumber daya sehingga terjadi situasi kalah-menang. Proses tawar-menawar distributif difokuskan pada upaya memaksa salah satu pihak yang berkonflik untuk menyetujui atau menerima titik sasaran spesifik pihak lain atau sedekat mungkin dengan titik sasaran itu. Artinya, salah satu pihak dipaksa untuk menjauhi titik sasarannya dan mendekati titik sasaran pihak lain.

Ini merupakan suatu bukti bahwa prinsip *politics of recognition* tidak bisa diterapkan bila penyelesaian suatu konflik dilakukan melalui proses tawar-menawar secara distributif. Prinsip *politics of recognition* bisa berjalan manakala regulasi yang digunakan untuk mengatasi konflik menerapkan proses tawar-menawar yang integratif. Proses ini mengandaikan adanya satu atau lebih cara penyelesaian yang dapat menghasilkan situasi menang-menang. Namun demikian hal ini membutuhkan beberapa persyaratan, antara lain: 1) Pihak-pihak yang berkonflik terbuka terhadap informasi dan jujur mengenai kepentingannya. 2) Pihak-pihak yang berkonflik punya kepekaan terhadap kebutuhan pihak lain. 3) Kemampuan untuk saling mempercayai dan kesediaan untuk memelihara keluwesan.

Dalam studi konflik, dikenal beberapa konsep dasar yang mengkerangkai bagaimana respon atas konflik atau potensi konflik, antara lain: manajemen konflik, transformasi

konflik, dan resolusi konflik. Transformasi konflik merupakan konsep yang menekankan pada proses penumpulan dan penghalusan konflik pada level dimana para pihak yang berkonflik dapat hidup bersama dan masing-masing dapat mengendalikan diri mereka, melalui saling empati kepada pihak lain, diperlukan kreativitas untuk mencari hal baru, dan dengan cara berperilaku, berbicara, dan—bahkan lebih jauh lagi—berpikir tanpa kekerasan. Dalam kerangka tersebut dituntut prinsip "cintailah musuhmu", atau—dalam level yang sangat awal—prinsip "kurangi kebencian pada musuhmu" sudah cukup membantu mengatasi persoalan. Tujuan utama transformasi konflik adalah restorasi ketertiban, harmoni, dan hubungan dalam komunitas.

Sedangkan konsep resolusi konflik merupakan konsep yang lebih luas dan umum. Konsep ini merefleksikan bahwa konflik harus diatasi, mulai dari konflik intrapersonal, interpersonal, intragrup, intergrup, intranational, hingga international. Resolusi konflik meniscayakan pengetahuan akan akar masalah, kesadaran akan masalah dan potensi penyelesaiannya, hingga ketrampilan (*skills*) untuk mengatasi masalah. Tujuan akhir dari resolusi konflik adalah perdamaian—antara perorangan, kelompok, atau bahkan bangsa yang terlibat.

Dalam kontinum kajian konflik dan perdamaian, terdapat dua konsep yang menunjukkan kedekatan dan kejauhan intervensi serta tujuan resolusi yang ingin dicapai. Untuk pendekatan-pendekatan keamanan dan intervensi jangka pendek dikenal konsep *peacekeeping*. Sementara pendekatan-pendekatan perubahan kelembagaan dan prevensi dalam jarak yang lebih panjang disebut *peacebuilding*. *Peacekeeping* merupakan upaya untuk membuat

keamanan melalui kontrol berupa pengawasan (*surveillance*), pembatasan, pengendalian, dan sanksi atas setiap tindakan kekerasan dan konfrontasional. Konsep ini dengan demikian lalu dikaitkan dengan upaya penciptaan "perdamaian negatif", yang bukan berarti perdamaian dalam konotasi yang buruk, akan tetapi lebih ditekankan pada terwujudnya syarat minimum perdamaian, berupa tidak adanya kekerasan dan kekejaman fisik. Sedangkan *peacebuilding* merupakan upaya untuk meredakan friksi antar kelompok dan masalah-masalah struktural dan kesenjangan melalui pendidikan, penyelesaian masalah, reorganisasi pola interaksi, dan aktivitas-aktivitas komunitas lainnya. Pendekatan ini dimaksudkan untuk membangun ulang ikatan sosial dan mengubah ekspektasi masyarakat yang satu dengan yang lain dari kekerasan menuju hubungan yang damai.

Sedangkan manajemen konflik merupakan konsep yang lebih spesifik dan prosedural dalam merespon suatu konflik. Manajemen konflik memiliki tiga dimensi: 1) sekumpulan prosedur informal-formal, otonom-interventionis, untuk menghadapi dan mengatasi konflik, 2) Pemahaman dan keterampilan untuk mengenali dan memahami konflik, sehingga dapat membayangkan dan mengkomunikasikan alternatif resolusi, 3) Konteks hubungan individual dan komunitas dimana konflik muncul, dirasakan dan dipahami oleh masyarakat sebagai masalah, berkembang dan meluas (eskalasi), lalu berkurang dan menurun (de-eskalasi).

Penting untuk dicatat bahwa konflik yang terjadi di Sampit antara Etnis Dayak dengan Etnis Madura adalah konflik dalam masyarakat, maka untuk mencapai keberhasilan perdamaian secara substantif membutuhkan penyelesaian konflik yang benar-benar tuntas di level

masyarakat dan sesuai dengan nalar penyelesaian konflik bagi masyarakat, bukan penyelesaian konflik pada level pemerintah yang sifatnya *top down*. Oleh karena itu penyelesaian konflik yang baik dapat dicapai kalau konsensus telah selesai di level masyarakat dan kemudian dilegalformalkan dalam sebuah kebijakan publik sehingga konsensus atas perdamaian antar pihak yang berkonflik tersebut memiliki kekuatan memaksa dan mengikat bagi masing-masing pihak untuk melaksanakannya.

Dalam buku ini—sebagai studi kebijakan, sesuai dengan *background* keilmuan penulis—penggunaan konsep penyelesaian konflik digunakan untuk menjembatani konsep teoretik dalam studi konflik dengan istilah legal dalam kebijakan publik, yang seringkali bersifat lebih teknikal, seperti penanganan. Secara substantif konsep penyelesaian konflik dalam penelitian ini berdekatan dengan konsep resolusi konflik dalam studi konflik.

### **C. Urgensi Pendidikan Multikultural di Pendidikan Tinggi**

Kerukunan di tengah keanekaragaman budaya merupakan aset dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Dalam perjalanan sejarah bangsa, Pancasila telah teruji sebagai alternatif yang paling tepat untuk mempersatukan masyarakat Indonesia yang sangat majemuk di bawah suatu tatanan yang inklusif dan demokratis. Sayangnya wacana mengenai Pancasila seolah lenyap seiring dengan berlangsungnya reformasi. Berbagai kendala sering kita hadapi dalam menciptakan kerukunan (toleransi) umat beragama. Dari berbagai pihak telah sepakat untuk mencapai tujuan kerukunan beragama di Indonesia

seperti masyarakat dari berbagai golongan, pemerintah, dan organisasi agama yang banyak berperan aktif dalam masyarakat.

Indonesia sebagaimana dikuatkan oleh para ahli yang memiliki perhatian besar terhadap pendidikan multietnik, justru menjadikan multikulturalisme sebagai common platform dalam mendesain pembelajaran yang berbasis Bhinneka Tunggal Ika, bahkannilai-nilai tersebut diupayakan melalui mata pelajaran kewarganegaraan dan didukung pula oleh pendidikan agama.

Indonesia adalah salah satu negara multikultural terbesar di dunia. Terlihat dari keadaan sosio-kultural yang begitu beragam, populasi penduduk yang besar dan memiliki 300 suku bangsa. Selain itu mereka juga menganut agama dan kepercayaan yang berbeda mulai dari Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Budha, Konghucu serta berbagai macam aliran kepercayaan. Keragaman tersebut disadari atau tidak dapat menimbulkan berbagai persoalan yang sekarang dihadapi bangsa ini. Korupsi, kolusi, nepotisme, perseteruan politik, kemiskinan, kekerasan, separatisme, perusakan lingkungan dan hilangnya rasa kemanusiaan untuk menghormati hak orang lain adalah bentuk nyata dari multikulturalisme itu.

Menurut Sasanto Wibisono, problematika penyimpangan perilaku yang mengesampingkan nilai-nilai moral dan etika seperti korupsi, kolusi, nepotisme, pemerasan, tindak kekerasan, malpraktek dan perusakan lingkungan adalah disebabkan oleh akulturasi dan urbanisasi. Kondisi perekonomian dan politik yang tidak sehat bisa memperparah keadaan ini. Untuk merubah keadaan ini harus dilakukan melalui dunia pendidikan dengan cara memperbaiki sumber pembelajarannya. Sekolah

dapat merubah perilaku peserta didik secara bertahap dengan menerapkan materi pembelajaran untuk meningkatkan kualitas normatif perilaku seperti aspek moralitas, disiplin, kepedulian humanistik, kejujuran etika dan lain-lain.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka pendidikan multikultural menawarkan alternatif melalui penerapan dan konsep pendidikan yang berbasis pada pemanfaatan keragaman yang ada di masyarakat seperti keragaman etnis, budaya, bahasa, agama, status sosial, gender, kemampuan, umur dan ras. Dan yang terpenting, strategi pendidikan ini tidak hanya bertujuan agar siswa mudah memahami pelajaran yang dipelajari, akan tetapi untuk meningkatkan kesadaran mereka agar selalu berperilaku humanis, pluralis dan demokratis. Hal terpenting dalam pendidikan multikultural ini adalah seorang guru tidak hanya di tuntut menguasai dan mampu secara profesional mengajar mata pelajaran yang diajarkannya. Lebih dari itu seorang pendidik juga harus mampu menanamkan nilai-nilai inti dari pendidikan multikultural seperti demokrasi, humanisme dan pluralisme.

Kerukunan bangsa kita belakangan ini menjadi terancam dan keutuhan bangsa pun terkoyak menyusul sejumlah fakta kerusuhan sosial yang membara di di tanah air, dipicu oleh masalah SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan) yang sangat kompleks. Terlepas dari berbagai analisis tentang apakah akar konflik sosial itu terletak pada wilayah ekonomi, politik, sosial, budaya, etnis atau agama. Karena itu, ketika toleransi tidak dihargai oleh masyarakat, maka muncul sebuah pertanyaan apa yang salah dengan sistem sosial-budaya kita? Apakah sistem pendidikan kita tidak memiliki ruang cukup bagi



tumbuhnya semangat toleransi? Lalu, model pendidikan yang bagaimana yang mampu menumbuhkan toleransi agama?

Melalui pendidikan, nilai apa yang relevan ditumbuhkan pada peserta didik agar mereka mengapresiasi keberagaman? Adakah kemungkinan perumusan ulang kurikulum pendidikan nasional yang mendorong tumbuhnya nilai toleransi agama. Kondisi pendidikan di Indonesia, menurut pakar pendidikan tidak memadai lagi untuk masyarakat Indonesia yang plural dan multikultural. Oleh karena itu, perlu dilakukan transformasi paradigma pendidikan di Indonesia. Adapun paradigma pendidikan yang ditawarkan adalah pendidikan multikultural sebagai pengganti pendidikan monokultural.

Penyelenggaraan pendidikan multikultural di dunia pendidikan diyakini dapat menjadi solusi nyata bagi konflik dan intoleransi yang terjadi di masyarakat. Dengan kata lain, pendidikan multikultural dapat menjadi sarana alternatif pemecahan konflik sosial budaya. Spektrum kultural masyarakat Indonesia yang amat beragam menjadi tantangan bagi dunia pendidikan guna mengolah perbedaan tersebut menjadi suatu aset, bukan sumber perpecahan. Saat ini, pendidikan multikultural mempunyai dua tanggung jawab besar, yaitu: menyiapkan bangsa Indonesia untuk menghadapi arus budaya luar di era globalisasi dan menyatukan bangsa yang terdiri dari berbagai macam budaya.

Pendidikan kebangsaan dan ideologi telah banyak diberikan di perguruan tinggi, namun pendidikan multikultural belum diberikan dengan proporsi yang benar. Maka sekolah sebagai institusi pendidikan dapat mengembangkan pendidikan multikultural dengan model

masing-masing sesuai asas otonomi pendidikan. Menurut penulis, pendidikan multikultural tersebut sebaiknya lebih ditekankan pada mata pelajaran agama, kebangsaan, dan moral. Pada dasarnya model pembelajaran seperti itu memang sudah ada. Namun, hal itu masih sekedar teori sedangkan dalam prakteknya belum terlaksana dengan baik.

Hal itu terlihat dengan munculnya konflik yang terjadi pada kehidupan berbangsa saat ini dimana pemahaman toleransi masih amat kurang. Hingga detik ini, jumlah siswa dan mahasiswa yang memahami makna budaya bangsa masih sangat sedikit. Padahal dalam konteks pendidikan multikultural, memahami makna dibalik realitas budaya suku bangsa merupakan hal yang esensial. Maka, penyelenggaraan pendidikan multikultural dapat dikatakan berhasil bila berbentuk pada diri siswa sikap hidup saling toleransi, tenggang rasa, tepo seliro, tidak bermusuhan dan tidak berkonflik yang disebabkan oleh perbedaan budaya, suku, bahasa, adat istiadat atau lainnya.

Menurut Stephen Hill, Direktur PBB bidang pendidikan, ilmu pengetahuan dan budaya, UNESCO untuk kawasan Indonesia, pendidikan multikultural dapat dikatakan berhasil bila prosesnya melibatkan semua elemen masyarakat. Secara konkret, pendidikan ini tidak hanya melibatkan guru atau pemerintah saja, namun seluruh elemen masyarakat. Hal itu dikarenakan adanya multi dimensi aspek kehidupan yang tercakup dalam pendidikan multikultural. Perubahan yang diharapkan dalam konteks pendidikan multikultural ini tidak terletak pada angka (kognitif) sebagaimana lazimnya penilaian keberhasilan pendidikan di negeri ini.

Namun, lebih dari itu yakni terciptanya kondisi yang nyaman, damai, toleran dalam kehidupan masyarakat, dan

tidak selalu muncul konflik yang disebabkan oleh perbedaan budaya dan SARA. Bahkan, ada yang mengatakan bahwa hasil pendidikan multikultural tidak bisa diukur oleh waktu tertentu. Maka, di Indonesia sudah saatnya memberikan perhatian besar terhadap pendidikan multikultural. Salah satu yang menjadi sasaran utama dari pelaksana pendidikan multikultural ini ada pada level perguruan tinggi. Perguruan tinggi memiliki peran kunci guna menghasilkan sumber daya manusia yang akan bekerja pada ranah praktik, yang dengannya, pengetahuan yang memadai mengenai multikulturalisme dapat disokong melalui peran pendidikan multikultural. Secara tidak langsung, hal itu dapat memberikan solusi bagi permasalahan sosial di masa mendatang.

## BAB II

# EPISTEMOLOGI

# MULTIKULTURALISME

### A. Konsep Multikulturalisme

Dalam bahasa yang mudah dan sederhana sebagaimana yang diungkapkan oleh Parekh yang dikutip sebelumnya, sebuah masyarakat apabila memiliki berbagai budaya maka masyarakat itu disebut sebagai masyarakat multikultural.

Secara bahasa, multikulturalisme berasal dari kata “multi” yang berarti beraneka ragam dan “kultural” yang berasal dari kata *culture* dan berarti budaya dan “isme” yang menyiratkan aliran atau paham tertentu. Dengan demikian multikulturalisme dapat diartikan secara sederhana sebagai isme atau aliran atau paham yang berkaitan dengan berbagai-bagai atau beraneka ragam budaya. Wikipedia mengartikan multikulturalisme sebagai, *“the term multiculturalism generally refers to a de facto state of racial, cultural and ethnic diversity within the demographics of a specified place, usually at the scale of an organization such as a school, business, neighbourhood, city or nation.”*

Sedangkan dalam Canadian Encyclopaedia, disebutkan bahwa, *“multiculturalism, as a term, used in at least 3 senses: to refer to a society that is characterized by ethnic or cultural heterogeneity; to refer to an ideal of equality and mutual respect among a population’s ethnic or cultural groups; and to refer to government policy proclaimed by the federal government in 1971 and subsequently by a number of provinces.”*

Dari definisi yang tercantum dalam Canadian Encyclopaedia ini, multikulturalisme sebagai suatu fakta, sebagai suatu gagasan dan sebagai suatu kebijakan yang telah berlaku yang dianggap sebagai cikal bakal lahirnya paham atau gagasan multikulturalisme.

Pada kenyataannya istilah multikulturalisme sering dipertukarkan dengan multikulturalisme. Untuk mengkaji lebih jernih multikulturalisme, perlu dicermati pemetaan yang dikemukakan oleh Bhikku Parekh atas masyarakat multikultural. *Pertama*, adalah kelompok masyarakat yang memiliki budaya sebagaimana umumnya masyarakat, namun dalam beberapa hal mereka memiliki keyakinan dan praktek keyakinan yang berbeda sesuai dengan wilayah kehidupan dan cara hidup yang berlainan. Mereka menginternalisasi nilai dan norma dari masyarakat akan tetapi pada saat yang sama mereka berusaha menciptakan ruang yang berbeda dalam gaya hidup mereka yang berlainan itu. Mereka tidak berkeinginan untuk melahirkan budaya alternatif, akan tetapi menganeekaragamkannya dengan kehadiran mereka yang berbeda tersebut. Parekh menyebut kelompok ini sebagai keberagaman subkultur (*subculture diversity*).

*Kedua*, masyarakat yang di dalamnya ada kalangan yang kritis terhadap berbagai nilai dan prinsip utama yang ada dalam budaya dominan masyarakat tersebut, untuk kemudian berupaya mengkonstruksinya kembali. Kritisisme ini bermula dari perbedaan pandangan. Pandangan-pandangan yang berbeda dan bahkan saling berlawanan ini kemudian melahirkan upaya untuk mengubah budaya dominan dan lalu membentuknya sesuai dengan pandangan mereka tersebut. Parekh menyebut fenomena ini sebagai keanekaragaman pandangan (*perspectival diversity*).

*Ketiga*, komunitas masyarakat yang memiliki kesadaran diri yang berbeda, terorganisir dengan baik, dan mereka memiliki hidup dengan sistem keyakinan dan praktek keyakinan yang berlainan. Komunitas-komunitas ini biasanya terkonsentrasi (secara geografis) pada beberapa wilayah kehidupan tertentu (teritorial). Parekh menyebut gejala ini sebagai keanekaragaman komunal (*communal diversity*).

Jadi, masyarakat multikultural merupakan masyarakat yang komponennya menggambarkan salah satu, dua, atau ketiga klasifikasi tersebut. Berbeda dengan pluralisme yang ruang lingkungannya pada sub komponen yang besar-besar seperti agama, suku, dan ras, multikulturalisme mencakup komponen yang lebih “mikro” lagi, seperti bahkan mungkin pemikiran dan gaya hidup.

Benang merah dari paparan tersebut adalah bahwa multikulturalisme merupakan konsep pengelolaan masyarakat yang secara kultural majemuk, sekecil apapun tingkat dan lingkup kemajemukan budaya tersebut, dengan memberikan pengakuan (rekognisi) atas eksistensi komponen kemajemukan tersebut. Pengakuan tersebut dalam fenomena kontemporer merupakan tuntutan (*demand*). Oleh karenanya ketiadaan pengakuan, yang berarti nihilnya pemenuhan tuntutan, sangat potensial terhadap munculnya berbagai konflik.

## **B. Multikulturalisme dan Konflik**

Masyarakat yang multikultural mengandung potensi yang lebih tinggi untuk terjadi konflik mengingat perbedaan latar belakang kesejarahan dan latar belakang sosial, politik dan aspek-aspek lainnya. Namun tidak berarti bahwa masyarakat monokultur tidak mengalami konflik. Hanya

saja, konflik dalam masyarakat monokultur lebih bernuansa pertentangan pribadi atau kelas sosial dan ditambah lagi dalam dunia yang mengglobal ini, hampir tidak dapat ditemukan lagi suatu masyarakat yang monokultur.

Konflik terjadi karena dalam masyarakat terdapat kelompok-kelompok kepentingan, lembaga-lembaga, organisasi, dan kelas-kelas sosial yang tidak selalu memiliki kepentingan yang sama dan serasi. Adanya kelompok-kelompok inilah yang mengaitkan antara kerawanan konflik dengan eksistensi masyarakat multikultural. Jika dalam masyarakat monokultur, konflik terjadi antara kelompok-kelompok, lembaga-lembaga yang berasal dari etnis, agama atau ras yang sama maka dalam masyarakat multikultural, konflik potensial terjadi antara budaya, ras, etnis atau agama yang berbeda-beda. Konflik terjadi karena di antara kelompok-kelompok tersebut memiliki perbedaan taraf kekuasaan dan wewenang. Demikian pula dengan distribusi dan alokasi sumber daya yang langka di antara kelompok-kelompok masyarakat tidak selalu seimbang. Kondisi seperti ini tidak terelakkan, sehingga konflik merupakan gejala yang senantiasa terjadi dalam masyarakat.

Weber berpendapat konflik tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial. Sementara Simmel berpendapat bahwa terjadinya konflik tidak terelakkan dalam masyarakat. Masyarakat dipandang sebagai struktur sosial yang mencakup proses-proses asosiatif dan disosiatif yang hanya dapat dibedakan secara analisis. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa konflik merupakan pencerminan pertentangan kepentingan dan naluri untuk bermusuhan.

Menurut Galtung, sejatinya konflik memiliki 3 (tiga) unsur utama:

1. Ketidasesuaian diantara kepentingan dan kontradiksi diantara kepentingan atau menurut akademis sebagai sesuatu “ketidakcocokan antara nilai-nilai sosial dan struktur sosial.”
2. Perilaku negatif dalam bentuk persepsi atau stereotip yang berkembang diantara pihak-pihak yang berkonflik
3. Perilaku kekerasan dan ancaman yang diperlihatkan.

Konflik bisa bersumber dari berbagai hal yang menurut Rauf dapat diidentifikasi ke dalam salah satu dari hal-hal berikut :

1. Struktur yang terdiri dari penguasa politik dan sejumlah orang yang dikuasai, struktur ini menyebabkan konflik politik yang utama adalah konflik antara penguasa politik dan sejumlah orang yang menjadi objek kekuasaan politik.
2. Adanya keterbatasan sumberdaya dan posisi (*resources an position scarcity*), semakin tinggi tingkat kelangkaan sumber-sumber daya yang dibutuhkan untuk hidup, semakin besar kemungkinan terjadinya konflik.
3. Prinsip kesenangan yaitu adanya kecenderungan dalam diri manusia untuk mempertahankan kenikmatan yang sudah dimiliki dengan segala cara.
4. Kebijakan-kebijakan publik sebagai sesuatu hal yang akan dikerjakan atau yang dilarang oleh pemerintah yang juga dapat menimbulkan persoalan bahkan hingga ke taraf konflik.

Konflik bisa ditinjau dari aspek sosial dan politik. Konflik sosial bisa diartikan sebagai perjuangan untuk



mendapatkan nilai-nilai atau pengakuan status, kekuasaan dan sumber daya langka. Tujuan kelompok-kelompok yang berkonflik tidak hanya mendapatkan nilai-nilai yang diinginkan tapi juga menetralkan, melukai atau mengurangi saingan-saingan mereka. Konflik bisa terjadi di antara individu dan individu, antara individu dan organisasi atau kelompok, antara organisasi yang satu dengan organisasi yang lain, dan dalam komponen sebuah organisasi atau kelompok.

Konflik adalah unsur penting bagi integrasi sosial. Selama ini konflik selalu dipandang sebagai faktor negatif yang memecah belah. Konflik sosial dalam beberapa cara memberikan sumbangan pada keutamaan kelompok serta mempererat hubungan interpersonal.

Duverger (1993:33) berpendapat bahwa setiap fenomena politik memiliki aspek konflik dan integrasi. Kekuasaan merupakan salah satu fenomena politik yang penting. Kekuasaan merupakan sumber daya langka yang menjadi penyebab konflik. Orang yang mempunyai kekuasaan cenderung untuk mempertahankan kekuasaan. Di samping itu, ada pihak lain yang menentang kekuasaan dan ingin merebut kekuasaan itu untuk tujuan yang sama. Kekuasaan mempunyai aspek integrasi dalam arti bahwa kekuasaan dipergunakan untuk menegakkan ketertiban dan keadilan; sebagai pelindung kepentingan dan kesejahteraan umum melawan tindakan berbagai kelompok kepentingan. Selanjutnya Duverger (1993: 275) mengatakan:

Konflik dan integrasi bukan dua aspek yang kontradiktif di dalam politik; mereka juga saling melengkapi satu sama lain. Dalam mempelajari sebab-sebab antagonisme, kita mendapatkan bahwa hal ini agak ambivalen. Antagonisme menghasilkan konflik, akan tetapi,

dalam kesempatan tertentu, juga menolong membatasi konflik dan meningkatkan integrasi. Berbicara secara umum, integrasi dalam hal-hal tertentu muncul sebagai akibat terakhir dari antoganisme politik, dan paham integrasi memainkan peranan penting justru di dalam perkembangan konflik. Setiap tantangan terhadap ketertiban sosial yang ada meliputi suatu visi dan rencana bagi suatu ketertiban sosial yang lebih tinggi dan lebih otentik. Setiap perjuangan berisikan tujuan tentang perdamaian dan merupakan usaha untuk merealisasikan tujuan tersebut. Banyak yang berpendapat bahwa konflik dan integrasi tidak berlawanan, akan tetapi menjadi bagian tak terpisahkan dari proses umum yang sama bahwa antoganisme cenderung, justru oleh perkembangannya, ke arah menghapus dirinya sendiri dan berikutnya menghasilkan harmoni sosial.

Untuk bisa memberikan sebuah solusi dari suatu konflik, maka perlu diketahui lebih dahulu apa yang menjadi penyebabnya. Penyebab konflik multikultural dapat dikemukakan dari berbagai faktor.

*Pertama* adalah faktor sosial ekonomi (akses ke sumber daya ekonomi) yang dicerminkan oleh:

1. Sebuah kondisi untuk saling mengklaim dalam menguasai sumber daya yang semakin terbatas akibat tekanan penduduk dan kerusakan lingkungan atau ada eksploitasi sumber daya oleh sekelompok masyarakat tanpa mengindahkan norma-norma masyarakat disekitarnya. Sebagai contohnya adalah konflik di Kalimantan Barat yang melibatkan etnis Dayak dan etnis Madura.
2. Kecemburuan sosial yang bersumber dari ketimpangan ekonomi antara kaum migran (pendatang) dengan penduduk asli (lokal).

Keberhasilan ekonomi kaum migran hasil kerja keras yang tak mengenal lelah berhasil menguasai pasar ekonomi namun oleh penduduk asli, hal ini dipandang sebagai bentuk penjajahan ekonomi.

*Kedua* adalah faktor sosial budaya yang dicerminkan oleh:

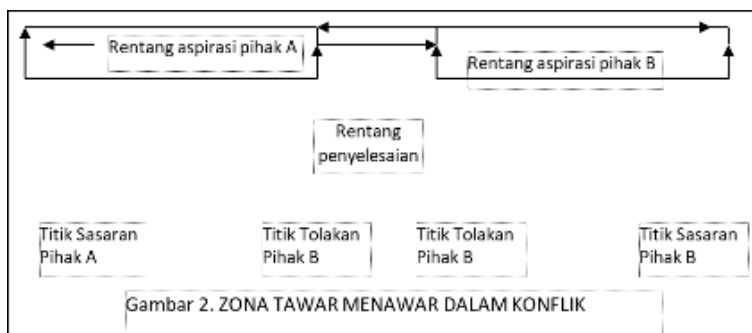
1. Dorongan emosional kesukuan karena ikatan-ikatan norma tradisional melahirkan sebuah kefanatikan.
2. Sentimen antarpemeluk agama yang terjadi karena kurangnya pengetahuan dalam memahami suatu ajaran agama. Tidak bisa dipungkiri jika selama ini banyak pemeluk agama yang hanya memahami agama pada tataran ritual simbolik saja. Makna dan hakekal ajaran suatu agama kurang dihayati dan diamalkan secara benar. Oleh karenanya tidak mengherankan jika simbol-simbol agama disinggung secara tidak wajar, maka pemeluknya akan merasa tersinggung dan saling rnenyerang.

*Ketiga* adalah faktor sosial politik yang dicerminkan oleh beberapa hal, antara lain:

1. Distribusi kekuasaan yang tidak merata. Ini berarti bahwa konflik sosial pasti akan muncul karena secara rasional tidaklah mungkin dilakukan distribusi kekuasaan secara merata kepada seluruh anggota masyarakat sehingga konflik akhirnya merupakan suatu keniscayaan dalam masyarakat.
2. Tidak tunduknya individu atau kelompok sebagai pihak yang dikuasai terhadap sanksi yang diberikan oleh pihak yang sedang berada dalam posisi menguasai.
3. Pertentangan antara kelompok yang sedang berkuasa dengan kelompok yang dikuasai di mana kelompok yang berkuasa ingin memperthankan *set of properties*

yang melekat pada kekuasaannya sementara yang dikuasai selalu terobsesi untuk mewujudkan perubahan yang dianggapnya merupakan satu-satunya jalan untuk menggapai perbaikan posisi dirinya.

Bilamana ini terjadi, maka pihak yang berkonflik berada pada sebuah zona tawar-menawar yang distributif. Dalam hal ini suatu aturan yang digunakan berusaha untuk membagi sejumlah tetap sumber daya sehingga situasi kalah-menang. Contohnya adalah ada sebuah peraturan daerah di Kalimantan Timur etnis Madura dengan etnis Dayak. Jelas sekali bahwa etnis Madura berada pada sisi yang dikalahkan.



Gambar 2. ZONA TAWAR MENAWAR DALAM KONFLIK

Proses tawar menawar distributif difokuskan pada upaya memaksa salah satu pihak yang berkonflik untuk menyetujui atau menerima titik sasaran spesifiknya atau sedekat mungkin dengan itu.

Ini merupakan suatu bukti bahwa penerapan prinsip *political recognition* tidak bisa diterapkan bila penyelesaian suatu konflik rnenfaatkan proses tawar menawar secara distributif. Prinsip *political recognition* bisa berjalan manakala sebuah produk regulasi yang dikeluarkan untuk mengatasi konflik memanfaatkan proses tawar menawar yang integratif. Proses ini berjalan dengan pengandaian

bahwa terdapat satu atau lebih penyelesaian yang akan mencitakan situasi menang-menang. Namun demikian hal ini membutuhkan beberapa persyaratan, antara lain:

1. Pihak-pihak yang berkonflik terbuka terhadap informasi dan jujur mengenai kepentingannya.
2. Pihak-pihak yang berkonflik harus punya kepekaan terhadap kebutuhan pihak lain.
3. Kemampuan untuk saling mempercayai dan kesediaan untuk memelihara keluwesan.

Sebuah tatanan aturan, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah atau kelompok etnis tertentu, akan akan niendapatkan sehuai pengakuan ,jika mengandung kaidah-kaidah dasar interaksi sosial sebagai parameter tatanan aturan tersebut. *Pertama*, batas-batas kelembagaan dan simbolis dari kolektivitasnya terutama dengan menempatkan aturan dasar kesamaan sosial dan kebudayaan. Atribut tersebut memberikan spesifikasi kewajiban kondisional dan nonkondisional yangberhubungan dengan partisipasi komunikasi serta tujuan dan keinginan (desiderata) yang membolehkan terlibat dalam setiap interaksi.

*Kedua*, aturan-aturan keadilan yang merata dan persamaan yang dianggap sesuai dengan atribut hak dan kewajiban setiap komunitas etnis. *Ketiga*, kriteria akses ke jalur kekuasaan dan pelaksanaannya dalam pelbagai lingkungan sosial dan kelembagaan. *Keempat*, kegunaan yang lebih luas dari tujuan-tujuan kolektif dan artinya dari setiap interaksi titau kegiatan kolektif dan jangkauan kebutuhan kongkrit yang bertalian erat dengan kepentinban relatif di dalamnya. Kelima, legitimasi kornpleks kelembagaan dalam artian norma-norma umum akan keadilan, persamaan serta tujuan-tujuan masyarakat yang lebih luas.

Konflik yang sudah muncul di masyarakat dapat diatasi dengan:

1. Kalau konflik menyangkut kemajemukan vertikal-horisontal yang timbul karena tiap-tiap kelompok atau individu yang berdasarkan pekerjaan, profesi, dan tempat tinggal tersebut memiliki kepentingan berbeda bahkan saling bertentangan, alternatif yang bisa dilakukan adalah kemampuan semua pihak yang berkonflik untuk saling menyesuaikan diri dengan kepentingan dan nilai pihak lain.
2. Kalau konflik menyangkut kemajemukan horisontal-struktur masyarakat yang terpolarisasi menurut pemikiran, kekayaan, pengetahuan, dan kekuasaan adalah mengurangi disparitas (perbedaan) diantara dua belah pihak. Kalau hal demikian menyangkut kekayaan, maka bagaimana kekayaan itu mampu didistribusikan secara merata. Sedangkan bila menyangkut kekuasaan, maka adanya prinsip proporsionalitas yakni posisi-posisi pemerintahan yang terpenting didistribusikan kepada golongan-golongan masyarakat sesuai dengan porsi jumlahnya dalam keseluruhan penduduk.

Kalau konflik berkaitan dengan kurangnya saluran katarsis politik adalah bagaimana proses penyaluran aspirasi, komentar, partisipasi, dan inisiatif masyarakat dapat dilakukan. Sebab selama ini disinyalir adanya kekuatan besar dari negara di satu sisi dan ketidakberdayaan masyarakat di sisi lain menyebabkan tersumbatnya saluran katarsis. Kondisi ini menyebabkan munculnya sistem politik yang kaku dengan tidak adanya kemandirian masyarakat. Akibatnya segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak pemerintah akan menyingkir (atau memang

sengaja disingkirkan) dan mengalah (atau sengaja dikalahkan).

### **C. Multikulturalisme sebagai Isu Kebijakan**

Salah satu langkah yang dipandang efektif dalam upaya memwadahi politik pengakuan adalah dengan mengadopsinya dalam produk hukum perundang-undangan atau yang secara lebih luas dikenal sebagai kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pejabat formal yang berwenang untuk mengadakan atau mengeluarkan hal tersebut. Efektifitas kebijakan publik dalam memwadahi prinsip-prinsip politik pengakuan salah satunya adalah karena pejabat formal adalah bagian integral dari negara yang memiliki alat pemaksa untuk berlakunya kebijakan publik tersebut sehingga kebijakan tersebut dapat dijalankan. Namun demikian, perumusan masalah kebijakan dalam analisis kebijakan adalah bagian yang bersifat amat krusial. Kegagalan analisis kebijakan sering dikarenakan oleh analisis atau *policy maker* justru memecahkan masalah yang salah. Penyebab kegagalan yang lain adalah solusi yang diajukan salah atau kurang tepat dalam memecahkan suatu masalah yang benar-benar masalah.

Konflik etnik di Sambas merupakan persoalan yang sangat urgen untuk diselesaikan dengan pendekatan kebijakan yang tepat. Selanjutnya akan dikemukakan kajian teoritik mengenai perumusan kebijakan publik.

#### **1. Batasan Masalah Publik**

Secara formal suatu masalah dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi atau situasi yang menimbulkan kebutuhan atau ketidakpuasan pada sebagian orang yang menginginkan pertolongan atau perbaikan. Masalah dapat

dikategorikan ke dalam masalah privat dan masalah publik. Sebuah masalah dikatakan sebagai masalah privat apabila masalah tersebut dapat diatasi tanpa mempengaruhi orang lain atau tanpa harus melibatkan pemerintah. Sedangkan masalah publik muncul ketika masalah privat tersebut telah bergeser dan dirasakan sebagai kesulitan bersama oleh sekelompok masyarakat dan hanya dapat diatasi melalui intervensi pemerintah. Oleh karena itu, masalah publik dapat dipahami sebagai suatu kondisi belum terpenuhinya kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang diinginkan oleh publik dan pemenuhannya haaya mungkin melalui kebijakan pemerintah. Budi Winarno masih mensyaratkan bahwa suatu masalah akan menjadi masalah apabila ada orang atau kelompok yang menggerakkan ke arah tindakan guna mengatasi masalah tersebut. Dengan demikian, misalnya saja ada suatu kelompok mempunyai pendapatan rendah, tetapi menerima kondisi tersebut dan tidak ada sesuatupun dilakukan oleh pihak lain atas nama kelompok tersebut, maka hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai masalah kebijakan.

Masalah-masalah publik adalah masalah-masalah yang mempunyai dampak yang luas dan mencakup konsekuensi-konsekuensi bagi orang-orang atau kelompok yang tidak secara langsung terlibat. Walau demikian, bisa jadi masalah publik atau beberapa orang saja. Suatu masalah dapat menjadi masalah publik atau bukan. dapat dilihat dari akibat tindakan yang dilakukan oleh individu tersebut. Tindakan individu sebagai manusia mempunyai dua jenis konsekuensi. Konsekuensi yang pertama, menurut John Dewey dalam Charles O. Jones, tindakan tersebut mempunyai dampak pada orang melebihi orang-orang yang secara langsung berhubungan dan konsekuensi kedua,



tindakan tersebut mempunyai dampak pada orang melebihi orang-orang yang secara langsung terlibat. Apabila dampak tindakan tersebut sudah melebihi orang-orang yang secara langsung terlibat, maka tindakan itu telah merambah atau bersinggungan dengan masalah publik.

Dengan perspektif demikian, konflik etnik di Sambas dan beberapa daerah lain di Indonesia merupakan masalah publik yang membutuhkan kebijakan penyelesaian yang tepat. Konflik etnik telah mempengaruhi tatanan sosial masyarakat seeara vertical dan horizontal.

## 2. Jenis-Jenis Masalah Publik

Ada beberapa kategori dalam melihat jenis jenis masalah publik ini :

- 1) Masalah publik dikategorikan menjadi masalah prosedural dan substantif.
  - a. Masalah prosedural berhubungan dengan bagaimana pemerintah diorganisasikan dan bagaimana pemerintah melakukan tugas-tugasnya.
  - b. Masalah substantif berkaitan dengan akibat-akibat nyata dari kegiatan manusia, seperti berkaitan kebebasan berbicara ataupun polusi lingkungan.
- 2) Kategori masalah publik didasarkan asal-usul masalah tersebut. Menurut kategori ini, masalah publik dibedakan menjadi masalah luar negeri dan masalah dalam negeri.
  - a. Masalah luar negeri adalah masalah-masalah yang menyangkut hubungan antara negara satu dengan negara lainnya, misalnya terlihat dengan

- perjanjian bilateral, multilateral, perjanjian ekstradisi, nuklir dan sebagainya.
- b. Masalah dalam negeri meliputi: masalah pendidikan, kemiskinan/ kesejahteraan, keamanan, kriminalitas/kejahatan, perpajakan, transportasi dan sebagainya.
- 3) Kategori masalah publik didasarkan pada jumlah orang yang dipengaruhi serta hubungannya antara satu dengan yang lain. Berdasarkan kategori ini, masalah publik dibedakan menjadi masalah distributif, masalah regulasi, dan masalah redistributif.
- a. Masalah distributif mencakup sejumlah kecil orang yang dapat ditanggulangi satu per satu. sebagai contoh masalah ini permintaan masyarakat terkait proyek-proyek pengendalian banjir, reboisasi, pengadaan air bersih dan sebagainya.
  - b. Masalah regulasi mendorong timbulnya tuntutan-tuntutan yang diajukan dalam rangka membatasi tindakan-tindakan pihak lain. Sebagai contoh, untuk mencegah akibat-akibat buruk yang disebabkan adanya aksi-aksi buruh, para pengusaha menuntut pengaturan aksi-aksi tersebut sehingga tidak merugikan perusahaan. Suatu masalah, dengan demikian dapat disebut masalah regulasi apabila masalah tersebut menyangkut peraturan-peraturan yang bertujuan untuk membatasi tindakan-tindakan pihak tertentu.
  - c. Masalah redistributif, menyangkut masalah-masalah yang menghendaki perubahan sumber-

sumber antara kelompok-kelompok atau kelas-kelas dalam masyarakat. Kelompok yang melihat ketidaksamaan pendapatan/penghasilan sebagai masalah publik sering menuntut pajak-pajak pendapatan yang dibagi-bagi dari lapisan masyarakat kaya ke lapisan masyarakat miskin.

### 3. Sifat-Sifat atau Ciri-Ciri Masalah Kebijakan Publik

Sifat-sifat atau ciri-ciri masalah publik sangat kompleks. Untuk dapat merumuskan masalah publik yang benar dan tepat tidaklah mudah tanpa memahami karakteristik dari masalah publik tersebut. Berikut ini akan diuraikan berbagai karakteristik atau ciri pokok masalah publik yang dikemukakan William N. Dunn sebagai berikut:

- a. Saling ketergantungan (*interpendence*), masalah-masalah publik dalam satu bidang tertentu sering mempengaruhi masalah-masalah publik di lain bidang. Demikian pula suatu masalah publik bukanlah suatu masalah yang berdiri sendiri, namun saling terkait dengan masalah yang lainnya. Masalah energi (bahan bakar minyak) misalnya memperbarui masalah transportasi, sembilan bahan pokok (sembako), masalah pengangguran dengan masalah kemiskinan, atau pun kejahatan dan sebagainya.
- b. Subyektivitas. Masalah kebijaksanaan ini adalah suatu hasil pemikiran yang dibuat pada suatu lingkungan tertentu, masalah tersebut merupakan elemen dari suatu situasi masalah yang diabstraksikan dari situasi tersebut oleh analis. Karenanya bisa jadi suatu tontonan yang dianggap sebagai suatu masalah oleh lingkungan tertentu, oleh

lingkungan lain tidak dianggap sebagai masalah. Sebagai contoh dalam hal ini adalah masalah dampak antara masyarakat desa dengan masyarakat atau keluarga-keluarga yang tinggal di perkotaan. Masyarakat desa tidak menganggap masalah dengan sampah rumah tangga. Sebaliknya tiap keluarga di masyarakat perkotaan menganggap sampah rumah tangga sebagai masalah serius yang harus dipecahkan.

- c. Sifat buatan (*artificiality*). Masalah kebijakan hanya mungkin (dianggap sebagai masalah) ketika manusia membuat penilaian mengenai keinginannya untuk mengubah beberapa situasi. Masalah kebijakan merupakan hasil penilaian subyektif manusia, masalah kebijakan juga bisa diterima sebagai definisi-definisi yang sah dari kondisi sosial obyektif, karena itu masalah kebijakan tersebut dipahami, dipertahankan, dan diubah secara sosial. Pendapatan perkapita yang rendah menjadi masalah karena pemerintah berkeinginan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- d. Dinamika masalah kebijakan. Solusi terhadap suatu masalah selalu berubah. Ada banyak solusi yang bisa ditawarkan untuk memecahkan suatu masalah sebagaimana terdapat banyak pula definisi terhadap masalah-masalah tersebut. Masalah yang sama juga belum tentu dapat dipecahkan dengan kebijakan yang sama kalau konteks lingkungan berbeda atau berubah. Demikian pula adanya masalah yang sama belum tentu dapat dipecahkan dengan kebijakan yang sama kalau waktunya berbeda. Cara pandang seseorang terhadap suatu masalah pada akhirnya

akan menentukan solusi yang ditawarkan untuk memecahkan masalah tersebut.

Kemudian William N.Dunn menyatakan bahwa adanya pengakuan adanya ketergantungan, subyektivitas, sifat buatan (*artificiality*), dan kedinamisan dari masalah-masalah kebijakan membuat kita lebih berhati-hati terhadap kemungkinan terjadinya konsekuensi-konsekuensi yang tidak terduga ketika suatu kebijakan dibuat berdasarkan pada pemecahan masalah yang salah. Suatu masalah akan menjadi masalah apabila masalah-masalah tersebut didefinisikan, diinterpretasikan dan diartikulasikan oleh orang-orang atau kelompok-kelompok yang mempunyai kepentingan terhadap masalah tersebut. Oleh karena itu, ia membutuhkan pengalaman subyektivitas individu.

#### **4. Tipe-Tipe Masalah Publik**

Masalah publik cukup banyak, tetapi sering hanya masalah-masalah tertentu yang dianggap sebagai masalah publik sedangkan yang lainnya tidak. Terkait dengan persoalan tersebut, pendapat Charles D. Jones tentang dua tipe masalah publik (*problem publik*) kiranya dapat digunakan untuk menjelaskannya. Pertama, masalah-masalah tersebut dikarakteristikkan oleh adanya perhatian warga kelompok dan warga kota Yang terorganisasi yang bertujuan untuk melakukan tindakan (*action*). Kedua, masalah-masalah tersebut, tidak dapat dipecahkan secara individual/pribadi, tetapi kurang terorganisasi (dan kurang mendapatkan dukungan). Menurut Jones perbedaan masalah tersebut merupakan suatu yang kritis dalam memahanri kompleksitas proses yang berlangsung yang dengannya beberapa masalah bisa sarnpai kepada pemerintah, sedangkan rnasalah-masalah publik lainnya

tidak sampai pemerintah. Dari sini menurut Jones, suatu masalah bisa masuk ke agenda pemerintah atau tidak tergantung pada sikap dukungan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap masalah tersebut. Jika suatu masalah publik mendapat dukungan yang luas dalam masyarakat dan kelompok-kelompok yang berkepentingan terhadap masalah tersebut juga mengorganisasikan diri, maka kemungkinan besar masalah tersebut akan masuk ke agenda pemerintah.

Tipologi masalah publik dalam analisis kebijakan sebagaimana dikemukakan William N. Dunn ditinjau dari tingkat kompleksitasnya dikategorikan menjadi 3. Ketiga tipe masalah tersebut adalah masalah yang terstruktur dengan baik (*well structured*), masalah yang agak terstruktur (*moderately structure*) dan masalah yang tidak terstruktur (*illstructured*). Masalah yang terstruktur dengan baik adalah masalah yang pemecahannya hanya melibatkan beberapa pembuat kebijakan dengan alternatif pemecahan terbatas, nilai dari pemecahan masalah disetujui, dan hasilnya lebih dapat dipastikan dengan tingkat probabilitas yang dapat diperhitungkan. Sebagai contoh atas masalah ini adalah pengangkatan pegawai negeri sipil (PNS). Dalam hal ini pejabat yang berwenang mengangkat atau menyelenggarakan syarat untuk diterima/diangkat sebagai PNS, berapa gajinya dan sebagainya sudah jelas.

Sedangkan masalah yang agak terstruktur adalah masalah yang pemecahannya melibatkan beberapa pembuat kebijakan (*policy maker*), alternatif pemecahannya terbatas, nilai yang akan dikejar disetujui, tetapi hasilnya tidak pasti dengan tingkat probabilitas yang sulit dihitung. Contoh dalam hal ini misalnya, masalah pembebasan tanah untuk pembangunan (pelebaran jalan, proyek pembangunan

lainnya) yang membutuhkan ganti rugi. Pemecahan masalah ini melibatkan banyak instansi, dan nilai yang dikejar adalah tercapainya kesepakatan atau konsensus harga antara pemilik tanah dan pernerintah.

Akhirnya masalah yang tidak terstruktur adalah masalah yang pemecahannya melibatkan banyak pembuat kebijakan (*policy maker*), alternatif pemecahannya tidak terbatas, nilai yang akan dikejar masih menimbulkan konflik, hasil akhirnya sangat sulit diketahui dengan pasti karena tingkat probabilitasnya sangat sulit dihitung. Masalah kemiskinan, pengangguran, kemaksiatan kiranya sangat cocok pada masalah MI. Bukan hanya pemerintah tetapi lembaga-lembaga/organsasi-organisasi non pemerintah pun cenderung berupaya memecahkan masalah tersebut. Akan tetapi ketika sampai kepada pemilihan alternatif yang terbaik dari berbagai alternatif yang diajukan justru sering terjadi konflik. Hal ini dapat terjadi karena setiap orang, kelompok, ataupun lembaga rnengajukan alternatifnya masing-masing yang dianggap paling baik dari alternatif-alternatif kebijakan yang lainnya.

## 5. Fase-Fase Perumusan Masalah Publik

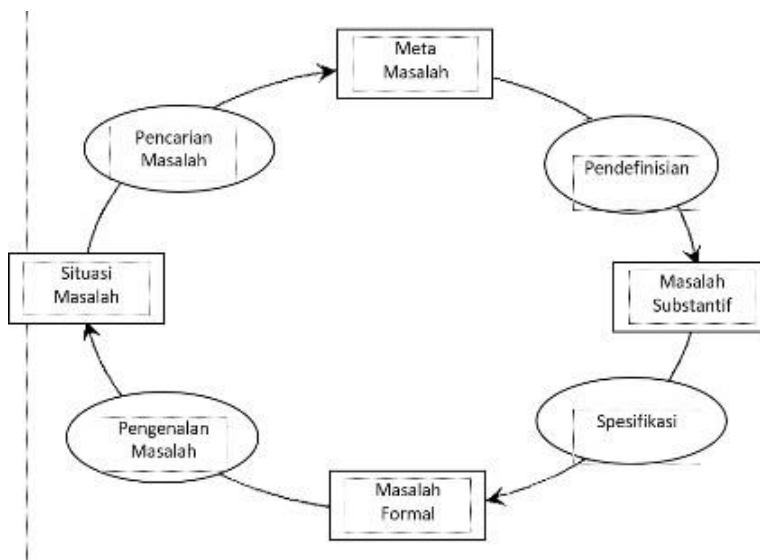
Perumusan masalah dapat dipandang sebagai suatu proses dengan 4 fase yang saling tergantung antara yang satu dengan yang lainnya. Keempat fase tersebut adalah:

- a. Pencarian masalah (*problem search*),
- b. Pendefinisian masalah (*problem definition*),
- c. Spesifikasi masalah (*problem specification*),
- d. Pengenalan masalah (*problem sensing*)

Prasyarat perumusan masalah adalah pengakuan atau dirasakannya keberadaan suatu situasi masalah. Situasi masalah yakni, serangkaian situasi yang menimbulkan rasa

ketidakpuasan dan terasa ada sesuatu yang salah. Dalam kondisi demikian para analis terlibat dalam pencarian masalah (*problem search*). Akibatnya, para analis dihadapkan pada meta masalah (*metau problem*). Meta problem yakni suatu masalah di atas masalah-masalah yang rumit, karena wilayah representasi masalah yang dimiliki oleh para pelaku kebijakan nampak tidak tertata rapi.

Dari meta problem para analis melakukan pendefinisian masalah ke arah masalah yang mendasar apakah termasuk masalah ekonomi, sosial, ilmu politik, yang disebut dengan masalah substantif. Dari masalah substantif tersebut, melalui proses spesifikasi masalah (*problem spesifcution*), masalah subtanstif berubah menjadi masalah formal, yakni masalah yang telah dirumuskan secara spesifik dan jelas.



Sumber : William N. Dunn (1994: 149)

Gambar 3. Tahap-tahap Perumusan Masalah



Kemudian, agar pembuat kebijakan (*policy maker*) dapat merumuskan masalahnya dengan tepat dan benar, maka Patton dan Sawicki menganjurkan adanya tujuh tahap dalam merumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Pikirkan kenapa suatu gejala dianggap sebagai masalah.
- b. Tetapkan batasan masalah yang akan dipecahkan.
- c. Kumpulkan fakta dan informasi yang berhubungan dengan masalah yang telah ditetapkan.
- d. Rumuskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai.
- e. Identifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi masalah (*policy envelope*).
- f. Tunjukkan biaya dan manfaat dari masalah yang hendak diatasi.
- g. Rumuskan masalah kebijakannya dengan baik.

## 6. Metode Perumusan Masalah

Perumusan masalah adalah proses menghasilkan dan menguji konseptualisasi-konseptualisasi alternatif atas suatu kondisi masalah. Perumusan masalah sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya meliputi fase yang saling berhubungan, yakni mengenai masalah, meneliti masalah, mendefinisikan masalah dan menspesifikasi masalah. Metode merumuskan masalah adalah metode untuk mengenali, mendefinisikan masalah sebagaimana akan diuraikan berikut:

- a. Analisis Batas, yakni usaha mengestimasi batas peta masalah atau memetakan masalah melalui pencarian sampel bola salju (*snowball sampling*), pencarian masalah dari para *stakeholders*. Upaya ini dilakukan

karena analisis kebijakan pada permasalahan yang rumit dan belum jelas, sehingga *stakeholders* disini diharapkan dapat memberikan informasi yang berhubungan dengan permasalahan yang bersangkutan. Untuk rnengetahui permasalahan kejahatan korupsi di instansi tertentu misalnya, langkah analis pertama adalah melakukan komunikasi dengan seorang bernama X. Ternyata X memberitahukan bahwa yang bernama Y mengetahui lebih banyak tentang kasus korupsi tersebut. Kemudian dari Y diperoleh inforniasi lebih lanjut, bahwa Z mengetahui lebih banyak tentang kasus korupsi tersebut dengan benar atau tepat, sehingga akhirnya berhasil menawarkan alternatif kebijakan yang tepat.

- b. Analisis Klasifikasi, yakni upaya untuk memperoleh kejelasan melalui pemilahan secara logis dan klasifikasi konsep. Analisis klasifikasi juga bisa dimaksudkan sebagai mengklasifikasikan masalah ke dalam kategori-kategori tertentu dengan tujuan untuk lebih memudahkan analisis. John Oshaughnessy dalam William N.Dunn, menyatakan bahwa analisis klasifikasi adalah teknik untuk memperjelas konsep-konsep yang digunakan untuk mendefinisikan dan mengklasifikasikan kondisi permasalahan. Terhadap masalah rendahnya tingkat pendidikan misalnya, analis kebijakan dapat mengklasifikasi ke dalam rendahnya tingkat pendidikan di kota dan di desa. Apabila analis memperoleh data bahwa rendahnya tingkat pendidikan lebih banyak atau terkonsentrasi di daerah pedesaan, maka analis kebijakan perlu

menawarkan alternatif yang lebih memfokuskan di wilayah pedesaan.

- c. Analisis Hierarkhi, yakni upaya melalui pemilahan secara logis dan klasifikasi penyebab masalah untuk mengidentifikasi penyebab yang mungkin masuk akal, dan dapat ditindaklanjuti. Jadi dengan metode ini analisis hirarki ini analisis kebijakan menyusun masalah berdasarkan sebab-sebab yang mungkin dari situasi masalah.
- d. *Sinektika (Synectics)*, adalah sebuah metode yang diciptakan untuk mengenali masalah-masalah yang bersifat analog. Sinektika, yang terutama menunjuk pada investigasi terhadap kesamaan-kesamaan, membantu para analis melakukan analogi yang kreatif dalam memahami masalah-masalah kebijakan, beberapa studi menunjukkan bahwa orang sering gagal mengenali bahwa apa yang tampaknya sebagai masalah baru sesungguhnya merupakan masalah lama yang tersamar, dan masalah lama mungkin mengandung solusi-solusi potensial bagi masalah-masalah yang kelihatannya baru. Sinektika didasarkan ada asumsi bahwa pemahaman terhadap hubungan yang identik atau mirip diantara berbagai masalah akan mengakibatkan kemampuan analisis untuk memecahkan masalah.
- e. *Brainstorming*, adalah metode untuk merumuskan masalah melalui curah pendapat dari orang-orang yang mengetahui kondisi yang ada atau metode untuk menghasilkan ide-ide, tujuan-tujuan jangka pendek, dan strategi-strategi yang membantu menicentifikasi dan mengkonseptualisasikan kondisi-kondisi permasalahan.

- f. Analisis Perspektif Berganda, adalah metode untuk memperoleh pandangan yang lebih banyak mengenai masalah-masalah dan peluang pemecahannya secara sistematis menerapkan perspektif personal, organisasional, dan tehnikal terhadap situasi masalah.
- i. Perspektif teknis, memandang masalah-masalah dan solusisolusinya dalam kerangka model optimalisasi dan menerapkan teknik-teknik yang didasarkan pada probabilitas, analisis biaya manfaat dan analisis keputusan, ekonometri, dan analisis sistem.
  - ii. Perspektif organisasional, memandang masalah dan solusi sebagai bagian dari kemajuan yang teratur dari satu keadaan organisasi ke keadaan lainnya.
  - iii. Perspektif personal, memandang masalah-masalah dan solusi-solusi dalam kerangka persepsi, kebutuhan, dan nilai-nilai individu. Karakteristik utama perspektif personal adalah penekanan pada intuisi, karisma, kepemimpinan, dan kepentingan pribadi sebagai faktor-faktor yang menentukan kebijakan-kebijakan dan dampak-dampaknya.
- g. Analisis Asumsi (*Assumptional Analysis*), merupakan sebuah teknik yang bertujuan mensintesis secara kreatif asumsi-asumsi yang saling bertentangan mengenai masalah-masalah kebijakan. Dalam beberapa hal analisis asumsi adalah yang paling komprehensif dari semua metode perumusan masalah, karena

analisis asumsional mencakup prosedur yang digunakan dalam hubungannya dengan tehnik-tehnik lain dan dapat difokuskan pada kelompok-kelompok, individu, atau keduanya. Analisis asumsi meliputi lima tahap prosedur sebagai berikut :

- i. identifikasi pelaku kebijakan, pada tahap ini pelaku kebijakan diidentifikasi, diurutkan, dan diprioritaskan berdasarkan pada penilaian tentang seberapa jauh saling mempengaruhinya dalam proses kebijakan
- ii. memunculkan asumsi, para analisis bekerja mundur dari solusi masalah yang direkomendasikan ke seleksi data yang mendukung rekomendasi dan yang mendasari asumsi-asumsi, sehingga dengan data yang ada seseorang dapat menarik kesimpulan deduktif terhadap rekomendasi sebagai konsekuensi dari data yang ada
- iii. mempertentangkan asumsi, para analisis membandingkan dan mengevaluasi serangkaian rekomendasi dan asumsi-asumsi yang mendasarinya. Asumsi-asumsi yang dibandingkan dengan asumsi-asumsi tandingan yang berlawanan. Jika asumsi tandingan tidak masuk akal maka tidak perlu dilakukan pertimbangan lebih lanjut, sebaliknya jika masuk akal akan diuji untuk menentukan kemungkinan untuk dipakai sebagai landasan bagi konseptualisasi baru terhadap masalah dan solusinya secara menyeluruh.

- iv. mengelompokkan asumsi, ketika tahap mengumpulkan asumsi telah selesai, kemudian usulan solusi yang berbeda-beda yang dihasilkan dalam fase sebelumnya dikelompokkan. Tujuan akhirnya untuk menciptakan dasar asumsi yang diterima oleh sebanyak mungkin pelaku kebijakan.
- v. sintesis asumsi, fase terakhir ini adalah penciptaan solusi gabungan atau sintesis terhadap masalah. Satuan hubungan asumsi yang diterima dapat menjadi basis untuk menciptakan konseptualisasi baru dari masalah.
- h. Pemetaan argumentasi, berdasarkan Tabel Metode Perumusan Masalah yang dikemukakan William N. Dunn metode pemetaan argumentasi bertujuan melakukan penilaian asumsi melalui prosedur penyusunan tingkat dan penggambaran plausibilitas dan urgensi masalah.

## BAB III

# TATA KELOLA MULTIKULTURALISME

### A. Multikulturalisme sebagai Keniscayaan

Masyarakat multikultural merupakan masyarakat yang komponennya menggambarkan lebih dari satu unsur, kultur-sub kultur, budaya, keyakinan, sistem keyakinan, agama, suku bangsa dan lain-lain. Jadi, masyarakat multikultural merupakan masyarakat yang komponennya menggambarkan salah satu, dua, atau ketiga klasifikasi tersebut. Benang merah dari paparan tersebut, multikulturalisme merupakan konsep pengelolaan masyarakat yang secara kultural majemuk, sekecil apapun tingkat dan lingkup kemajemukan budaya tersebut, dengan memberikan pengakuan (rekognisi) atas eksistensi komponen kemajemukan tersebut. Pengakuan tersebut dalam fenomena kontemporer merupakan tuntutan (*demand*). Oleh karenanya ketiadaan pengakuan, yang berarti nihilnya pemenuhan tuntutan, sangat potensial terhadap munculnya berbagai konflik.

Masyarakat multikultural mengandung potensi konflik. Konflik adalah situasi dan kondisi dalam kehidupan masyarakat yang kacau atau tidak adanya ketertiban, saling klaim antar pihak, berselisih, bersengketa, bermusuhan dari yang sifatnya ancaman kekerasan sampai kepada kekerasan fisik. Konflik terjadi karena masyarakat tersebut mengandung berbagai kepentingan, lembaga, organisasi, dan kelas sosial yang tidak selalu memiliki kepentingan yang sama dan serasi. Konflik bisa disebabkan oleh banyak hal.

Konflik dapat disebabkan oleh polarisasi sosial yang memisahkan masyarakat berdasarkan penggolongan-penggolongan tertentu dapat menyebabkan timbulnya ketidakpercayaan dan permusuhan antar kelompok yang berbeda dalam masyarakat yang dapat berujung pada munaculnya kekerasan yang terbuka.

Konflik yang terjadi mutlak harus diselesaikan agar tidak merugikan dan melahirkan perpecahan (disintegrasi) dalam masyarakat bahkan potensi konflik yang ada harus dikelola sehingga tidak menjadi konflik yang terbuka. Untuk bisa memberikan sebuah penyelesaian (solusi) dari suatu konflik, maka perlu diketahui lebih dahulu apa yang menjadi penyebabnya. Penyebab-penyebab konflik sebagaimana dikemukakan di atas adalah penyebab konflik secara umum.

Keniscayaan potensi konflik sebagai kelindan dari multikulturalisme perlu untuk dikelola dengan memadai. Pengelolaan ini mengejawantah dalam konsep dasar yang mengkerangkai bagaimana respons atas konflik atau potensi konflik, antara lain: manajemen konflik, transformasi konflik, dan resolusi konflik. Transformasi konflik merupakan konsep yang menekankan pada proses penumpukan dan penghalusan konflik pada level dimana para pihak yang berkonflik dapat hidup bersama dan masing-masing dapat mengendalikan diri mereka, melalui saling empati kepada pihak lain, diperlukan kreativitas untuk mencari hal baru, dan dengan cara berperilaku, berbicara, dan—bahkan lebih jauh lagi—berpikir tanpa kekerasan. Dalam kerangka tersebut dituntut prinsip "cintailah musuhmu", atau—dalam level yang sangat awal—prinsip "kurangi kebencian pada musuhmu" sudah cukup membantu mengatasi persoalan. Tujuan utama transformasi konflik adalah restorasi ketertiban, harmoni, dan hubungan dalam komunitas.



Sedangkan konsep resolusi konflik merupakan konsep yang lebih luas dan umum. Konsep ini merefleksikan bahwa konflik harus diatasi, mulai dari konflik intrapersonal, interpersonal, intragrup, intergrup, intranational, hingga international. Resolusi konflik meniscayakan pengetahuan akan akar masalah, kesadaran akan masalah dan potensi penyelesaiannya, hingga ketrampilan (*skills*) untuk mengatasi masalah. Tujuan akhir dari resolusi konflik adalah perdamaian—antara perorangan, kelompok, atau bahkan bangsa yang terlibat.

Dalam kontinum kajian konflik dan perdamaian, terdapat dua konsep yang menunjukkan kedekatan dan kejauhan intervensi serta tujuan resolusi yang ingin dicapai. Untuk pendekatan-pendekatan keamanan dan intervensi jangka pendek dikenal konsep *peacekeeping*. Sementara pendekatan-pendekatan perubahan kelembagaan dan prevensi dalam jarak yang lebih panjang disebut *peacebuilding*. *Peacekeeping* merupakan upaya untuk membuat keamanan melalui kontrol berupa pengawasan (*surveillance*), pembatasan, pengendalian, dan sanksi atas setiap tindakan kekerasan dan konfrontasional. Konsep ini dengan demikian lalu dikaitkan dengan upaya penciptaan "perdamaian negatif", yang bukan berarti perdamaian dalam konotasi yang buruk, akan tetapi lebih ditekankan pada terwujudnya syarat minimum perdamaian, berupa tidak adanya kekerasan dan kekejaman fisik. Sedangkan *peacebuilding* merupakan upaya untuk meredakan friksi antar kelompok dan masalah-masalah struktural dan kesenjangan melalui pendidikan, penyelesaian masalah, reorganisasi pola interaksi, dan aktivitas-aktivitas komunitas lainnya. Pendekatan ini dimaksudkan untuk membangun ulang ikatan sosial dan mengubah ekspektasi masyarakat yang satu

dengan yang lain dari kekerasan menuju hubungan yang damai.

Sedangkan manajemen konflik merupakan konsep yang lebih spesifik dan prosedural dalam merespon suatu konflik. Manajemen konflik memiliki tiga dimensi: 1) sekumpulan prosedur informal-formal, otonom-interventionis, untuk menghadapi dan mengatasi konflik, 2) Pemahaman dan keterampilan untuk mengenali dan memahami konflik, sehingga dapat membayangkan dan mengkomunikasikan alternatif resolusi, 3) Konteks hubungan individual dan komunitas dimana konflik muncul, dirasakan dan dipahami oleh masyarakat sebagai masalah, berkembang dan meluas (eskalasi), lalu berkurang dan menurun (de-eskalasi).

## **B. Tantangan Kebinekaan Indonesia**

Potensi konflik di dalam sebuah masyarakat niscaya abadi. Potensi ini bersemayam dan menunggu untuk dibangkitkan atau tetap tersimpan. Keruntuhan Orde Baru tampak menjadi pemicu bagi benih-benih konflik untuk bangkit menjadi konflik mematikan dalam sejarah Indonesia pasca 1998. Dalam kurun waktu antara 1998 dan 2002, setidaknya 15.967 jiwa terbunuh akibat konflik.

Konflik bisa disebabkan oleh suatu sebab tunggal akan tetapi jauh lebih sering konflik terjadi karena berbagai sebab sekaligus. Kadangkala antara sebab yang satu dengan yang lain tumpang tindih sehingga sulit menentukan mana sebenarnya penyebab konflik yang utama. Faturochman menyebutkan setidaknya ada enam hal yang biasa melatarbelakangi terjadinya konflik : 1) Kepentingan yang sama diantara beberapa pihak, 2) Perebutan sumber daya, 3) Sumber daya yang terbatas, 4) Kategori atau identitas yang

berbeda, 5) Prasangka atau diskriminasi, 6) Ketidakjelasan aturan (ketidakadilan).

Sementara itu, Sukamdi menyebutkan bahwa konflik antar etnik di Indonesia terdiri dari tiga sebab utama: (1) konflik muncul karena ada benturan budaya, (2) karena masalah ekonomi-politik, (3) karena kesenjangan ekonomi sehingga timbul kesenjangan sosial. Menurutnya konflik terbuka dengan kelompok etnis lain hanyalah merupakan bentuk perlawanan terhadap struktur ekonomi-politik yang menghimpit mereka.

### **C. Tata Kelola Multikulturalisme Indonesia**

Eksistensi Indonesia sebagai suatu negara yang multikultural dengan potensi konflik yang sedemikian besar dan ancaman terjadinya eskalasi menuju ke arah pertentangan dengan intensitas yang lebih tinggi hingga terjadi kekerasan mengharuskan adanya saluran yang tepat. Dengan demikian kondisi multikultural tersebut bisa terjembatani sehingga konflik yang terjadi bersifat sinergi bukan sebaliknya bersifat korosi dan menghancurkan tatanan kehidupan bernegara.

Salah satu gagasan penting yang menjadi pembahasan selama beberapa dekade terakhir adalah pentingnya penerapan politik pengakuan (*politics of recognition*) yang dapat menjadi landasan bagi terciptanya kebersamaan di antara berbagai budaya, kelompok etnis, ras dan agama. Sebab tak adanya pengakuan adalah penindasan (*misrecognition is an oppression*).

Politik rekognisi merupakan konsep yang relatif baru, yang bermakna pengakuan dari pihak yang mayoritas kepada pihak yang minoritas dan tidak teruntungkan sedang pengakuan tersebut dituangkan di dalam sebuah aturan

hukum yang mengikat. Pada mulanya, politik rekognisi berangkat dari kajian filsafat, budaya dan politik identitas. Kajian filsafat yang menonjol mengenai rekognisi diajukan oleh Hegel (1977).

Pemikiran, kesadaran, dan spirit—menurut Hegel—merupakan kekuatan aktif, berada dalam sebuah perjuangan berkelanjutan. Di dalamnya, spirit bertarung melawan alienasi dirinya sendiri di dunia luar, mengakui eksistensi yang diobjektivasi sebagai bagian dari perwujudannya sendiri, dan berbalik kepada dirinya melalui negasi, serta mengakui sejarah sebagai proses realisasi gradual dirinya. Rakyat, institusi, ilmu, karya, moral, agama, dan semua aspek eksistensi sosial mengikuti trajektori yang sama. Perjuangan antar prinsip-prinsip, kekuatan-kekuatan, dan bentuk-bentuk kehidupan mendorong sejarah bergerak maju.

Dalam pandangan Hegel, secara normatif, kebebasan dan kehidupan etik berkaitan secara intrinsik. Dalam kehidupan etik, moralitas dan legalitas pada akhirnya kembali ke dalam kesatuan organis dan menjadi manifestasi institusional negara. Seluruh sistem normatif, dengan proteksi legal yang terbatas, merupakan stasiun yang parsial di atas jalan menuju rekonsiliasi puncak kehidupan etik. Subjektivitas juga terbentuk melalui perjuangan antar masyarakat demi pengakuan timbal balik (*reciprocal recognition*) atas identitas mereka.

Hegel tak memandang kesadaran sebagai entitas soliter melawan dunia luar. Sebaliknya, diri terbentuk secara reflektif dan sangat tergantung terhadap tindakan orang lain. Perjuangan untuk rekognisi merupakan hubungan etik yang pokok dan bentuk utama intersubjektivitas praktis.

Filsafat Hegel (1977) mengenai rekognisi dilanjutkan oleh Axel Honneth dalam *Struggle for Recognition*, yang menegaskan urgensi pengakuan atas entitas sosio-kultural yang beragam. Fokus utama kajian Honneth tak semata di aras moralitas bahwa rekognisi merupakan prinsip etik dan normatif yang menempatkan eksistensi sebagai keniscayaan dalam intersubjektivitas, relasi antara diri dan dunia luar, antara subjek dengan objek, atau antara subjek dengan subjek yang lain. Honneth menekankan perjuangan untuk rekognisi, yang menempatkan tindakan legal sebagai sisi tak terpisahkan dari prinsip moral untuk memastikan bahwa seluruh eksistensi menjadi kesatuan organis yang mendapatkan proteksi, terutama institusi negara.

Tindakan negara untuk memberikan proteksi legal atas prinsip-prinsip rekognisi inilah yang dibaca Charles Taylor sebagai politik rekognisi. Taylor (1994) kemudian menegaskan konsep mengenai politik rekognisi dalam kajian multikulturalisme dan politik identitas.

Menurut Taylor, rekognisi (pengakuan) dalam dinamika gerakan politik memiliki paling tidak empat dimensi sebagai berikut: *Pertama*, sebagai tuntutan yang dikedepankan dalam pelbagai aktivitas politik masa kini. Tidak adanya pengakuan atau adanya pengakuan hanya oleh salah satu pihak dapat memicu terjadinya bahaya yang mungkin berbentuk penekanan (represi), pemenjaraan seseorang secara salah dan penyimpangan atau pengurangan harkat seseorang sebagai manusia.

*Kedua*, sebagai tuntutan atau kebutuhan beberapa kelompok minoritas. Tesis yang mengemuka adalah bahwa identitas seseorang sebagian dibentuk oleh ada atau tidaknya pengakuan, seringkali oleh kesalahan pengakuan tentang orang lain dan juga seseorang atau sekelompok orang dapat

menderita kerusakan yang nyata, penyimpangan yang nyata atau gambaran yang hina tentang diri mereka sendiri.

*Ketiga*, sebagai tuntutan atau kebutuhan pada beberapa bentuk gerakan feminisme. Bagi kaum feminis, perempuan dalam masyarakat dipaksa secara hegemonik untuk mengadopsi suatu gambaran yang merendahkan diri mereka sendiri. Mereka dicekoki dengan gambaran inferioritas mereka sendiri. Hal inilah yang kemudian mendorong mereka untuk melakukan gerakan agar mendapatkan pengakuan yang sederajat (*gender equality*) dengan kaum laki-laki di tengah-tengah komunitasnya.

*Keempat*, sebagai tuntutan dalam apa yang sekarang dikenal sebagai politik multikulturalisme. Keberagaman budaya, suku, dan aspek-aspek partikularis masyarakat lainnya merupakan realitas natural atau kenyataan alamiah. Namun, sejarah peradaban umat manusia menunjukkan betapa keberagaman yang bersendikan perbedaan tersebut justru melahirkan permusuhan berkepanjangan.

Dalam perspektif ini, pengakuan bukan hanya sekedar suatu kebaikan yang berlaku dalam diri. Pengakuan adalah kebutuhan vital manusia. Kesalahan pengakuan dapat menunjukkan adanya kesenjangan yang dapat menyebabkan luka yang mendalam, membebani korbannya dengan tekanan batin yang menyiksa. Menambahkan gagasan Taylor, Andersson menyatakan bahwa hakikat politik rekognisi pada perkembangannya adalah politik rekognisi etnik. Seluruh budaya dalam sebuah masyarakat multikultur hendaknya dihargai dengan kesetaraan peran dalam rangka mengantisipasi perkembangan citra diri negatif kaum etnis minoritas.

Dalam kajian terdahulu politik rekognisi diidealkan menjadi *living value* (nilai yang hidup) dalam kenyataan

alamiah multikulturalisme. Pengakuan diletakkan sebagai bagian dari dinamika politik internal masyarakat. Dengan fondasi tersebut, dibayangkan akan terjadi keseimbangan dalam relasi berbagai elemen multikultural yang berbeda.

Buku ini berusaha mengadaptasi konsep politik rekognisi dalam kebijakan publik. Teori Charles Taylor mengenai politik rekognisi yang secara filosofis diinspirasi oleh Hegel dan Honneth, akan digunakan oleh Peneliti untuk mengkaji penyelesaian konflik etnik di Kotim dengan pendekatan *public policy*.

Politik rekognisi diniscayakan sebagai sendi utama dalam kebijakan publik untuk menyelesaikan konflik etnik yang terjadi, terutama pada tahap formulasi kebijakan dan implementasi kebijakan atau bahkan untuk kasus penyelesaian konflik Sampit proses rekognisi dapat pula telah berjalan pada tahap sebelum tahap formulasi kebijakan dilaksanakan. Dengan demikian waktu untuk para pihak yang berkonflik bermusyawarah, bernegosiasi, dan membuat kesepakatan-kesepakatan merupakan kebutuhan.

Pemahaman akan waktu terjadinya proses rekognisi ini telah berjalan menjadi sangat penting untuk diketahui agar tidak terjadi kesalahan dalam melaksanakan analisis serta pengambilan kesimpulan. Ketika ternyata proses rekognisi telah berjalan pada tahap dialog antar pihak yang berkonflik sehingga telah dicapai konsensus-konsensus perdamaian maka pada hakekatnya proses perdamaian telah selesai. Perdamaian tercapai ketika antar pihak yang berkonflik telah sampai kepada konsensus untuk berdamai. Berarti kebijakan publik atau Perda yang dibuat atau dihasilkan sekedar menjadi stempel /pengesahan atau formalisasi dari konsensus yang telah dicapai oleh antar pihak masyarakat yang berkonflik tersebut.

Konstruksi politik rekognisi dalam kebijakan penanggulangan konflik etnik dihipotesiskan dapat menjadi *tool* untuk penyelesaian konflik dan preservasi suasana damai (*peace building*). Politik rekognisi tidak semata-mata diharapkan menjadi *living values* dan norma moral, akan tetapi secara legal formal diejawantahkan dalam instrumen hukum sebagai produk politik yang memiliki sifat determinan, mengikat, dan memaksa.



## **BAB IV**

# **PENDIDIKAN MULTIKULTURALISME DAN TANTANGANNYA**

### **A. Dinamika Pendidikan Multikulturalisme**

Pendidikan pada dasarnya merupakan alat pemersatu bangsa, penyamaan kesempatan, dan pengembangan potensi diri secara maksimal. Oleh karena itu, dengan pendidikan diharapkan semua perbedaan dapat diminimalisir, semua warga negara mendapatkan kesempatan yang sama, baik itu kaya, miskin, laki-laki dan perempuan, dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya secara optimal. Namun demikian, kenyataannya, pendidikan ternyata masih belum bisa mewujudkan hal itu. Bagaimanapun pendidikan yang sebenarnya adalah pendidikan yang mampu mengenal, mengakomodir segala kemungkinan, memahami heterogenitas, menghargai perbedaan, baik suku, bangsa terlebih agama.

Untuk itulah pendidikan multikulturalisme layak untuk diperkenalkan. Pendidikan multikulturalisme mengemuka sebagai solusi ketidakpuasan masyarakat terhadap sistem pendidikan yang telah dijalankan. Pendidikan multikulturalisme memiliki landasan filosofis yakni mengakomodir kesenjangan dalam pendidikan, budaya, dan agama. Ketiga hal tersebut memiliki orientasi yang saling berkaitan yang bermuara pada kemanusiaan. Hal ini selaras dengan salah satu orientasi pendidikan multikultural yakni kemanusiaan.

Istilah pendidikan multikultur dapat digunakan baik pada tataran deskriptif maupun normatif yang menggambarkan isu-isu yang berkaitan dengan masyarakat multikultural. Lebih jauh juga mencakup pengertian tentang pertimbangan terhadap kebijakan-kebijakan dan strategi-strategi pendidikan dalam masyarakat multikultural. Dalam konteks deskriptif, pendidikan multikultural seyogyanya berisi tentang tema-tema tentang toleransi, perbedaan *ethno-cultural* dan agama, bahaya diskriminasi, penyelesaian konflik dan mediasi, hak asasi manusia, pluralitas, kemanusiaan universal, dan subjek-subjek lain yang relevan.

Pendidikan dalam wawasan multikultural dalam rumusan James A. Bank adalah konsep, ide atau falsafah sebagai suatu rangkaian kepercayaan dan penjelasan yang mengakui dan menilai pentingnya keragaman budaya dan etnis di dalam membentuk gaya hidup, pengalaman sosial, identitas pribadi, kesempatan-kesempatan pendidikan dari individu, kelompok maupun negara.

Menurut Sonia Nieto pendidikan multikultural merupakan proses pendidikan yang komprehensif dan mendasar bagi semua peserta didik. Jenis pendidikan ini menentang segala bentuk rasisme dan segala bentuk diskriminasi di sekolah dan masyarakat dengan menerima dan mengafirmasi pluralitas yang tereflekasikan di antara peserta didik, komunitas mereka dan guru-guru. Menurut Sonia pendidikan multikultur harus melekat dalam kurikulum dan strategi pengajaran, termasuk dalam setiap interaksi yang dilakukan di antara para guru, murid dan keluarga serta keseluruhan suasana belajar mengajar. Jenis pendidikan ini merupakan paedagogi kritis, reflektif dan menjadi basis aksi perubahan dalam masyarakat, maka pendidikan multikultural mengembangkan prinsip-prinsip

demokrasi dalam berkeadilan sosial. Sementara itu Bikhu Parekh mendefinisikan pendidikan multikultur sebagai “*an education in freedom, both in the sense of freedom from ethnocentric prejudices and biases, and freedom to explore and learn from other cultures and perspectives*”.

Dari uraian di atas ada hal penting dalam diskursus multikultural dalam pendidikan yaitu identitas, keterbukaan, diversitas budaya dan transformasi sosial. Identitas sebagai salah satu elemen dalam pendidikan mengandaikan bahwa peserta didik dan guru merupakan satu individu atau kelompok yang merepresentasikan satu kultur tertentu dalam masyarakat.

Mengenai fokus pendidikan multikultural, H.A.R. Tilaar mengungkapkan bahwa dalam program pendidikan multikultural, fokus tidak lagi diarahkan semata-mata kepada kelompok sosial, agama, dan kultural *mainstream*. Pendidikan multikultural sebenarnya merupakan sikap peduli dan mau mengerti ataupun pengakuan terhadap orang lain yang berbeda. Dalam konteks itu, pendidikan multikultural melihat masyarakat secara lebih luas. Berdasarkan pandangan dasar bahwa sikap *indeference* dan *non-recognition* tidak hanya berakar dari ketimpangan struktur rasial, tetapi paradigma pendidikan multikultural mencakup subjek- subjek mengenai ketidakadilan, kemiskinan, penindasan, dan keterbelakangan kelompok-kelompok minoritas dalam berbagai bidang, baik itu sosial, ekonomi, budaya, pendidikan, dan sebagainya.

Ide tentang konsep pendidikan multikultural menjadi komitmen global sebagaimana direkomendasikan UNESCO pada bulan Oktober 1994 di Jenewa. Ada sekurangnya empat pesan dalam rekomendasi tersebut, yaitu:

1. Pendidikan hendaknya mengembangkan kemampuan untuk mengakui dan menerima nilai-nilai yang ada dalam kebinekaan pribadi, jenis kelamin, masyarakat dan budaya serta mengembangkan kemampuan untuk berkomunikasi, berbagi dan bekerjasama dengan yang lain.
2. Pendidikan hendaknya meneguhkan jati diri dan mendorong konvergensi gagasan dan penyelesaian-penyelesaian yang memperkokoh perdamaian persaudaraan dan solidaritas antara pribadi dan masyarakat.
3. Pendidikan hendaknya meningkatkan kemampuan menyelesaikan konflik secara damai tanpa kekerasan.
4. Pendidikan hendaknya meningkatkan pengembangan kedamaian dalam pikiran peserta didik, sehingga mereka mampu membangun kualitas toleransi, kesabaran, kemauan untuk berbagi dan memelihara secara lebih kokoh.

Menurut Iis Arifudin, ada beberapa pendekatan dalam proses pendidikan multikultural, antara lain sebagai berikut: *Pertama*, perubahan paradigm dalam memandang pendidikan (*education*) dengan persekolahan (*schooling*) atau pendidikan multikultural dengan program-program sekolah formal. *Kedua*, menghindari pandangan yang menyamakan kebudayaan dengan kelompok etnik. Dalam konteks pendidikan multikultural, pendekatan ini diharapkan dapat mengilhami para penyusun program pendidikan multikultural untuk menghilangkan kecenderungan memandang peserta didik secara *stereotype* menurut identitas etnik mereka, dan akan meningkatkan eksplorasi

pemahaman yang lebih besar mengenai kesamaan dan perbedaan di kalangan peserta didik dari berbagai suku. *Ketiga*, karena pengembangan kompetensi dalam kebudayaan baru biasanya membutuhkan interaksi inisiatif dengan orang-orang yang sudah memiliki kompetensi, bahkan dapat dilihat lebih jelas bahwa upaya-upaya untuk mendukung sekolah-sekolah yang terpisah secara etnik adalah antithesis terhadap tujuan pendidikan multikultural. Mempertahankan dan memperluas solidaritas kelompok adalah menghambat sosialisasi ke dalam kebudayaan baru.

*Keempat*, pendidikan multikultural meningkatkan kompetensi dalam beberapa kebudayaan. *Kelima*, pendidikan multikultural baik dalam sekolah maupun luar sekolah meningkatkan kesadaran dalam beberapa kebudayaan. Pendekatan ini meningkatkan kesadaran akan multikulturalisme sebagai pengalaman moral manusia. Kesadaran ini mengandung makna bahwa pendidikan multikultural berpotensi untuk menghindari dikotomi dan mengembangkan apresiasi yang lebih baik melalui kompetensi kebudayaan yang ada pada diri peserta didik.

Pendidikan multikultural didasari pada asumsi bahwa setiap manusia memiliki identitas, sejarah, lingkungan, dan pengalaman hidup yang berbedabeda. Perbedaan adalah identitas terpenting dan paling otentik tiap manusia dari kesamaannya. Kegiatan belajar mengajar bukan ditujukan agar peserta didik menguasai sebanyak mungkin materi ilmu, tetapi bagaimana tiap peserta didik mengalami sendiri proses berilmu dan hidup di ruang kelas dan lingkungan pendidikan.

Dalam hal ini guru atau tenaga pendidik, tidak lagi ditempatkan sebagai aktor tunggal dan terpenting dalam

proses pembelajaran yang serba tahu dan serba bisa. Tapi pendidik yang efisien dan produktif adalah yang bisa menciptakan situasi sehingga peserta didik belajar dengan cara yang unik. Kelas diciptakan bukan untuk mengubur identitas personal, tetapi memperbesar peluang tiap peserta didik mengaktualkan kedirian masing-masing.

Menurut Tatang M. Amirin, dalam konteks Indonesia, implementasi pendidikan multikultural dapat dilihat pada:

- a. Falsafah pendidikan, yaitu pandangan bahwa kekayaan keragaman budaya Indonesia hendaknya dimanfaatkan sebaikbaiknya untuk mengembangkan dan meningkatkan system pendidikan dan kegiatan belajar mengajar guna mencapai masyarakat Indonesia yang adil dan makmur bahagia dunia akhirat.
- b. Sebagai pendekatan pendidikan, yaitu penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan yang kontekstual, yang memperhatikan keragaman budaya Indonesia. Nilai budaya diyakini mempengaruhi pandangan, keyakinan, dan perilaku individu (pendidik dan peserta didik) dan akan terbawa ke dalam situasi pendidikan di sekolah dan pergaulan informal antar individu, serta mempengaruhi pula struktur pendidikan di sekolah (kurikulum, dan faktor lainnya).
- c. Bidang kajian dan bidang studi; yaitu disiplin ilmu yang menelaah dan mengkaji aspek-aspek kebudayaan, terutama nilai-nilai budaya dan perwujudannya, dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan. Hasil telaah dan kajian ini akan dapat menjadi bidang studi yang diajarkan

secara operasional dan kontekstual kepada para peserta didik yang akan berhadapan dengan keragaman budaya.

## **B. Pendidikan Multikulturalisme di Tingkat Dasar dan Menengah**

Penyelenggaraan pendidikan multikultural di dunia pendidikan diyakini dapat menjadi solusi nyata bagi konflik dan intoleransi yang terjadi di masyarakat. Dengan kata lain, pendidikan multikultural dapat menjadi sarana alternatif pemecahan konflik sosial budaya. Spektrum kultural masyarakat Indonesia yang amat beragam menjadi tantangan bagi dunia pendidikan guna mengolah perbedaan tersebut menjadi suatu aset, bukan sumber perpecahan. Saat ini, pendidikan multikultural mempunyai dua tanggung jawab besar, yaitu: menyiapkan bangsa Indonesia untuk menghadapi arus budaya luar di era globalisasi dan menyatukan bangsa yang terdiri dari berbagai macam budaya.

Pendidikan kebangsaan dan ideologi telah banyak diberikan di perguruan tinggi, namun pendidikan multikultural belum diberikan dengan proporsi yang benar. Maka sekolah sebagai institusi pendidikan dapat mengembangkan pendidikan multikultural dengan model masing-masing sesuai asas otonomi pendidikan. Pendidikan multikultural tersebut dapat ditekankan melalui mata pelajaran agama, kebangsaan, dan moral, yang pada dasarnya model pembelajaran seperti itu memang sudah ada.

Namun demikian, hal itu masih sekadar teori sedangkan dalam praktiknya belum terlaksana dengan baik. Hal itu terlihat dengan munculnya konflik yang terjadi pada

kehidupan berbangsa saat ini dimana pemahaman toleransi masih amat kurang. Hingga detik ini, jumlah siswa dan mahasiswa yang memahami makna budaya bangsa masih sangat sedikit. Padahal dalam konteks pendidikan multikultural, memahami makna dibalik realitas budaya suku bangsa merupakan hal yang esensial. Maka, penyelenggaraan pendidikan multikultural dapat dikatakan berhasil bila berbentuk pada diri siswa sikap hidup saling toleransi, tenggang rasa, tepo seliro, tidak bermusuhan dan tidak berkonflik yang disebabkan oleh perbedaan budaya, suku, bahasa, adat istiadat atau lainnya.

Menurut Stephen Hill, Direktur PBB bidang pendidikan, ilmu pengetahuan dan budaya, UNESCO untuk kawasan Indonesia, pendidikan multikultural dapat dikatakan berhasil bila prosesnya melibatkan semua elemen masyarakat. Secara konkret, pendidikan ini tidak hanya melibatkan guru atau pemerintah saja, namun seluruh elemen masyarakat. Hal itu dikarenakan adanya multi dimensi aspek kehidupan yang tercakup dalam pendidikan multikultural. Perubahan yang diharapkan dalam konteks pendidikan multikultural ini tidak terletak pada angka (kognitif) sebagaimana lazimnya penilaian keberhasilan pendidikan di negeri ini. Namun, lebih dari itu yakni terciptanya kondisi yang nyaman, damai, toleran dalam kehidupan masyarakat, dan tidak selalu muncul konflik yang disebabkan oleh perbedaan budaya dan SARA. Bahkan, ada yang mengatakan bahwa hasil pendidikan multikultural tidak bisa diukur oleh waktu tertentu. Maka, di Indonesia sudah saatnya memberikan perhatian besar terhadap pendidikan multikultural. Secara tidak langsung, hal itu dapat memberikan solusi bagi permasalahan sosial dimasa mendatang.



Pendidikan multikultural juga signifikan dalam membina siswa agar tidak tercerabut dari akar budaya yang ia miliki sebelumnya, takala ia berhadapan dengan realitas sosial budaya di era globalisasi. Dalam era globalisasi saat ini, pertemuan antar budaya menjadi ancaman bagi anak didik. Untuk mensikapi realitas global tersebut, siswa hendaknya dibekali pengetahuan dan agama yang cukup, sehingga mereka memiliki kompetensi yang luas akan pengetahuan global, termasuk aspek kebudayaan.

Menurut Fuad Hasan, saat ini diperlukan langkah antisipatif terhadap tantangan globalisasi, utamanya dalam aspek kebudayaan. Sebab anak didik masa kini jauh berbeda dengan anak-anak seusianya di masa lalu. Beragam budaya yang ada di negeri ini, berbaur dengan budaya asing yang kian mudah diperoleh melalui beragam media, seperti televisi, maupun internet. Kemajuan IPTEK memperpendek jarak dan memudahkan persentuhan antar-budaya. Dan dimungkinkan terjadinya gesekan yang saling mempengaruhi budaya. Maka tantangan dalam dunia pendidikan kita saat ini sangat berat dan kompleks. Upaya antisipasi perlu dipikirkan secara serius, jika tidak maka generasi bangsa ini bisa kehilangan arah, tercerabut dari akar budayanya sendiri.

Dalam melakukan pengembangan kurikulum sebagai titik tolak dalam proses belajar mengajar, atau guna memberikan sejumlah materi yang harus dikuasai oleh siswa dengan ukuran tertentu, pendidikan multikultural sebagai landasan pengembangan kurikulum menjadi sangat penting. Pengembangan kurikulum masa depan yang berdasarkan pendekatan multikultural dapat dilakukan berdasarkan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengubah filosofi kurikulum saat ini pada yang lebih sesuai dengan tujuan, misi, dan fungsi setiap jenjang pendidikan.
- b. Teori kurikulum (*curriculum content*), harus berubah dari teori yang mengartikan konten sebagai aspek substantif ke pengertian yang mencakup nilai moral, proses dan keterampilan (skill) yang harus dimiliki generasi muda.
- c. Teori belajar yang digunakan dalam kurikulum masa depan yang memperhatikan keragaman sosial, budaya, ekonomi, dan politik.
- d. Proses belajar yang dikembangkan untuk siswa harus berdasarkan proses yang memiliki daya saing secara kompetitif dengan kelompok lain.
- e. Evaluasi yang digunakan meliputi keseluruhan aspek kemampuan dan kepribadian peserta didik, sesuai dengan konten yang dikembangkan.

Alat evaluasi yang digunakan harus beragam sesuai dengan sifat, tujuan dan informasi yang ingin dikumpulkan. Indonesia sebagai negara majemuk perlu menyusun konsep pendidikan multikultural sehingga menjadi pegangan untuk memperkuat identitas nasional. Dengan cara ini diharapkan generasi muda setidaknya memiliki identitas nasional, sehingga mereka tidak mudah dipecah belah, dan mampu bersaing di era globalisasi. Negara yang berpenduduk majemuk seperti Amerika, Australia, dan Kanada telah mengajarkan pendidikan multibudaya pada sekolah formal dan informal. Menurut Hamid Hasan, masyarakat Indonesia memiliki keragaman social budaya, aspirasi politik dan kemampuan politik.

Keragaman ini pula menjadi pengaruh terhadap kemampuan guru dalam melaksanakan kurikulum, kemampuan sekolah dalam menyediakan pengalaman belajar, kemampuan siswa dalam proses belajar, serta mengolah informasi menjadi sesuatu yang dapat di terjemahkan sebagai hasil belajar. Para ahli pendidikan menyadari bahwa kebudayaan adalah salah satu landasan pengembangan kurikulum.

Ki Hajar Dewantara menyatakan kebudayaan merupakan faktor penting sebagai akar pendidikan suatu bangsa. Kebudayaan merupakan totalitas cara manusia hidup dan mengembangkan pola kehidupannya sehingga ia tidak saja menjadi landasan dimana kurikulum dikembangkan tetapi menjadi target hasil pengembangan kurikulum. Dalam buku yang berjudul *Sociocutural Origins of Achievement*, Maehr (1974) mengatakan keterkaitan kebudayaan dan bahasa, kebudayaan dan persepsi, kebudayaan dan kognisi, kebudayaan dan keinginan berprestasi, serta kebudayaan motivasi berprestasi, merupakan factor-faktor yang berpengaruh terhadap siswa. Studi Webb (1990) dan Burnet (1994) menunjukkan bahwa proses belajar siswa yang dikembangkan melalui budaya menunjukkan hasil yang lebih baik.

Oleh karena itu, sudah saatnya untuk memperhitungkan faktor kebudayaan sebagai landasan dalam menentukan komponen tujuan, materi, proses, evaluasi, kegiatan belajar siswa. Konsekuensinya pengembang kurikulum ditingkat pusat, daerah, dan sekolah harus memanfaatkan kebudayaan sebagai landasan kurikulum secara lebih sistematis.

Cara mengintegrasikannya pendidikan multikultural dapat melalui mata pelajaran PKN dan PAI, kita harus

mengetahui ruang lingkup mata pelajaran tersebut. Jika ruang lingkup PKN adalah persatuan dan kesatuan bangsa meliputi hidup rukun, cinta lingkungan, sumpah pemuda, keutuhan NKRI, partisipasi dalam pembelaan negara, sikap positif, keterbukaan, dan jaminan keadilan. Adapun PAI diharapkan menghasilkan manusia yang jujur, adil, berbudi pekerti, etis, saling menghargai, disiplin, harmonis dan produktif baik personal maupun sosial. Metode yang ditempuh dalam upaya mengintegrasikan PAI dan PKN, yaitu: *pertama*, mempertimbangkan PAI dan PKN mempunyai titik kesamaan dalam tujuan dan ruang lingkup pembelajaran. Keduanya bekerja di wilayah pendidikan karakter yang mempunyai dimensi individual dan sosial. Maksudnya, sisi privat menekankan pada spiritualitas dan religiositas anak didik. Guru memberikan dasar-dasar keimanan yang diimplementasikan dalam ritual yang bernuansa kesalehan personal. Sedangkan sisi public menekankan pada ajaran agama yang dapat membentuk kesalehan sosial. Sedang PKN, mencetak generasi yang berperadaban dan demokratis dengan tetap mengedepankan prinsip toleransi.

*Kedua*, mengembangkan mata pelajaran PAI dan PKN sebagai kecakapan hidup (*life skill*). Konsep kecakapan ada dua, yakni personal dan sosial. Kecakapan personal meliputi mengenal diri yaitu kesadaran penghayatan kepada Tuhan, kesadaran sebagai warga negara, serta sadar akan kelebihan dan kekurangan yang dimiliki. Sementara kecakapan sosial adalah kecakapan bekerjasama dan komunikasi sosial antar anggota masyarakat. Dengan begitu, anak didik akan menjadi manusia bertakwa yang membawa pada kesalehan individual dan sosial.

## **BAB V**

# **PRAKTIK PENYELESAIAN KONFLIK MULTIKULTURAL**

### **A. Kearifan Lokal di Indonesia**

Globalisasi secara nyata telah menggeser nilai-nilai budaya lokal asli Indonesia. Nilai budaya asing yang berkembang begitu pesat di dalam kehidupan masyarakat sehingga berdampak luas pada keseimbangan lingkungan. Sebagian dari kehidupan masyarakat masih kokoh mempertahankan tradisi, berbeda dengan masyarakat yang mengalami pergeseran nilai-nilai. Realita pergeseran nilai-nilai budaya, mengakibatkan nilai-nilai budaya lokal terlupakan.

Pada hakikatnya budaya memiliki nilai-nilai yang senantiasa diwariskan, ditafsirkan dan dilaksanakan seiring dengan proses perubahan sosial kemasyarakatan. Pelaksanaan nilai-nilai budaya merupakan manifestasi dan legitimasi masyarakat terhadap budaya. Eksistensi budaya dan keragaman nilai-nilai luhur kebudayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia merupakan sarana dalam membangun karakter warga negara. Konsepsi di atas menunjukkan bahwa betapa pentingnya budaya dan nilai-nilai yang terkandung dalam budaya sebagai pondasi dalam pembangunan karakter bangsa. Karakter bangsa dibangun bukan berdasarkan pada formula yang instan dan kondisi yang instan pula, melainkan dibangun berdasarkan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan aktivitas masyarakat yang terbina secara turun temurun. Dan itu bisa

diperoleh apabila kita memperhatikan keragaman budaya dan nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh bangsa ini.

Namun seiring perkembangan zaman, eksistensi budaya dan nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sampai saat ini belum optimal dalam upaya membangun karakter warga negara, fenomena sosial yang muncul akhir-akhir ini cukup mengkhawatirkan, fenomena kekerasan dalam menyelesaikan masalah, meningkatnya perilaku merusak diri, seperti narkoba, alkohol dan seks bebas, menurunnya perilaku sopan santun, menurunnya perilaku kejujuran, menurunnya rasa kebersamaan, dan menurunnya rasa gotong royong di antara anggota masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut Saini dalam Syam (2009, 285-286), mengungkapkan bahwa: perilaku keras, beringas, korupsi, keterpurukan ekonomi yang berkelanjutan adalah pertanda kekalahan budaya ini. Karakter bangsa dibentuk oleh kreativitas bangsa itu sendiri. Kreativitas akan berkaitan erat dengan kesejahteraan dan kekenyalan bangsa ketika menghadapi persoalan bangsa, bangsa yang kreatiflah yang akan tahan dan kukuh berdiri di tengah-tengah bangsa lain, kita perlu rujukan budaya tradisi yang bernilai dinamis dan positif yang memang terdapat pada semua subkultur bangsa ini.

Pendapat di atas memberi petunjuk bahwa negara yang mampu menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya dapat berkembang dengan baik dan mampu meminimalisir penyakit-penyakit sosial masyarakat. Di era globalisasi sekarang ini, seluruh aspek kehidupan yang serba terbuka tanpa terkendali dan kurangnya filterisasi serta kondisi masyarakat yang belum siap mengakibatkan masyarakat Indonesia terbawa arus kebebasan yang lebih berorientasi pada individualisme dan materialisme serta mulai

melupakan kegiatan-kegiatan gotong royong yang terdapat dalam budaya lokal.

Kearifan lokal atau "*local genius*" merupakan istilah yang diperkenalkan oleh Wales yaitu "*the sum of the cultural characteristics which the vast majority of a people have in common as a result of their experiences in early life*" (Ayatrohaedi, 1986:30). Tesaurus Indonesia menempatkan kata kearifan sejajar dengan kebajikan, kebijakan, kebijaksanaan dan kecendekiaan. Sedang kata arif memiliki kesetaraan makna dengan: akil, bajik, bakir, bestari, bijak, bijaksana, cendekia, cerdas, cerdik, cergas, mahardika, pandai, pintar, dan terpelajar.<sup>5</sup> Kearifan lokal dalam bahasa asing sering dikonsepsikan sebagai kebijakan setempat (*local wisdom*), pengetahuan setempat (*local knowledge*) atau kecerdasan setempat (*local genius*).

Menurut Rahyono, kearifan lokal merupakan kecerdasan manusia yang dimiliki oleh kelompok etnis tertentu yang diperoleh melalui pengalaman masyarakat. Artinya, kearifan lokal adalah hasil dari masyarakat tertentu melalui pengalaman mereka dan belum tentu dialami oleh masyarakat yang lain. Nilai-nilai tersebut akan melekat sangat kuat pada masyarakat tertentu dan nilai itu sudah melalui perjalanan waktu yang panjang, sepanjang keberadaan masyarakat tersebut.

Ilmuwan antropologi, seperti Koentjaraningrat, Spradley, Taylor, dan Suparlan, telah mengkategorisasikan kebudayaan manusia yang menjadi wadah kearifan lokal itu kepada idea, aktifitas sosial, artifak. Kebudayaan merupakan keseluruhan pengetahuan yang dimiliki oleh sekelompok manusia dan dijadikan sebagai pedoman hidup untuk menginterpretasikan lingkungannya dalam bentuk tindakan-tindakannya sehari-hari.

Abubakar mengartikan kearifan lokal sebagai kebijakan yang bersandar pada filosofi, nilai-nilai, etika, dan perilaku yang melembaga secara tradisional untuk mengelola sumber daya (alam, manusia, dan budaya) secara berkelanjutan.<sup>8</sup> Kearifan lokal sebagai kebenaran yang mentradisi atau *ajeg* merupakan perpaduan nilai-nilai suci firman Tuhan dan nilai turuntemurun yang dikembangkan komunitas tertentu. Sternberg dalam Shavinina dan Ferrari, seseorang dinilai arif apabila dapat mengakumulasi dan mengkolaborasikan antara konteks dan nilai-nilai yang melingkupinya, serta dapat mewujudkan pola hidup yang seimbang, tidak mungkin seseorang dipandang bijak apabila sikap dan tindakannya berlawanan dengan nilai yang berlaku.

Sibarani menyimpulkan bahwa kearifan lokal adalah pengetahuan asli (*indigineous knowledge*) atau kecerdasan lokal (*local genius*) suatu masyarakat yang berasal dari nilai luhur tradisi budaya untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat dalam rangka mencapai kemajuan komunitas baik dalam penciptaan kedamaian maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kearifan lokal itu mungkin berupa pengetahuan lokal, keterampilan lokal, kecerdasan lokal, sumber daya lokal, proses sosial lokal, norma-etika lokal, dan adat-istiadat lokal.

## **B. Kearifan Lokal sebagai Basis Resolusi Konflik**

Masyarakat Indonesia yang disusun oleh perbedaan etnis, agama, keyakinan, dan golongan melalui konteks socio-historisnya sesungguhnya telah membangun mekanisme resolusi konflik damai. Masyarakat Ambon memiliki mekanisme pela, masyarakat Dayak di Kalimantan Barat memiliki basaru sumangat, masyarakat di NTT



memiliki ndempa, dan masyarakat Aceh memiliki tepung tawar. Berbagai lembaga mekanisme resolusi konflik yang berbeda-beda tersebut hadir dan terbangun melalui konteks sosio-historis yang berbeda. Walaupun demikian memiliki fungsi mengintegrasikan masyarakat dalam sistem sosial yang damai (Susan, 2012:13-14).

Hefner (2001) berpendapat bahwa masyarakat Nusantara memiliki nilai pengetahuan nir-kekerasan yang dilembagakan dalam sistem sosial. Ia mengambil contoh bagaimana pertukaran dan jual beli dilakukan oleh berbagai etnis berbeda melalui medium pasar. Hal itu menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia sebelum kolonialisme dan modernisme mampu mendirikan suatu mekanisme resolusi konflik damai sebagai bagian dari sistem sosial. Susan (2012:14) menyatakan kolonialisme dan modernisme Orde Baru baik dalam dimensi kebudayaan dan pemerintahan telah memporakporandakan berbagai mekanisme kelola konflik damai yang menjadi kearifan lokal.

Lebih lanjut, Susan (2012:14) menyatakan terhapus dan memudarnya mekanisme resolusi konflik damai lokal masyarakat Indonesia oleh modernisasi Orde Baru merupakan lenyapnya *safety-valve* (katup penyelamat) dalam sistem sosial yang bisa mengelola konflik menjadi nirkekerasan. Menurut Coser (1957) katup penyelamat adalah lembaga yang menyediakan mekanisme penyelesaian konflik yang akan mempertahankan integrasi suatu masyarakat. Triono (2003) mencatat, faktanya Orde Baru telah menghilangkan katub penyelamat di setiap daerah melalui kebijakan modernismenya. Pada saat bersamaan lembaga-lembaga modern, seperti polisi, birokrasi dan pengadilan, tidak mampu menyediakan fungsi mekanisme resolusi konflik yang diterima masyarakat.

Orde Baru dengan pembangunan dan modernisme yang ditopang oleh militerisme telah menghancurkan mekanisme resolusi konflik damai lokal masyarakat Indonesia. Ketika rezim Orde Baru runtuh dan pengorganisasian kontrol militer goyah, berbagai masalah sosial akibat krisis ekonomi menciptakan berbagai pemicu konflik sosial. Perkelahian dua orang pemuda menyebabkan konflik antaretnis di Kalimantan Barat. Hal itu juga terjadi di masyarakat Ambon Maluku. Masalahnya mekanisme resolusi konflik damai lokal telah hancur dan sebagian tersisa sebagai ritual miskin makna. Sedangkan lembaga pemerintahan modern tidak menyediakan mekanisme resolusi konflik damai. Dua fakta umum itu menjadi pondasi mengapa konflik kekerasan menjamur tatkala rezim Orde Baru runtuh (Susan, 2012:16).

Menurut Wasisto Raharjo Jati (2013; 396) kajian sosiologi agama yang membahas kearifan lokal sebagai alternatif resolusi konflik (khususnya keagamaan) masih sedikit. Hal ini disebabkan karena banyak kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat lokal terkikis oleh modernitas zaman, sehingga topik kearifan lokal menjadi kurang begitu menarik dalam perspektif manajemen konflik. Pudar atau hilangnya kearifan lokal dalam tubuh masyarakat bisa mengakibatkan potensi konflik yang disertai kekerasan semakin besar, kondisi ini disebabkan karena masyarakat tidak mempunyai filter (penyaring) kultural dalam menjaga kehormatan ikatan sosial mereka.

Dalam rangka melakukan revitalisasi kearifan lokal sebagai upaya membangun perdamaian, John Haba dalam studi empiriknya di Kalimantan Barat, Maluku, dan Poso, melihat ada lima peran penting yang bisa diperankan oleh kearifan lokal dalam rangka sebagai media resolusi konflik

keagamaan (John Haba, 2008; 334-335). Kelima peran vital tersebut antara lain, yang pertama; kearifan lokal sebagai penanda identitas sebuah komunitas atau masyarakat. Identitas tersebut menunjukkan bahwa komunitas tersebut memiliki budaya dan tradisi perdamaian. Lebih lanjut hal ini menunjukkan bahwa komunitas mereka merupakan komunitas yang beradab. Konflik dianggap sebagai simbolisasi budaya barbarian. Dengan memiliki kearifan lokal sebagai bagian dari budaya mereka, komunitas tersebut ingin mencitrakan diri sebagai komunitas yang cinta damai.

*Kedua*, kearifan lokal secara intrinsik menyediakan adanya unsur kohesifitas berupa elemen lintas kepercayaan, lintas agama, lintas budaya, dan lintas warga. Dalam hal ini, kearifan lokal bisa dimaknai sebagai arena dialogis untuk mencairkan sisi eksklusifitas politik identitas yang melekat diantara berbagai kelompok komunitas. Upaya tersebut dilakukan untuk membangun inklusivitas dan meredam potensi konflik yang lebih besar. *Ketiga*, bila hukum positif bersifat memaksa dalam resolusi konflik oleh aparat penegak hukum. Maka kearifan lokal sebagai bagian resolusi konflik alternatif justru menggunakan pendekatan yang bersifat—persuasifl kepada semua pihak untuk berdialog dan berunding dengan memanfaatkan kedekatan kultural dan emosional.

*Keempat*, kearifan lokal menumbuhkan nilai solidaritas bagi sebuah komunitas serta dapat berfungsi mendorong terbangunnya rasa kebersamaan, saling apresiasi, sekaligus sebagai sebuah mekanisme bersama untuk mencegah berbagai kemungkinan yang dapat meredusir, bahkan merusak solidaritas komunal. Nilai Solidaritas tersebut dipercaya berasal dan tumbuh di atas kesadaran bersama, dari sebuah komunitas yang integral. *Kelima*, kearifan lokal

dapat merubah pola berfikir dan hubungan timbalbalik individu dan kelompok, dengan memposisikan di atas kebudayaan yang mereka miliki. Kearifan lokal bisa dikatakan sebagai bentuk sintesa dari unsur sosio-kultural dan

sosio-religius yang bertujuan untuk merekatkan kembali relasi antar sesama masyarakat yang tereduksi oleh perselisihan kepentingan politik, ekonomi, maupun *social prestige*.

Oleh karena kearifan lokal adalah sesuatu yang sudah mengakar dan biasanya tidak hanya berorientasi sosial semata, tetapi juga berorientasi sakral sehingga pelaksanaannya bisa lebih cepat dan mudah diterima oleh masyarakat. Kearifan lokal dapat dijadikan resolusi konflik, sehingga perdamaian bisa cepat terwujud, bisa diterima semua kelompok sehingga tidak ada lagi konflik laten yang tersembunyi dalam masyarakat.

Cara penyelesaian konflik lebih tepat jika menggunakan model-model penyelesaian yang disesuaikan dengan kondisi wilayah serta budaya setempat. Ideal apabila penyelesaian tersebut dilakukan atas inisiatif penuh dari masyarakat bawah yang masih memegang teguh adat lokal serta sadar akan pentingnya budaya lokal dalam menjaga dan menjamin keutuhan masyarakat. Dalam tahapan penyelesaian konflik, Jhon Burton memasukan penyelesaian bernuansa kultural, ini menunjukkan bahwa konflik yang terjadi di masyarakat juga dapat diselesaikan dengan cara budaya serta adat istiadat yang dianut masyarakat setempat. Menyelesaikan konflik dengan menggunakan adat lokal atau kearifan lokal dapat dikatakan efektif karena selama ini sudah membudaya dan mengakar serta menjadi pedoman dalam masyarakat.

### **C. Beberapa Contoh Penyelesaian Konflik Multikultural**

Penyelesaian konflik multikultural pada bagian ini mengangkat kasus penyelesaian konflik antara etnis Dayak dan etnis Madura di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah khususnya di Sampit khususnya yang berskala besar yang terjadi pada tahun 2001. Banyak catatan dan pendapat yang mencoba mengungkap akar permasalahan yang melatarbelakangi terjadinya konflik bersenjata antara etnis Dayak dan etnis Madura di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah khususnya di Sampit khususnya yang berskala besar yang terjadi pada tahun 2001. Pendapat dan catatan tersebut sebagian merupakan pendapat dari anggota atau tokoh dari masing-masing etnik yang bertikai sehingga sangat kental nuansa subyektifitasnya sekalipun didalamnya terkandung fakta dan kebenaran. Beberapa catatan dikemukakan oleh para ilmuwan atau akademisi yang memberi perhatian dan melakukan penelitian di wilayah tersebut dengan obyek yang berkaitan langsung dengan hal-hal yang menyangkut kewilayahan, etnisitas, sosial politik dan religi di wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Beberapa pandangan juga dikemukakan oleh pejabat pemerintahan dan tokoh masyarakat yang berkepentingan terhadap keamanan, ketertiban dan keharmonisan warga di wilayah tersebut.

Pandangan dan pendapat yang dikemukakan oleh pihak-pihak tersebut ada yang disampaikan secara lisan dalam pembicaraan-pembicaraan informal namun ada juga yang dikemukakan dalam dokumen tertulis, dalam naskah ilmiah, atau dalam laporan resmi. Menurut anggota etnis Dayak, kebencian dan kemarahan suku Dayak terhadap suku Madura memang telah lama dan mendalam disebabkan tingkah polah sebagian anggota etnik Madura yang tidak

hanya tercela di mata suku Dayak namun di mata suku-suku non-Madura lainnya.

Menurut Thamrin Amal Tomagola, ada empat faktor utama akar konflik di Kalimantan, yaitu:

- a. Terjadinya proses marginalisasi suku Dayak. Pendidikan yang minim dan sedikitnya warga Dayak yang bisa menikmati pendidikan mengakibatkan sedikitnya warga Dayak yang duduk di pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah lebih banyak di pegang oleh warga pendatang.
- b. Penempatan transmigran di pedalaman Kalimantan yang mengakibatkan singgungan hutan. Hutan bagi masyarakat Dayak adalah tempat tinggal dan hidup mereka. Ketika transmigran ditempatkan di pedalaman Kalimantan, dan mereka melakukan penebangan hutan, kehidupan masyarakat Dayak terganggu. Sejak tahun 1995 para transmigran di tempatkan di pedalaman Kalimantan, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya yang selalu menempatkan transmigran di pesisir. Para pendatang baru inilah, yang dikenal keras dan pembuat masalah, tidak seperti pendatang-pendatang sebelumnya. Selain soal transmigrasi, pemerintah juga telah memberikan keleluasaan bagi para pengusaha untuk membuka hutan melalui HPH.
- c. Masyarakat Dayak kehilangan pijakan, terganggunya harmoni kehidupan masyarakat Dayak mengakibatkan masyarakat Dayak kehilangan pijakan. Kekuatan adat menjadi berkurang. Kebijakan-kebijakan pemerintah telang

menghilangkan/mengurangi identitas mereka sebagai masyarakat adat.

- d. Hukum yang tidak dijalankan dengan baik mengakibatkan banyaknya terjadi tindak kekerasan dan kriminal yang dibiarkan. Proses pembiaran ini berakibat pada lemahnya hukum dimata masyarakat, sehingga masyarakat menggunakan caranya sendiri untuk menyelesaikan berbagai persoalan, diantaranya dengan menggunakan kekerasan.

Sementara itu Asykien berupaya bersikap lebih obyektif dengan menyalahkan kedua etnik atas terjadinya kerusuhan Sampit. Menurutnya, konflik antar etnik Madura dan Dayak terjadi karena sifat negatif keduanya. Sifat-sifat kurang terpuji etnik Dayak : 1) Fanatis dan mendewakan kesukuan, 2) tidak punya tenggang rasa dan pendengki etnis yang dimusuhi, 3) menggeneralisasikan kesalahan orang-perorang kepada keseluruhan etnis, 4) melestarikan budaya mengayau, 5) suka menyebarkan kebencian dan prasangka buruk. Sedangkan sifat-sifat etnik Madura yang menimbulkan dendam etnik lain : 1) mencuri, menjambret, dan menipu, 2) menempati tanah orang lain tanpa izin, 3) membuat kekacauan dalam perjudian, 4) melanggar lalu lintas, 5) merampas milik etnik lain di penambangan emas. Dari sifat-sifat negatif yang diklasifikasikan Asykien di atas menjadi jelas bahwasanya pertentangan antar etnis merupakan kulminasi dari adanya prasangka etnik. Berbagai keburukan anggota etnik lain dicatat, disimpan, dan digunakan sebagai dasar dalam bergaul dengan etnik tersebut, meskipun toh sebetulnya pelakunya hanyalah segelintir orang saja. Rupa-rupanya generalisasi sifat-sifat buruk seseorang menjadi sifat-sifat buruk kelompok yang

telah menjadi penyebab berkembangnya prasangka etnik di Kalimantan. Akibatnya kesalahan satu orang atau kelompok kecil orang juga digeneralisasikan ke keseluruhan etnik. Seterusnya konflik antar etnik tinggal menunggu saat yang tepat.

Dari berbagai akar masalah di atas apabila dirangkum maka akan dapat dikemukakan beberapa faktor penting sebagai akar masalah yang menjadikan pertentangan antara etnik Madura dan etnik Dayak berubah menjadi suatu kerusuhan massal dan konflik etnik berdarah yang memakan ribuan korban tewas dan eksodusnya warga etnik Madura keluar dari Sampit khususnya dan Kalimantan Tengah umumnya. Faktor-faktor tersebut adalah :

**a. Migrasi para pendatang dari luar daerah yang menggeser kedudukan etnik Dayak sebagai warga asli.**

Hingga akhir tahun 1970an Kalimantan Tengah tetap memiliki kependudukan yang sebagian besar masih Dayak tetapi migrasi 'orang luar' yang disponsori pemerintah berkembang pesat dan telah merubah secara drastis susunan kependudukan propinsi tersebut. Menurut sensus tahun 2000, jumlah penduduk Kalimantan Tengah sebesar 1.8 juta, yaitu bertambah dari 954.000 pada dua dasawarsa sebelumnya. Pertumbuhan yang sangat pesat di Kalimantan Tengah disebabkan perpindahan penduduk dari daerah lain di Indonesia yang sebagian merupakan hasil dari rencana transmigrasi pemerintah yang mendatangkan pemukim yang berasal dari daerah 'padat' seperti Jawa, Madura, Bali dan lainnya ke kepulauan yang masih 'kosong' dengan dibekali lahan untuk menanam padi dan berbagai tanaman komersil. Transmigrasi yang disponsori pemerintah diiringi oleh migrasi sukarela yang 'spontan' ketika orang di Jawa dan daerah lainnya mendapatkan kabar mengenai peluang-



peluang di Kalimantan. Pada banyak kasus pendatang 'spontan' bergabung dengan sanak keluarga atau tetangga yang telah mengikuti proyek transmigrasi yang resmi. Jumlah masyarakat pendatang semakin berkembang ketika pendatang asli beranak-cucu di kampung halaman baru mereka.

Untuk melihat dampak keseluruhan dari migrasi tersebut, perlu menambah jumlah anak cucu dari generasi transmigran sebelumnya serta transmigran 'spontan'. Bagian terbesar transmigran ditempatkan di tiga kabupaten yaitu 43 persen di Kapuas, 24 persen di Kotawaringin Barat dan 22 persen di Kotawaringin Timur.

Rencana pembukaan proyek pertanian raksasa di atas lahan gambut seluas satu juta hektar di Kalimantan Tengah guna meningkatkan produksi pangan dikhawatirkan akan menjadikan orang Dayak sebagai masyarakat minoritas.

Orang Madura bukanlah merupakan bagian besar dari jumlah transmigran yang didatangkan dari Jawa karena secara administrasi Madura adalah bagian dari Provinsi Jawa Timur namun orang Madura lebih cenderung meninggalkan lokasi transmigrasi dan bekerja pada perkebunan dan usaha penebangan kayu, selain pekerjaan kelas bawah di perkotaan seperti di pasar, dibidang angkutan darat dan sungai, usaha dagang kecil-kecilan, dan sebagai kuli pelabuhan. Meskipun dalam level Kalimantan Tengah orang Madura samasekali tidak dominan pada sektor perdagangan, namun di kota Sampit, Madura mendominasi, menjadi penduduk mayoritas dan mengendalikan kehidupan masyarakat, sementara Dayak menjadi minoritas sekalipun di daerah-daerah pinggiran dan pedalaman Dayak tetap menjadi mayoritas namun tidak memiliki pengaruh dan kekuasaan.

**b. Hilangnya tanah-tanah adat yang dihuni dan dimanfaatkan oleh etnik Dayak**

Arus masuk 'orang luar' mengakibatkan orang Dayak terpaksa meninggalkan tanah yang sebelumnya telah mereka huni dan dimanfaatkan untuk dimanfaatkan oleh orang atau pihak lain yang mendapat legitimasi dari UU dan peraturan-peraturan lainnya dan didukung oleh rezim Orde Baru. Salah satu yang menonjol adalah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Pertambangan Tahun 1968 yang memberi pemerintah kekuasaan untuk mengalokasikan tanah adat maupun tanah lainnya untuk pertambangan. Dengan diberlakukannya undang-undang tersebut, tidak ada lagi rintangan hukum yang dapat mencegah pemerintah membuka proyek transmigrasi dan mengalokasikan hak penggunaan hutan dan tambang di daerah yang dihuni orang Dayak.

Pengrusakan yang pesat terhadap hutan-hutan Kalimantan oleh pemegang hak penggunaan hutan menjadi penyebab keprihatinan orang Dayak yang paling mendasar. Bagi masyarakat Dayak, hutan adalah ayah dan sungai adalah ibu. Karena kedekatannya dengan alam, mereka memiliki cara-cara tersendiri untuk memelihara alam. Terjadinya perusakan alam, terutama hutan dan sungai, berarti terjadi perusakan terhadap masyarakat adat Dayak.

"Sekarang orang Dayak sudah berdamai dengan Madura. Musuh kami orang Dayak bukan lagi orang Madura. Sekarang perkebunan besar itu yang jadi masalah. Luar biasa kerusakan yang ada, kita bisa jadi penonton. Ini yang sangat rawan terjadi konflik adalah masalah perkebunan. Sekarang banyak investor kebun besar, masalah tanah dimana-mana jadi sekarang yang bahaya itu yah perkebunan-perkebunan itu."

Meski 66.9 persen dari Kalimantan Tengah secara resmi digolongkan sebagai hutan di tahun 1999, angka tersebut merupakan pengurangan yang tajam dari 84 persen di pertengahan 1970an. Di tahun-tahun terakhir semakin banyak lahan hutan yang telah dirubah menjadi perkebunan kelapa sawit.

Pengrusakan hutan tidak semata-mata disebabkan oleh perusahaan penebangan kayu yang besar. Kegiatan penebangan liar merajalela di Kalimantan Tengah – dan biasanya dilindungi oleh oknum polisi dan militer. Penebangan liar di Kabupaten Kotawaringin Timur menyebar luas sedemikian rupa hingga pemerintah daerah yang tidak mampu mencegahnya mengeluarkan peraturan pada bulan Juni 2000 yang secara efektif melegalkan penebangan liar dengan memajak kegiatan tersebut.

Banyak dari penebang liar merupakan orang Madura yang perilakunya membuat orang Dayak setempat berang.

Pengakuan terhadap penebangan liar berakibat dengan persaingan yang meningkat antara orang Madura dan orang Dayak yang juga terlibat kegiatan liar tersebut. Mungkin saja faktor tersebut telah memberi andil bagi meningkatnya ketegangan di Sampit yang meletus diawal tahun berikutnya.

Lazimnya orang Dayak tidak secara terbuka menentang penebangan di hutan serta perubahan fungsi lahan menjadi lokasi transmigrasi, perkebunan dan tambang. Sepanjang mereka diajak berunding dan diberi sekedar ganti rugi, mereka cenderung menjauhkan diri dari pertentangan dengan berpindah lebih dalam lagi ke hutan atau tetap bercocok tanam dipinggir lahan konsesi tersebut. Beberapa pemegang HPH membiarkan orang Dayak mengumpulkan rotan dan hasil hutan lainnya. Salah satu sebab yang paling

sering menimbulkan pertentangan adalah bila orang Dayak menebang satu atau dua pohon untuk digunakan sendiri kemudian dituduh mencuri kayu, yang oleh mereka dianggap memang sah milik mereka.

**c. Kurangnya lapangan pekerjaan dan terbatasnya sarana dan akses pendidikan**

Di Kalimantan Tengah termasuk Sampit ada anggapan umum bahwa masyarakat non-Dayak lebih banyak di kota sementara orang Dayak lebih banyak di pedalaman. Oleh karenanya dapat diasumsi bahwa orang Dayak merupakan bagian yang terbanyak dari tenaga kerja di bidang pekerjaan yang meliputi pertanian, kehutanan, berburu dan perikanan. Di lain pihak orang Dayak sedikit sekali terdapat dalam bidang yang menuntut kualifikasi pendidikan tinggi.

Di Sampit, seluruh lini dan jenis lapangan pekerjaan didominasi oleh orang Madura dan sudah menjadi rahasia umum jika etnis Madura sudah mendominasi lapangan pekerjaan tertentu maka etnis lainnya akan sulit untuk masuk dan bersaing, bukan karena keunggulan yang dimiliki oleh etnis Madura namun karena adanya suatu kompetisi yang tidak adil (*unfair*) dimana orang Madura suka menggunakan cara-cara kekerasan untuk mengintimidasi calon kompetitornya.

” Salah satu yang tidak kita sukai dari orang Madura itu adalah sikap mereka yang suka memonopoli kerjaan. Jadi suatu bidang usaha sudah banyak atau sudah dikuasai orang Madura, yang lain, suku lain jangan harap bisa sukses di bidang itu tanpa mendapat ancaman-ancaman. Itu...tambang yang sering ribut yah karena begitu...Bukan hanya Dayak, suku-suku lain juga bilang begitu...tapi kalau sekarang setelah kerusuhan kayaknya sudah agak berubah...”

Namun demikian, dalam bidang pendidikan, dewasa ini orang Dayak termasuk mereka yang telah memperoleh manfaat dari pengembangan pendidikan tinggi dan sebuah golongan kelas menengah Dayak yang kecil kini dipekerjakan pada posisi administrasi dalam pemerintahan daerah.

**d. Kurangnya partisipasi dan pelibatan masyarakat Dayak dalam pemerintahan dan politik**

Pada masa Orde Baru mayoritas orang Dayak merasa lebih banyak dikucilkan dari pemerintahan karena pada masa Orde Baru pemerintahan sipil di daerah pada umumnya didominasi oleh militer, dimana orang Dayak jarang sekali ditemukan di tingkat atas. Baru pada tahun-tahun terakhir rezim Soeharto, orang Dayak mulai ditunjuk menduduki jabatan pada pemerintahan daerah.

Akan tetapi pada saat ini orang Dayak mendominasi politik setempat termasuk jabatan gubernur Kalimantan Tengah yang saat ini dipegang oleh Agustun Teras Narang untuk masa jabatan yang kedua sehingga masyarakat Dayak tidak lagi dapat mengeluh bahwa mereka kurang terwakili.

Provinsi Kalimantan Tengah memang dibentuk sebagai satu-satunya propinsi di Indonesia yang mayoritasnya orang Dayak, pada tanggal 23 Mei 1957 setelah demonstrasi yang massif menolak penggabungan wilayah tersebut ke dalam Provinsi Kalimantan Selatan. Sebagai propinsi Dayak, Orang Dayak pada awalnya terwakili dengan baik pada masa awal kepemimpinan propinsi. Gubernur pertama, RTA Milono, adalah seorang Jawa, namun ia disusul oleh seorang Dayak, Tjilik Riwut, yang menjadi terkemuka dalam perjuangan nasionalis untuk mencapai kemerdekaan Indonesia.

Meski para gubernur secara resmi dipilih oleh DPRD tingkat I, pada kenyataannya mereka ditunjuk oleh presiden yang kehendaknya tidak pernah terusik oleh formalitas pemilihan. Soeharto tetap memilih gubernur orang Dayak yaitu Reinout Sylvanus dan Willy Ananias Gara yang memerintah selama enambelas tahun Namun mulai tahun 1984 tiga gubernur berikutnya, yaitu Gatot Amrih, Soeparmanto dan Warsito Rasman, semuanya orang Jawa akan tetapi tidak sebagaimana di propinsi lain, tak satupun merupakan perwira militer.

Pada masa Soeharto, pemerintahan pada tingkat kabupaten sebagian besar berada ditangan orang non-Dayak sampai dengan tahun-tahun terakhir ketika beberapa bupati Dayak ditunjuk. Di bawah Soeharto penunjukan perwira militer menjadi bupati adalah hal yang lazim. Akan tetapi sejak jatuhnya Orde Baru, pemerintah daerah telah didominasi oleh orang Dayak dan pada saat ini sebagian besar bupati serta walikota Palangkaraya adalah orang Dayak ataupun keturunan Dayak campuran tetapi tidak termasuk Kotawaringin Timur (Sampit) yang dipimpin seorang Bupati Jawa.

Demokratisasi diiringi dengan desentralisasi ketika diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 tentang Pemerintahan Daerah di tahun 1999 yang kemudian diubah dengan UU Nomor 32 Tahun 2004. Undang-undang baru yang radikal ini menjanjikan perubahan pada pemerintahan daerah dengan mengalihkan wewenang pemerintah pusat tidak kepada propinsi melainkan pada kabupaten. Selain kekuasaan lainnya, undang-undang tersebut memberi wewenang kepada daerah untuk mengelola sumberdaya nasional yang berada di wilayahnya. Dalam mengantisipasi implementasi undang-undang ini di tahun 2001,

pemerintahan kabupaten di seluruh Indonesia mulai melirik peluang untuk meningkatkan pendapatan dari bidang-bidang seperti penebangan kayu dan pertambangan bahkan sebelum undang-undang baru diberlakukan.

Di Kotawaringin Timur pendapatan asli kabupaten meningkat tajam pada tahun 2000 dibanding tahun 1999. Hasilnya adalah pertajaman persaingan politik untuk menguasai pemerintah setempat berikut sumberdayanya. Meski sulit dibuktikan, sangat mungkin bahwa retorika politik yang anti Madura akhir-akhir ini dirangsang oleh persaingan antar partai pimpinan orang Dayak yang mencari suara orang Dayak. Sebuah hasil sampingan otonomi daerah adalah kebutuhan pemerintahan setempat untuk menyusun kembali administrasi mereka agar dapat menghadapi arus masuk pegawai negeri sipil yang sebelumnya dipekerjakan oleh pemerintah pusat. Di Kotawaringin Timur sebagaimana di banyak kabupaten lainnya, hal itu berarti bahwa pejabat senior yang mapan kadangkala tersisihkan ketika terjadi pergantian kedudukan. Diantara yang tersisihkan tersebut di Sampit adalah Pedlik Asser serta iparnya yang telah dituduh mengungkapkan kemarahan mereka dengan memicu kerusuhan anti Madura.

Pada tingkat desa pemerintahan tradisional orang Dayak terganggu berat pada masa Orde Baru karena pemerintah pusat menerapkan undang-undang terhadap pemerintahan desa yang dikenakan di seluruh Indonesia dan sebagaimana disebut dalam undang-undang itu sendiri dimaksudkan untuk sebisa mungkin menyeragamkan kedudukan pemerintahan desa. Sebagai pengganti bentuk pemerintahan desa yang tradisional yang tetap dijalankan di banyak bagian Indonesia, suatu struktur baru dianut yang secara efektif meniru sistim tradisional pemerintahan desa di

Jawa. Mengikuti contoh Jawa, desa bukan perkotaan ditempatkan di bawah sebuah Kepala Desa sementara desa perkotaan berada dibawah Lurah yang diberi status PNS dan bertanggung jawab kepada Camat. Kedudukan lainnya dalam pemerintahan desa sedianya akan distandarisasikan di seluruh Indonesia.

Sebelum tahun 1974 desa Dayak dipimpin oleh lembaga adat tradisional. Meski biasanya dipimpin seorang kepala - kerap disebut Demang - rincian struktur pemerintahan berkembang sendiri-sendiri dari desa satu ke lainnya. Sejumlah masyarakat hanya terdiri dari beberapa ribu penduduk dalam beberapa desa, sementara masyarakat lainnya lebih luas sifatnya dan sistim pemerintahannyapun lebih rumit. Namun hal tersebut semuanya dirubah oleh undang-undang tahun 1974 yang seringkali dianggap sebagai undang-undang yang paling destruktif terhadap masyarakat pribumi dan pemerintahan lokal di Indonesia.

Dengan peraturan yang tercantum dalam UU tersebut, kepemimpinan tradisional di desa dikikis ketika masyarakat-masyarakat terpisah digabungkan menjadi desa yang lebih besar sesuai standar nasional. Di Kalimantan Barat bagian komponen dari desa baru seringkali terdiri dari dua atau tiga kilometer, dan kadang-kadang mencapai delapan hingga sepuluh kilometer, dan berakibat beberapa penduduk desa bahkan tidak mengenal kepala desa mereka. Di bawah sistem baru yang 'modern', sulit bagi pemimpin adat untuk dipilih sebagai kepala desa karena undang-undang menyaratkan kepala desa harus lulusan sekolah menengah. Dengan hilangnya wewenang moral yang dipegang kepemimpinan tradisional, maka kemampuannya untuk menjamin ketertiban sosial menjadi berkurang. Bila dimasa lalu



pemimpin adat mampu menangani perilaku kriminal kecil-kecilan serta perlawanan anak muda, kini polisi dilibatkan namun efektivitasnya selalu dipertanyakan karena ketidaknetralan aparat kepolisian. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 telah diganti oleh Undang-undang 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang disebut di atas, akan tetapi struktur pemerintahan desa yang seragam yang diterapkan di tahun 1974 masih tetap berlaku. Hanya dengan UU 32 Tahun 2004, pemerintahan lokal kembali diakui namun terlambat bagi Sampit karena kerusuhan meletus 3 tahun sebelum para Demang diakui lagi keberadaannya.

**e. Keterlibatan langsung aparat polisi dan militer dalam kegiatan ekonomi dan keberpihakan aparat terhadap salah satu kelompok.**

Telah umum diketahui pula bahwa polisi dan militer terlibat dalam perlindungan terhadap perusahaan penebangan kayu, pertambangan dan perkebunan yang kini menempati tanah yang sebelumnya berada di tangan orang Dayak. Kalangan polisi dan militer tidak hanya berkecimpung untuk menangani perilaku kriminal melalui kegiatan wajar akan tetapi anggota pasukan keamanan seringkali direkrut secara langsung oleh perusahaan sebagai petugas keamanan. Oleh karenanya orang Dayak merasa takut untuk memprotes apa yang mereka pandang sebagai perlakuan yang tidak adil. Polisi terutama dipandang secara umum oleh orang Dayak telah gagal melindungi kepentingan mereka. Orang Dayak secara luas percaya bahwa polisi tidak bertindak tegas terhadap anggota golongan etnis lain yang melakukan kejahatan terhadap orang Dayak. Bahkan tampaknya yang memungkinkan terjadinya serangkaian kejadian yang berakhir dengan

pembantaian pada bulan Februari dan Maret 2001 adalah kegagalan polisi untuk menangkap orang Madura pelaku pembunuhan terhadap seorang Dayak di Kereng Pangi pada bulan Desember 2000.

Di sisi lain, menurut orang Dayak bila ada orang Dayak yang melakukan kejahatan maka mereka biasanya ditangkap. Persepsi stereotip seperti itu tentunya lazim ditemukan dalam hampir semua konflik etnis. Namun ada interpretasi lain yang menunjukkan bahwa polisi memang melakukan diskriminasi etnis akan tetapi karena sebab yang spesifik. Orang Dayak pada umumnya miskin dan secara relatif tidak terwakilkan dalam kalangan pengusaha, sedangkan orang Madura lebih mungkin mempunyai sanak keluarga atau kerabat yang dapat memberi sogokan kepada polisi bila mereka terlibat suatu masalah. Namun demikian, bukan orang Dayak saja yang merasa yakin bahwa pasukan keamanan berprasangka terhadap mereka. Menyusul kerusuhan di Sampit dan Palangkaraya orang Madurapun mengklaim bahwa polisi berpihak pada orang Dayak.

#### **f. Kurangnya pengakuan terhadap budaya dan agama Dayak oleh pihak lain**

Orang Dayak telah lama memendam kekesalan terhadap sikap golongan etnis lain yang cenderung meremehkan orang Dayak sebagai bangsa yang 'tidak berbudaya' dan 'tidak beradab'. Kemarahan orang Dayak jelas-jelas terungkap dalam pernyataan yang dikeluarkan LMMDDKT menyusul gejolak di bulan Februari. Meski ditujukan khusus bagi orang Madura, kekesalan mendalam karena dianggap terbelakang secara umum dituju kepada semua orang luar. Sebagaimana diutarakan dalam sebuah dokumen yang ditandatangani oleh Profesor Usop, Ketua

Presidium LMMDDKT, 'Kami telah lama hidup dengan hinaan dan pandangan meremehkan yang menganggap bahwa golongan etnis kami adalah dungu, bodoh, perusak lingkungan, dan bahwa kami tidak tahu diri'. Orang Dayak secara khusus dibuat marah oleh anggapan umum bahwa kebiasaan orang Dayak bercocok tanam dengan berpindah lahan selama beberapa abad lalu telah menimbulkan kerusakan pada lingkungan hidup, sementara hasil karya perusahaan penebangan kayu dipandang sebagai kontribusi bagi pembangunan nasional. Orang Dayak merasa terhina pula oleh perlakuan terhadap agama Dayak di masa Orde Baru. Meski pada saat ini kebanyakan orang Dayak beragama Islam atau Kristen, agama tradisional dari suku Ngaju yang merupakan golongan dominan – Kaharingan – masih dihormati. Bahkan orang Dayak sendiri mengatakan bahwa orang Dayak yang Muslim dan Kristen tetap dipengaruhi kebudayaan yang berhubungan dengan Kaharingan. Akan tetapi pada masa Orde Baru hanya ada lima agama yang resmi diakui – Islam, Katolik, Protestan, Hindu dan Buddha. Obsesi rezim Orde Baru untuk menempatkan setiap golongan dalam kategori yang teratur ditambah peremehan yang hampir total terhadap bangsa 'terbelakang' menyebabkan agama Kaharingan diperlakukan sebagai bentuk agama Hindu. Oleh karenanya statistik resmi mengenai keagamaan mencatat ada 195.646 orang beragama Hindu tinggal di Kalimantan Tengah di tahun 1999.

Dengan demikian konflik antara etnik Dayak dan etnik Madura di Sampit yang kelihatannya hanya disebabkan oleh perkelahian antar pemuda Etnis Dayak dengan Etnis Madura, dalam kenyataannya memiliki akar penyebab yang jauh lebih kompleks. Gabungan faktor ekonomi, sosial

budaya, religi, ketimpangan sosial, lingkungan dengan perannya masing-masing telah menjadi akar masalah sehingga terjadi kerusuhan berdarah antara Etnik Dayak dan Madura. Faktor-faktor tersebut kemudian diperparah dengan sikap dan watak masing masing pihak yang negatif terutama dari warga Madura sehingga kerusuhan dan konflik berdarah menjadi tak terelakkan dan menelan korban yang tidak sedikit.

Tragedi Sampit merupakan peristiwa yang dapat dikatakan berlangsung sangat singkat namun mengakibatkan kerusakan yang sangat besar dan menimbulkan korban jiwa yang banyak disamping jumlah pengungsi yang sangat besar. Hal ini dapat diketahui melalui kronologi konflik yang meliputi sejumlah fase sebagai berikut:

1. Fase perselisihan (*dispute phase*)

Tahapan atau fase ini telah dimulai ketika para pendatang tiba di Sampit khususnya dan Kalimantan Tengah umumnya. Suku Dayak yang telah mendiami daerah tersebut selama berabad-abad sedikit demi sedikit perlahan namun pasti, tersingkir dari tanah yang mereka duduki dan manfaatkan baik oleh kepentingan orang per orang maupun untuk kepentingan skala organisasi dan perusahaan, baik yang dilakukan dengan sukarela maupun yang dilakukan karena berbagai tekanan, himbauan maupun bujukan.

Persinggungan dengan para pendatang, perasaan tersingkir dari tanah yang didiami secara turun temurun, menghadapi tuduhan dari berbagai pihak sebagai perusak lingkungan, pelaku penebangan liar, pencuri kayu dan sebagainya membuat perselisihan terus menerus antara Etnis Dayak dan etnis lainnya termasuk dan terutama Madura, antara etnis Dayak dengan Pemerintah yang dianggap bukan

bagian dari mereka, antara etnis Dayak dengan para pengusaha hutan dan tambang dan juga antara etnis Dayak yang hidup di pinggiran atau di hutan dengan etnis Dayak yang sedikit banyak berusaha membaaur dengan kehidupan yang mencoba menelan mereka dan menjelma menjadi Dayak kota yang lebih realistis.

Diantara perselisihan yang paling menonjol adalah dengan warga etnis Madura yang perangnya memang agak jauh berbeda dengan etnik-etnik lain seperti Jawa misalnya. Orang Jawa pandai membaaur, dapat dengan cepat beradaptasi, tidak memiliki sejarah dan kultur kekerasan dan berusaha harmoni dengan alam lingkungan dan masyarakat sekitar. Orang Jawa biasanya sudi diperintah oleh orang dari etnis lain tidak ada hal yang tabu bagi mereka untuk tunduk pada siapapun pemimpin terutama ketika mereka menyadari bahwa mereka berada di perantauan dan memahami bahwa status sebagai orang yang menumpang. Orang Jawa juga dikenal taat hukum dan peraturan. Kebanyakan orang Jawa juga terkenal memegang teguh adat istiadat Jawa/kejawaen yang merupakan sinkretisme Islam, Hindu, Budha dan hasil pemikiran manusia lainnya sehingga mereka dapat lebih memahami alam pikir orang Dayak. Sementara Madura dapat dikatakan sebaliknya. Alam mendidik mereka keras, menjadi raja tega, susah diatur dan tidak mau tunduk pada perintah orang lain kecuali pada pemimpin dari kalangan mereka dan kyai. Sekalipun banyak diantara warga etnis Madura tidak melakukan kewajiban-kewajiban dasar agama Islam namun mereka sangat bangga dan fanatik dengan Islam bahkan seringkali juga berlebihan. Tidak terbayang kalau akhirnya orang Madura mau diperintah oleh orang Dayak yang dianggap mereka bodoh, terbelakang, tidak beradab bahkan tidak beragama/musyrik

karena begitu kuat berpegang teguh dengan adat-istiadat yang masih kental dengan kepercayaan pagan animisme/dinamisme. Dengan demikian bibit dan sumber perselisihan telah menyebar dalam masyarakat dengan bertemunya dua etnis dan dua kebudayaan yang secara sepintas lalu saling bertolak belakang. Dalam tahapan ini perselisihan dan silang sengketa menjadi tidak terhindarkan.

## 2. Fase krisis (*crisis phase*)

Fase krisis terjadi ketika jumlah orang Madura di Sampit makin banyak dari hari ke hari, membentuk masyarakat mayoritas, menguasai perekonomian, mempengaruhi pemerintahan dan aparat keamanan baik karena pemasukan personil ke dalam pemerintahan dan badan keamanan maupun dengan cara mempengaruhi dengan kekuatan materi/uang.

Perselisihan makin sering terjadi, masyarakat Dayak dan etnik lainnya yang biasanya mengalah menjadi semakin terdesak dan hampir-hampir tidak menemukan jalan keluar untuk melarikan diri dari situasi yang tidak menyenangkan tersebut. Seluruh aspek kehidupan diwarnai oleh Madura dengan efek-efek yang jauh dari menyenangkan bahkan mengintimidasi.

Madura yang berada di atas angin mendesakkan cara-cara mereka kepada warga etnik lain yang terpaksa menerima dengan segala permasalahan dendam kesumat dalam hati. Dalam tahap ini sebenarnya jika pemerintah dan aparat jeli dan cermat, maka kekerasan-kekerasan sporadis tidak perlu terjadi. Pemerintah dan aparat keamanan seharusnya sudah mendengar dengan terang benderang keluhan, bahkan caci maki dari warga etnik lainnya yang

dirugikan dan diperlakukan secara sewenang-wenang oleh warga Madura,

”Kami memang awal-awalnya mengeluh, mengadu tapi sama siapa...siapa yang mau mendengar keluhan kami. Dan memang kebanyakan kami bahkan tidak berani untuk bersuara...ancaman-ancaman...pokoknya serba sulit bahkan untuk bercerita antar teman saja harus hati-hati...”

### 3. Fase kekerasan terbatas (*limited violence phase*)

Dalam tahapan ini kekerasan telah terjadi meskipun hanya bersifat sporadic namun telah dikaitkan dengan permasalahan antar etnis. Kekerasan yang terjadi dapat berupa pembunuhan, pengeroyokan maupun bentuk-bentuk kekerasan lain yang pada akhirnya menambah beban pada suasana konflik sehingga sewaktu-waktu dapat pecah menjadi kekerasan yang sifatnya massif. Pada fase ini terjadi peristiwa-peristiwa menonjol sebagai berikut:

- a. Tahun 1972 di Palangka Raya, seorang gadis Dayak digodai dan diperkosa, terhadap kejadian itu diadakan penyelesaian dengan mengadakan perdamaian menurut hukum adat.
- b. Tahun 1982, terjadi pembunuhan oleh orang Madura atas seorang suku Dayak, pelakunya tidak tertangkap, pengusutan/penyelesaian secara hukum tidak ada.
- c. Tahun 1983, di Kecamatan Bukit Batu, Kasongan, seorang warga Kasongan etnis Dayak di bunuh (perkelahian 1 (satu) orang Dayak dikeroyok oleh 30 (tigapuluh) orang Madura). Terhadap pembunuhan atas warga Kasongan bernama Pulai yang beragama Kaharingan tersebut, oleh tokoh suku Dayak dan Madura diadakan perdamaian: dilakukan peniwhan

Pulai itu dibebankan kepada pelaku pembunuhan, yang kemudian diadakan perdamaian ditanda tangani oleh ke dua belah pihak, isinya antara lain menyatakan apabila orang Madura mengulangi perbuatan jahatnya, mereka siap untuk keluar dari Kalteng.

- d. Tahun 1996, di Palangka Raya, seorang gadis Dayak diperkosa di gedung bioskop Panala dan dibunuh dengan kejam (sadis) oleh orang Madura, ternyata hukumannya sangat ringan.
- e. Tahun 1997, di Desa Karang Langit, Barito Selatan orang Dayak dikeroyok oleh orang Madura
- f. Tahun 1997, di Tumbang Samba, ibukota Kecamatan Katingan Tengah, seorang anak laki-laki bernama Waldi mati terbunuh oleh seorang Suku Madura yang tukang jualan sate. Si belia Dayak mati secara mengenaskan, tubuhnya terdapat lebih dari 30 (tigapuluh) bekas tusukan. Anak muda itu tidak tahu menahu persoalannya, sedangkan para anak muda yang bertikai dengan si tukang sate telah lari kabur. Yang tidak dapat dikejar oleh si tukang sate itu, si korban Waldi hanya kebetulan lewat di tempat kejadian.
- g. Tahun 1998, di Palangka Raya, orang Dayak dikeroyok oleh 4 (empat) orang Madura, pelakunya belum dapat ditangkap karena melarikan diri dan korbannya meninggal, tidak ada penyelesaian secara hukum.
- h. Tahun 1999, di Palangka Raya, seorang petugas Tibum (ketertiban umum) dibacok oleh orang Madura, pelakunya ditahan di Polresta Palangka Raya, namun besok harinya datang sekelompok suku



Madura menuntut temannya tersebut dibebaskan tanpa tuntutan, ternyata pihak Polresta Palangka Raya membebaskannya tanpa tuntutan hukum;

- i. Tahun 1999, di Palangka Raya, seorang Dayak dikeroyok oleh beberapa orang suku Madura masalah sengketa tanah ; 2 (dua) orang Dayak dalam perkelahian tidak seimbang itu mati semua, sedangkan pembunuh lolos, malah orang Jawa yang bersaksi dihukum 1,5 tahun karena dianggap membuat kesaksian fitnah terhadap pelaku pembunuhan yang melarikan diri itu.
- j. Tahun 1999, di Pangkut, ibukota Kecamatan Arut Utara, Kabupaten Kotawaringin Barat, terjadi perkelahian massal dengan suku Madura, gara-gara suku Madura memaksa mengambil emas pada saat suku Dayak menambang emas. Perkelahian itu banyak menimbulkan korban pada kedua belah pihak, tanpa penyelesaian hukum.
- k. Tahun 1999, di Tumbang Samba, terjadi penikaman terhadap suami-isteri bernama Iba oleh 3 (tiga) orang Madura; pasangan itu luka berat. Dirawat di RSUD Dr. Doris Sylvanus, Palangka Raya, biaya operasi/perawatan ditanggung oleh Pemda Kalteng. Para pembacok/pelaku tidak ditangkap dikabarkan sudah pulang ke pulau Madura. (Tiga orang Madura memasuki rumah keluarga Iba dengan dalih minta diberi minuman air putih, karena katanya mereka haus, sewaktu Iba menuangkan air di gelas, mereka membacoknya, isteri Iba yang mau membela juga ditikam. Tindakan itu dilakukan mereka menurut cerita mau membalas dendam, tapi salah alamat).

- l. Tahun 2000, di Pangkut, Kotawaringin Barat, 1 (satu) keluarga Dayak mati dibantai oleh orang Madura, pelaku pembantaian lari, tanpa penyelesaian hukum.
- m. Tahun 2000, di Palangka Raya, 1 (satu) orang suku Dayak dibunuh/mati oleh pengeroyok suku Madura di depan gedung Gereja Imanuel, Jalan Bangka. Para pelaku lari, tanpa proses hukum.
- n. Tahun 2000, di Kereng Pangi, Kasongan, Kabupaten Kotim, terjadi pembunuhan terhadap Sendung (nama kecil). Sendung mati dikeroyok oleh suku Madura, para pelaku kabur/lari, tidak tertangkap, karena lagi-lagi disebutkan sudah lari ke Pulau Madura, proses hukum tidak ada karena pihak berwenang tampaknya belum mampu menyelesaikannya (tidak tuntas).
- o. Tahun 2001, di Sampit (17 sampai dengan 20 Februari 2001) warga Dayak banyak terbunuh/dibantai. Suku Madura terlebih dahulu menyerang warga Dayak.
- p. Tahun 2001, di Palangka Raya (25 Februari 2001) seorang warga Dayak terbunuh/mati diserang oleh suku Madura. Belum terhitung masalah warga Madura di bagian Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Suku Dayak hidup berdampingan dengan damai dengan Suku lainnya di Kalimantan Tengah, kecuali dengan Suku Madura. Lanjutan kerusuhan tersebut adalah peristiwa Sampit yang mencekam itu.

#### 4. Kekerasan massal (*massive violence phase*)

Kerusuhan bersenjata dan berdarah akhirnya memang pecah di Sampit pada tanggal 18 Februari 2001. Dua suku besar saling bertarung menuntaskan permasalahan yang

telah terjadi diantara mereka, merubah singgungan-singgungan menjadi bentrokan tatap muka, merubah caci maki dan keluhan menjadi tebasan pedang, tusukan tombak dan letusan senjata api rakitan. Bagi warga Madura inilah saatnya untuk menunjukkan secara formal kangkangan kekuasaan mereka atas Kota Sampit sehingga tidak mengherankan jika ketika dua hari mereka secara total menguasai Kota Sampit mereka melakukan pawai dan membentangkan spanduk kemenangan. Selama ini mereka memang telah berjaya tetapi dengan cara-cara yang kurang elegan dan terkesan sembunyi-sembunyi, luapan euphoria kegembiraan juga diluapkan dengan melontarkan tantangan-tantangan kepada etnis Dayak. Yang agaknya dilupakan oleh pasukan Madura yang mabuk kemenangan semu tersebut adalah bahwa Sampit hanyalah kota kecil saja di Kalimantan, bahwa warga Dayak di Sampit yang mereka kalahkan hanyalah bagian kecil saja dari komunitas Dayak yang tersebar bahkan hingga ke Sarawak dan Sabah. Belum lagi, kekalahan dan penderitaan saudara-saudara mereka warga Madura di Sambas seakan terlupakan.

Sedangkan bagi Dayak, inilah saat untuk merebut kembali tanah air yang hilang, saat untuk memulihkan harga diri yang terbuang, saat untuk menuntut balas atas semua kesewenang-wenangan, saat untuk membalikkan hinaan-hinaan yang hampir-hampir tidak lagi dapat ditahankan. Inilah saatnya mengembalikan “para perusuh” ini ke asalnya. Dan memang hanya warga Madura yang jadi sasaran.

Adapun kronologi kejadian konflik berdarah yang dikenal sebagai “Tragedi Sampit” dan menimbulkan korban sangat besar tersebut adalah sebagai berikut

### **1. Tanggal 18 Februari 2001**

- a. Pukul 01.00 WIB terjadi peristiwa pertikaian antar etnis diawali dengan terjadinya perkelahian antara Suku Madura dengan kelompok Suku Dayak di Jalan Padat Karya, yang mengakibatkan 5 (lima) orang meninggal dunia dan 1 (satu) orang luka berat semuanya dari Suku Madura.
- b. Pukul 08.00 WIB terjadi pembakaran rumah Suku Dayak sebanyak 2 (dua) buah rumah yang dilakukan oleh kelompok Suku Madura dan 1 (satu) buah rumah Suku Dayak dirusak dan dijarah oleh kelompok Suku Madura. Kejadian ini mengakibatkan 3 (tiga) orang meninggal semuanya dari Suku Dayak.
- c. Pukul 09.30 WIB pengiriman Pasukan Brimob Polda dari Kalimantan Selatan sebanyak 103 personil dengan kendali BKO Polda Kalimantan Tengah untuk pengamanan di Sampit dan tiba Pukul. 12.00 WIB
- d. Pukul 10.00 WIB sebanyak 38 (tiga puluh delapan) orang tersangka dari kelompok Suku Dayak atas kejadian tersebut di atas diamankan ke MAPOLDA Kalteng di Palangka Raya dan menyita beberapa macam senjata tajam sebanyak 62 buah.
- e. Pukul 20.30 WIB ditemukan 1 (satu) orang mayat dari kelompok Suku Dayak di Jalan Karya Baru, Sampit.

## **2. Tanggal 19 Februari 2001**

- a. Pukul 02.00 WIB terjadi pembakaran 1 (satu) buah mobil Kijang milik Suku Madura di Jalan Suwikto, Sampit.
- b. Pukul 16.00 WIB ditemukan mayat sebanyak 4 (empat) orang dan 1 (satu) orang luka bakar semuanya dari Suku Dayak di Jalan Karya Baru, Sampit.

Pukul 17.00 WIB diadakan *sweeping* oleh Petugas aparat keamanan terhadap kelompok Suku Madura dan kelompok Suku Dayak di Sampit.

- c. Penangkapan 6 (enam) orang Suku Dayak tersangka berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap tersangka yang telah ditahan sebelumnya, dan diamankan di Polres Kotim.
- d. Pukul 22.00 WIB Wakil Gubernur Kalimantan Tengah dan DANREM 102/PP bersama pasukan dari Yonif 631/ATG sebanyak 276 orang menuju Sampit dan tiba Pukul. 03.00 WIB.
- e. Pada tanggal 18 dan 19 Februari 2001 kota Sampit sepenuhnya dikuasai oleh Suku Madura yang menggunakan senjata tajam dan bom molotov.

### **3. Tanggal 20 Februari 2001.**

- a. Pukul 08.30 WIB diadakan pertemuan antara DANREM 102/PP, KAPOLDA dan Wakil Gubernur dan MUSPIDA Kabupaten Kotim dengan tokoh masyarakat di Sampit (Tokoh Dayak, Madura dan Tokoh Masyarakat Sampit) untuk mengupayakan penghentian pertikaian dan dilanjutkan dengan pemantauan ke lokasi pertikaian dengan mengadakan dialog dengan warga yang bertikai.
- b. Warga yang ketakutan karena kerusakan dan *sweeping* disertai pembakaran rumah yang dilakukan oleh Suku Madura terhadap Suku Dayak mengungsi ke Gedung Balai Budaya Sampit, Gedung DPRD Kotim dan Rumah Jabatan Bupati Kotim sebanyak 702 KK (2.850 orang) bukan Suku Madura dan sebagian warga non Madura mengungsi ke Palangka Raya.

- c. Terjadi perkelahian dan kerusuhan massal terbuka antara Suku Madura dan Suku Dayak yang datang membantu dari pedalaman

**4. Tanggal 21 Februari 2001.**

- a. Pukul 09.00 WIB di Sampit diadakan pertemuan Wakil Gubernur, DANREM 102 / PP dan KAPOLDA Kalimantan Tengah dengan MUSPIDA Kabupaten Kotim.
- b. Pukul 09.00 WIB di Palangka Raya ada Unjuk Rasa oleh masyarakat Suku Dayak, Suku Jawa, suku Batak dan masyarakat lainnya ke DPRD Propinsi Kalimantan Tengah menyampaikan tuntutan sebagaimana pada Lampiran 07.
- c. Pukul 12.15 WIB para pengunjung rasa menuju MAPOLDA Kalimantan Tengah untuk menjemput 38 tahanan yang diminta penanggungan penahannya.

**5. Tanggal 22 Februari 2001.**

- a. Pukul 08.00 WIB diadakan Rapat Satkorlak PB di ruang kerja Wakil Gubernur Kalimantan Tengah untuk mengantisipasi menanggulangi kerusuhan di Sampit.
- b. Pukul 08.30 WIB berangkat ke Jakarta rombongan dari LMMDDKT sebanyak 3 orang didampingi oleh KAJATI Kalimantan Tengah, Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah, Ketua DPRD Propinsi Kalimantan Tengah dan Kepala Direktorat Sosial Politik Propinsi Kalimantan Tengah menghadap KAPOLRI untuk menyampaikan usul supaya KAPOLDA Kalimantan Tengah diganti.
- c. Pukul 10.30 WIB Wakil Gubernur Kalteng menghubungi Wakil Gubernur Jawa Timur per

telepon untuk koordinasi dalam rangka penanganan evakuasi pengungsi ke Surabaya.

- d. Ditemukan 14 buah Bom Rakitan di rumah Suku Madura di Sampit.
- e. Menghubungi Dirjen Perhubungan Laut untuk koordinasi angkutan Kapal dan merubah rute pelayaran Kapal Pelni yang ke Kumai untuk membawa pengungsi dari Sampit ke Surabaya.

#### **6. Tanggal 23 Februari 2001.**

- a. Pukul 08.30 WIB Tim Investigasi Mabes Polri berangkat ke Palangka Raya dibawah Pimpinan Brigjen Pol. Muji Hartaji beserta 2 anggota untuk mengadakan pengecekan di lapangan.
- b. Pukul 15.00 WIB diadakan Rapat Satkorlak PB Kalimantan Tengah untuk membahas bantuan Kapal, membentuk Tim Sukarelawan untuk dikirim ke Sampit untuk membentuk dan memperkuat Satlak PB di Sampit.
- c. Melakukan evakuasi pengungsi Suku Madura dari Kuala Pembuang ke Gresik sebanyak 205 orang dengan KLM Bintang Selatan dan sebanyak 1.027 orang dengan KM Anugrah Samudra.

#### **7. Tanggal 24 Februari 2001.**

- a. Ditemukan 4 (empat) mayat Suku Madura di Sampit.
- b. Ditemukan 6 (enam) bahan peledak bom rakitan di Komplek IKAMA Palangka Raya.
- c. Pukul 10.00 WIB melakukan evakuasi Suku Madura sebanyak 2.100 orang dari Sampit ke Surabaya dengan KRI Teluk Sampit

- d. Pukul 23.45 WIB melakukan evakuasi Suku Madura sebanyak 3.000 orang dengan KRI Teluk Ende.
- 8. Tanggal 25 Februari 2001.**
- a. Pukul 09.30 WIB melakukan evakuasi pengungsi dari Kumai ke Semarang sebanyak 2.139 orang dengan KM Leuser.
  - b. Pukul 11.30 WIB Menkopolsoskam beserta rombongan tiba di Palangka Raya dan langsung meninjau lokasi kerusakan di Kota Sampit dan Kota Palangka Raya.
  - c. Pukul 18.30 WIB kerusakan dari Sampit meluas ke Kota Palangka Raya, mulai terjadi pembakaran rumah-rumah Suku Madura sebanyak 20 buah oleh warga masyarakat non Madura yang datang dari berbagai tempat di pedalaman.
- 9. Tanggal 26 Februari 2001.**
- a. Satkorlak Pengendalian Bencana (PB) Kalteng menerima bantuan dari Depkes dan Kessos, Dinas PUKalimantan Tengah, Bakornas Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (PBP) PMI Pusat.
  - b. Terjadi pembakaran 3 (tiga) buah rumah Suku Madura di Kota Palangka Raya oleh masyarakat setempat non Madura.
- 10. Tanggal 27 Februari 2001.**
- a. Pukul 08.30 WIB tiba di Palangka Raya Tim KOMNAS HAM Pusat di bawah Pimpinan Sdr. Bambang W. Suharto.



- b. Pukul 07.38 WIB tiba di Palangka Raya rombongan PMI Pusat di bawah pimpinan Mar'ie Muhammad beserta rombongan dengan membawa bahan makanan dan obat-obatan.
- c. Meninggal dunia sebanyak 7 orang terdiri dari 5 (lima) orang Suku Madura dan 2 (dua) orang yang tidak diketahui identitas sukunya akibat kerusakan di kota Palangka Raya.
- d. Evakuasi Suku Madura sebanyak 2.269 orang dari Pegatan Mendawai Kotim ke Banjarmasin dengan Speed Boat.
- e. Rombongan petugas Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB sebanyak 4 (empat) orang tiba di palangka Raya meminta informasi berkenaan jumlah pengungsi dan penanganannya serta upaya penanggulangan kerusakan.
- f. Pukul 13.45 WIB di Sampit terjadi kesalah-pahaman antara aparat keamanan di Pelabuhan Sampit sehingga menimbulkan korban dari POLRI 3 orang luka tembak, dari TNI-AD 1 (satu) orang meninggal dunia dan dua orang luka tembak. Kerugian material 1 (satu) buah Jeep PM, 1 (satu) buah Suzuki Vitara dan 6 (enam) buah truk TNI-AD rusak berat.

#### **11. Tanggal 28 Februari 2001.**

- a. Jumlah pengungsi yang dievakuasi dengan Kapal Laut secara keseluruhan sejak tanggal 18 Pebruari 2001 sebanyak 57.492 (lima puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh dua) orang.
- b. Terjadi kebakaran di Pasar Sampit, Jalan Iskandar pada pukul 18.45 WIB.

- c. Jumlah korban sejak tanggal 18 Pebruari 2001 terdiri dari korban jiwa sebanyak 383 (tiga ratus delapan puluh tiga) orang dan luka-luka sebanyak 38 (tiga puluh delapan) orang. Korban materil berupa rumah terbakar sebanyak 793 (tujuh ratus sembilan puluh tiga buah) dan rumah yang rusak sebanyak 48 (empat puluh delapan) buah. Kendaraan roda empat dan roda dua sebanyak 13 (tiga belas) buah, serta becak sebanyak 206 (dua ratus enam) buah.
- d. Jumlah satuan pengamanan untuk wilayah Sampit yang sudah dikerahkan sejak tanggal 18 Pebruari 2001 sebanyak 3.129 (tiga ribu seratus dua puluh sembilan) personil.

#### **12. Tanggal 01 Maret 2001.**

- a. Kunjungan Wakil Presiden beserta rombongan dan pengarahan kepada Gubernur dan Muspida dalam rangka peninjauan ke Sampit dan Palangkaraya.
- b. Penyampaian pernyataan sikap oleh Forum Komunikasi Umat beragama Kabupaten KOTIM tentang jaminan keamanan untuk masyarakat Sampit yang dihadiri oleh tokoh masyarakat dan tokoh agama (Islam, Kristen Protestan, Katholik, Hindu, Budha dan Konghucu).
- c. Penerimaan pengungsi di Palangkaraya sebanyak 174 orang

#### **13. Tanggal 02 Maret 2001.**

- a. Pemberangkatan 6 dokter dari RSCM Jakarta dan 10 orang Kelompok Sukarelawan (KSRL) ke Sampit.
- b. Pemberangkatan pengungsi dari Sampit dengan menggunakan KRI Teluk Bone sebanyak 3.019 orang

dan KRI Teluk Saleh sebanyak 3.156 orang ke Surabaya.

- c. Penyerahan bantuan beras dari Wakil Presiden sebanyak 20 ton ke Sampit.
- d. Rapat koordinasi yang dipimpin oleh Gubernur mengenai solusi penanganan pertikaian antar etnis oleh tokoh masyarakat dan dihadiri unsur Muspida Tingkat I Propinsi Kalteng.

#### **14. Tanggal 03 Maret 2001.**

- a. Pengiriman minuman air dalam kemasan oleh pengurus Daerah PMI Propinsi Kalimantan Tengah sebanyak 9000 botol = 750 dos.
- b. Pengiriman 100 kantong darah bantuan dari PMI Pusat ke Sampit.
- c. Pemberangkatan Sekretaris Daerah, Kadit Sospol dan Wakil Ketua DPRD Kalimantan Tengah ke Surabaya dalam rangka pertemuan dengan Tokoh Madura dan Kapolri.

Dengan melihat waktu yang singkat dan jumlah korban yang besar dan dengan pola serangan yang menurut Klinken cukup teratur bisa jadi merupakan suatu petunjuk bahwa kerusakan di Sampit, Kotim dan Kalimantan Tengah pada umumnya memang telah lama dipersiapkan oleh pihak-pihak tertentu sebagaimana disinyalir oleh beberapa pihak. Indikasinya antara lain bahwa pimpinan para penyerang dari kelompok etnis Dayak adalah pegawai negeri Pemerintah Daerah Kotim, digunakannya fasilitas milik Pemerintah Kotim seperti pemakaian mesin-mesin faksimili milik kecamatan untuk mengkoordinir penyerangan, dan jauh sebelum itu adanya suatu kampanye yang intensif dari

etnis Dayak yang dilakukan oleh LMMDD-KT untuk menyalahkan etnis Madura atas segala masalah yang terjadi di Kalteng dan Kotim khususnya, serta adanya dukungan dari militer meskipun hal tersebut masih perlu diselidiki lebih lanjut.

Beberapa tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah dan aparat keamanan untuk menangani dan menghentikan konflik di Sampit adalah sebagai berikut:

#### **5. Penanganan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah serta Aparat Keamanan**

- a. Menerjunkan satuan pengamanan dari POLRI dan TNI ke lokasi kerusuhan.
- b. Melakukan tindakan persuasif dan preventif terhadap kelompok yang bertikai untuk mengantisipasi berkembangnya kerusuhan yang lebih luas.
- c. Mengadakan evakuasi para pengungsi dari Sampit ke Surabaya maupun dari Palangka Raya ke Surabaya lewat Banjarmasin.
- d. Mengadakan koordinasi dengan instansi terkait, tokoh masyarakat dan tokoh agama guna mencegah berkembangnya pertikaian.
- e. Melaksanakan patroli dan menempatkan pasukan pada tempat yang rawan pertikaian.
- f. Memberikan bantuan bahan makanan dan obat-obatan kepada para pengungsi yang diperoleh dari berbagai pihak.
- g. Berusaha meredam dan menghentikan aksi pembakaran dan pengrusakan milik warga Suku Madura dengan cara mengeluarkan pengumuman dan himbauan yang disampaikan media massa dan elektronik serta mobil keliling secara kontinyu.

- h. Melakukan optimalisasi Siskamling di 500 RT sekota Palangka Raya untuk mengadakan tindakan preventif.
- i. Mengadakan koordinasi secara intensif dengan MUSPIDA Propinsi Kalimantan Tengah dan instansi terkait, maupun dengan MUSPIDA Kota Palangka Raya dan MUSPIDA Kabupaten Kotim beserta instansi terkait.
- j. Mengikuti pertemuan Kerukunan Warga Kalimantan dengan tokoh Madura dan Gubernur Jawa Timur di Surabaya tanggal 3 Maret 2001.

## **6. Keterlibatan Komnas HAM**

Pertikaian etnis di Sampit Kalimantan Tengah yang secara umum melibatkan etnis Dayak dan Madura ini diperkirakan telah mengakibatkan 419 orang meninggal dunia, 93 orang luka-luka, 1.304 rumah beserta 250 kendaraan bermotor dirusak dan dibakar serta sebanyak 88.164 orang mengungsi. Peristiwa ini dipandang merupakan sebuah peristiwa yang mengoyak perasaan dan cenderung berpotensi menghasilkan berbagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM) baik yang dilakukan oleh kedua belah pihak maupun oleh aparat.

Atas peristiwa tersebut di atas, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI) berusaha melakukan penyelidikan dan pada tanggal 3 April 2001 menyepakati pembentukan Komisi Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Sampit/Kalteng yang selanjutnya dituangkan dalam SK Nomor 024/KOMNAS HAM/V/2001 tanggal 5 Mei 2001.

Tugas KPP HAM Sampit/Kalteng adalah :

- a. Mengumpulkan dan mencari berbagai data, informasi dan fakta tentang berbagai pelanggaran hak asasi manusia yang berat pada saat dan setelah terjadinya kerusuhan antar etnis di Sampit dan Palangka Raya.
- b. Menganalisis akar masalah penyebab meletusnya konflik antar etnis di Sampit dan Palangka Raya untuk dapat menyampaikan alternatif solusi menciptakan perdamaian menuju rekonsiliasi.
- c. Menyelidiki tingkat keterlibatan aparaturnegara atau badan atau kelompok lain dalam pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi sejak diundangkannya Undang-Undang Pengadilan HAM No. 26/2000.
- d. Mencocokkan antara temuan-temuan bukti di lapangan dengan data-data yang dihimpun secara komprehensif dan terpadu.
- e. Merumuskan dan menyampaikan hasil penyelidikan kepada Rapat Paripurna sebagai dasar penyusunan rekomendasi Komnas HAM untuk diteruskan menjadi penyidikan oleh Kejaksaan Agung.

Namun hingga masa tugasnya berakhir Komnas HAM tidak membuahkan solusi yang memadai dan bahkan tidak mengecam atau berupaya mencari akar dan penyebab terjadinya tragedi kemanusiaan sehingga kasus kerusuhan etnik di Sampit seolah menguap dan tidak berbekas.

Pembelaan terhadap warga Madura yang dianggap mewakili korban terbesar dalam Konflik Sampit sempat dilakukan oleh beberapa pihak yang memiliki hubungan dengan Madura namun pada akhirnya juga surut karena tidak ingin mempertaruhkan reputasi mereka.

Secara *de facto*, konflik yang berwujud kerusuhan atau kekerasan etnik antara Suku Dayak dan Suku Madura telah

berakhir kurang dari 2 minggu sejak kerusuhan tersebut pecah pada tanggal 18 Februari 2001. Kerusuhan telah mereda bahkan berhenti pada 28 Februari 2001. Rasionya, suatu pertentangan atau perang, akan otomatis berhenti ketika lawan sudah dikalahkan atau lawan sudah tidak ada lagi. Dalam kasus perang antara Suku Dayak dan Suku Madura di Sampit, perang berhenti ketika Suku Madura sebagai salah satu pihak dalam kerusuhan tersebut telah dikalahkan baik karena meninggal, mengungsi keluar daerah maupun melarikan diri ke dalam hutan. Perang berhenti dan secara fisik kemenangan diraih oleh Suku Dayak yang dapat mengusir seluruh warga Suku Madura keluar dari Kota Sampit.

Sekalipun bentrokan secara fisik sudah berakhir, dan Suku Dayak dapat dianggap telah memenangkan perang, namun persoalan belum berakhir tuntas sampai di titik ini. Sisa-sisa masalah yang tertinggal merupakan benih-benih konflik yang masih sangat berpotensi menjadi konflik yang lebih luas dan lebih besar.

Keberadaan dan kelahiran Perda Kotawaringin Timur tentang Penanganan Penduduk Dampak Konflik Etnis dengan berbagai ketentuan yang terkandung di dalamnya dan juga dinamika proses pembentukannya yang lalu diikuti dengan implementasinya akhirnya telah berhasil menyelesaikan konflik etnik di Sampit, Kotawaringin Timur dengan mengakomodasi kepentingan warga Dayak sebagai pihak yang 'menang' dalam 'perang' tersebut tanpa menihilkan atau menafikan hak warga Madura yang terusir dari Sampit dan ingin kembali ke wilayah tersebut.

Berbagai hal yang merupakan peninggalan atau sisa-sisa konflik seperti keinginan warga Madura untuk kembali ke Sampit dan penolakan warga Dayak berhasil di selesaikan

dengan formulasi ‘ boleh kembali bersyarat’, emosi dan dendam yang masih tersimpan akibat sikap dan tindakan tercela, kurang patut atau tidak menghormati adat istiadat, arogansi dan sebagainya dijawab dengan suatu rumusan bahwa warga Madura jika ingin kembali harus berjanji untuk menaati adat istiadat yang tidak bertentangan dengan keyakinan beragama. Selaras dengan ini pembinaan keagamaan juga diadakan agar lebih mampu bertoleransi dan memahami pluralitas. Selain itu untuk memastikan penghormatan dan penataan terhadap adat istiadat yang berlaku, peranan Damang Kepala Adat dipertegas dalam Perda ini sehingga penjatuhan sanksi terhadap mereka-mereka yang bersalah secara adat dapat dilakukan oleh Damang yang bukan hanya sebagai lembaga informal namun merupakan bagian dari Pemerintah Daerah Kotawaringin Timur.

Masalah aset, penguasaan dan pendudukannya yang merupakan salah satu sisa konflik yang cukup rumit untuk diselesaikan namun dapat dipecahkan dengan dimuatnya pengaturan dalam Bab tersendiri mengenai penguasaan kembali aset tersebut.

Dengan cara-cara tersebut, Perda terbukti sebagai alat untuk menyelesaikan konflik etnik yang terjadi antara Etnis Dayak dan Madura. Sisa-sisa kekerasan antar etnik yang dipandang sebagai kekejaman abad ini, berhasil secara mulus dinetralisir sehingga kecemasan yang muncul akibat rentannya masalah-masalah yang belum terpecahkan tersebut menjadi tidak beralasan.

Dengan demikian, Perda dapat disebut sebagai alat utama atau senjata pamungkas penyelesaian konflik etnis di Sampit Kotawaringin Timur. Perda menjadi sentral dari upaya penyelesaian secara komprehensif konflik yang telah



berurat berakar antara warga Madura dan warga Dayak. Ia mampu mengintegrasikan kembali Etnis Dayak dan Madura dalam suatu wilayah dimana wilayah itu pernah menjadi ladang kerusuhan yang sangat dahsyat, yang menyebabkan salah satu pihak terusir secara keseluruhan dari wilayah tersebut tetapi kemudian kembali lagi dengan penerimaan oleh mereka yang pernah melakukan pengusiran. Hal ini tidak dapat disaksikan di tempat lain. Peristiwa kerusuhan di Ketapang, Kalimantan Barat, misalnya, hingga saat ini belum ada warga Madura yang berani kembali ke daerah tersebut karena keamanan mereka sama sekali tidak terjamin. Kerusuhan Ambon telah mengubah komposisi penduduk dari wilayah-wilayah tersebut bahkan secara tidak langsung telah berakibat pada lahirnya Provinsi Maluku Utara yang didominasi Muslim.

## BAB V

# PENUTUP

### A. Penutup

Masyarakat multikultural merupakan masyarakat yang komponennya menggambarkan lebih dari satu unsur, kultur-sub kultur, budaya, keyakinan, sistem keyakinan, agama, suku bangsa dan lain-lain. Jadi, masyarakat multikultural merupakan masyarakat yang komponennya menggambarkan salah satu, dua, atau ketiga klasifikasi tersebut. Benang merah dari paparan tersebut, multikulturalisme merupakan konsep pengelolaan masyarakat yang secara kultural majemuk, sekecil apapun tingkat dan lingkup kemajemukan budaya tersebut, dengan memberikan pengakuan (rekognisi) atas eksistensi komponen kemajemukan tersebut. Pengakuan tersebut dalam fenomena kontemporer merupakan tuntutan (*demand*). Oleh karenanya ketiadaan pengakuan, yang berarti nihilnya pemenuhan tuntutan, sangat potensial terhadap munculnya berbagai konflik.

Masyarakat multikultural mengandung potensi konflik. Konflik adalah situasi dan kondisi dalam kehidupan masyarakat yang kacau atau tidak adanya ketertiban, saling klaim antar pihak, berselisih, bersengketa, bermusuhan dari yang sifatnya ancaman kekerasan sampai kepada kekerasan fisik. Konflik terjadi karena masyarakat tersebut mengandung berbagai kepentingan, lembaga, organisasi, dan kelas sosial yang tidak selalu memiliki kepentingan yang sama dan serasi. Konflik bisa disebabkan oleh banyak hal. Konflik dapat disebabkan oleh polarisasi sosial yang memisahkan masyarakat berdasarkan penggolongan-

penggolongan tertentu dapat menyebabkan timbulnya ketidakpercayaan dan permusuhan antar kelompok yang berbeda dalam masyarakat yang dapat berujung pada munculnya kekerasan yang terbuka.

Konflik yang terjadi mutlak harus diselesaikan agar tidak merugikan dan melahirkan perpecahan (disintegrasi) dalam masyarakat bahkan potensi konflik yang ada harus dikelola sehingga tidak menjadi konflik yang terbuka. Untuk bisa memberikan sebuah penyelesaian (solusi) dari suatu konflik, maka perlu diketahui lebih dahulu apa yang menjadi penyebabnya. Penyebab-penyebab konflik sebagaimana dikemukakan di atas adalah penyebab konflik secara umum.

Keniscayaan potensi konflik sebagai kelindan dari multikulturalisme perlu untuk dikelola dengan memadai. Pengelolaan ini mengejawantah dalam konsep dasar yang mengkerangkai bagaimana respons atas konflik atau potensi konflik, antara lain: manajemen konflik, transformasi konflik, dan resolusi konflik. Transformasi konflik merupakan konsep yang menekankan pada proses penumpulan dan penghalusan konflik pada level dimana para pihak yang berkonflik dapat hidup bersama dan masing-masing dapat mengendalikan diri mereka, melalui saling empati kepada pihak lain, diperlukan kreativitas untuk mencari hal baru, dan dengan cara berperilaku, berbicara, dan—bahkan lebih jauh lagi—berpikir tanpa kekerasan. Dalam kerangka tersebut dituntut prinsip "cintailah musuhmu", atau—dalam level yang sangat awal—prinsip "kurangi kebencian pada musuhmu" sudah cukup membantu mengatasi persoalan. Tujuan utama transformasi konflik adalah restorasi ketertiban, harmoni, dan hubungan dalam komunitas.

Eksistensi Indonesia sebagai suatu negara yang multikultural dengan potensi konflik yang sedemikian besar

dan ancaman terjadinya eskalasi menuju ke arah pertentangan dengan intensitas yang lebih tinggi hingga terjadi kekerasan mengharuskan adanya saluran yang tepat. Dengan demikian kondisi multikultural tersebut bisa terjembatani sehingga konflik yang terjadi bersifat sinergi bukan sebaliknya bersifat korosi dan menghancurkan tatanan kehidupan bernegara.

Salah satu gagasan penting yang menjadi pembahasan selama beberapa dekade terakhir adalah pentingnya penerapan politik pengakuan (*politics of recognition*) yang dapat menjadi landasan bagi terciptanya kebersamaan di antara berbagai budaya, kelompok etnis, ras dan agama. Sebab tak adanya pengakuan adalah penindasan (*misrecognition is an oppression*).

Pengelolaan multikulturalisme melalui ikhtiar pendidikan menjadi instrumen yang dapat diandalkan dalam konteks ke-Indonesiaan.

## **B. Prakarsa Pendidikan Multikultural**

Penyelenggaraan pendidikan multikultural di dunia pendidikan diyakini dapat menjadi solusi nyata bagi konflik dan intoleransi yang terjadi di masyarakat. Dengan kata lain, pendidikan multikultural dapat menjadi sarana alternatif pemecahan konflik sosial budaya. Spektrum kultural masyarakat Indonesia yang amat beragam menjadi tantangan bagi dunia pendidikan guna mengolah perbedaan tersebut menjadi suatu aset, bukan sumber perpecahan. Saat ini, pendidikan multikultural mempunyai dua tanggung jawab besar, yaitu: menyiapkan bangsa Indonesia untuk menghadapi arus budaya luar di era globalisasi dan menyatukan bangsa yang terdiri dari berbagai macam budaya.

Pendidikan kebangsaan dan ideologi telah banyak diberikan di perguruan tinggi, namun pendidikan multikultural belum diberikan dengan proporsi yang benar. Maka sekolah sebagai institusi pendidikan dapat mengembangkan pendidikan multikultural dengan model masing-masing sesuai asas otonomi pendidikan. Pendidikan multikultural tersebut dapat ditekankan melalui mata pelajaran agama, kebangsaan, dan moral, yang pada dasarnya model pembelajaran seperti itu memang sudah ada.

Namun demikian, hal itu masih sekadar teori sedangkan dalam praktiknya belum terlaksana dengan baik. Hal itu terlihat dengan munculnya konflik yang terjadi pada kehidupan berbangsa saat ini dimana pemahaman toleransi masih amat kurang. Hingga detik ini, jumlah siswa dan mahasiswa yang memahami makna budaya bangsa masih sangat sedikit. Padahal dalam konteks pendidikan multikultural, memahami makna dibalik realitas budaya suku bangsa merupakan hal yang esensial. Maka, penyelenggaraan pendidikan multikultural dapat dikatakan berhasil bila berbentuk pada diri siswa sikap hidup saling toleransi, tenggang rasa, tepo seliro, tidak bermusuhan dan tidak berkonflik yang disebabkan oleh perbedaan budaya, suku, bahasa, adat istiadat atau lainnya.

Untuk itulah pendidikan multikulturalisme layak untuk diperkenalkan. Pendidikan multikulturalisme mengemuka sebagai solusi ketidakpuasan masyarakat terhadap sistem pendidikan yang telah dijalankan. Pendidikan multikulturalisme memiliki landasan filosofis yakni mengakomodir kesenjangan dalam pendidikan, budaya, dan agama. Ketiga hal tersebut memiliki orientasi yang saling berkaitan yang bermuara pada kemanusiaan. Hal

ini selaras dengan salah satu orientasi pendidikan multikultural yakni kemanusiaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Sholikin., 1998, *Reformasi. Pelayanan Publik Menuju Sistem Pelayanan Yang Responsif dan Berkualitas*, Malang: Program Pascasarjana Universitas Brawijaya
- Adelson, J (ed). 1980. *Hand Book of Adolescent Psychology*. New York: John Willey & Sons Inc
- Agus Surata dan Tauhana Taufiq Adrianto, 2001, *Atasi Konflik Etnis*, Yogyakarta: Global Pustaka Utama dan UPN "Veteran".
- Allen, Tim and Jean Seaton., 1999, *The Media of Conflict*, London and New York: Zeds Book.
- Anderson, Benedict. 1991. *Imagined Communities Reflection on The Origin and Spread of Nasionalism*. London and New York: Verso.
- Anderson, C. Sybol. 2009. *Hegel's Theory of Recognition: from Oppression to Ethical Liberal Modernity*. London and New York: Continuum Books
- Archer, Sally. L. 1983., *Interventions for Identity Development*. California: SAGE Publication Inc.
- Arikunto, Suharsimi. 1983. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: PT Bina Aksara.
- Azra, Azyumardi. 2004, *Multikulturalisme;Strategi Budaya:Menuju Indonesia yang Lebih Bermartabat*: Makalah dalam Konvensi Kampus untuk Masa Depan Indonesia, Universitas Gadjah Mada, 20- 22 Mei 2004.
- Bickmore, Kathy. 2003. "Conflict Resolution Education: Multiple Options for Contributing to Just and Democratic Peace", dalam Pammer, William J, Jr. dan Killian, Jerri (eds.). 2003. *Handbook of Conflict Management*. New York: Marcel Dekker Inc

- Boege, Volker. "Traditional Approaches to Conflict Transformation: Potentials and Limits". dalam *Berghof Handbook of Conflict Transformation*, [www.berghof-handbook.net](http://www.berghof-handbook.net) diakses pada tanggal 23 Agustus 2010
- BPS Kotim, 2009, *Kotim Dalam Angka 2007/2008*. BPS Kotim dan Bappeda Kotim.
- Chambers, Robert, 1995, "*Poverty and Livelihoods : Whose Reality Count ?*" dalam Uner Kirdar dan Leonard Silk (ed). *People From Impoverishment to Empowerment*. New York: New York University Press.
- Charles O. Jones, 1991, *Pengantar Kebijakan Publik* (Terjemahan), Jakarta: Rajawali Press. *Civility: The History and Cross Cultural Possibility of a Modern*
- Cohen, Jean L. dan Andrew Arato. *Civil Society and Political Theory*.
- Cohen, John, Uphoff, Norman T., 1977, *Rural Development Participation: Concepts Measures for Project Design, Implementation and Evaluation Rural-Development Monograf No. 2* Rural Development Comitte Centre For International Studies Cornell University.
- Coser, Lewis A., A 1971, *Master of Sociological Thought (Ideas in Historical and Social Context)*, San Diego, New York: Harcourt Brace Jovanovich Publisher.
- David L. Sills, 1966, *The Government of Associations: Selections from the Behavioral Totowa*, NJ: Sciences Publisher & The Bedminster Press.
- Deutsch, Morton dan Coleman, Peter T, 2000, *Handbook of Conflict Resolution: Theory and Practice*. San Fransisco: Jossey-Bass Publishers
- Douzinas, Costas, "Identity, Recognition, Rights or What Can Hegel Teach Us About Human Rights?" dalam *Journal*



- of Law and Society*, Volume 29, Number 3, September 2002, hlm. 379-405.
- Dunn, William N., 1999, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Cetakan Kedua,
- Effendi, Sofian., 2000, *Analisis Kebijakan Publik*, Materi Kuliah MAP-UGM.
- \_\_\_\_\_ 2001, *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*, Materi Kuliah MAP-UGM.
- Faisal, Sanapiah. 1992. *Format-Format Penelitian Sosial, Dasar-Dasar dan Aplikasi*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Fisher, Simon, et.al., 2000, *Working with Conflict : Skills and Strategies for Action*, London : Zeds Book, Ltd.
- Furnivall, JS, 1944, *Netherland India, A Study of Plural Economy*, New York: Macmillan.
- Galtung. Johan. 2007. "Introduction: Peace by Peaceful Conflict Transformation —A Transcend Approach", dalam Webel, Charles dan Galtung, Johan (eds.). 2007. *Handbook of Peace and Conflict Studies*. London and New York: Routledge,
- George Herhert Mead, 1934, *Mind, Self and Society*, Chicago: University of Chicago Press.
- Haggett P., 1970, *Locational Analysis in Human Geography*, London: Edward Arnold.
- Hairus Salim dan Suhadi. 2007. *Membangun Pluralisme dari Bawah*. Yogyakarta: LKIS.
- Hall, J.A, 1998. *Genealogies of Civility*. Dalam Hefner (Editor). *Democratic Political Ideal*. New York: Longman.
- Hassan Krayem, *The Lebanese Civil War And The Taif Agreement*, American University of Beirut, 1994.
- Hefner, 2000, *Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia*. Princeton: Princeton University Press.

- Hefner, R.W. 1998. *Civil Society: Cultural Possibility of a Modern Ideal*. *Society*, Vol.35, No, 3 March/April.
- Hefner, Robert W (ed), 2001, *The Politics of Multiculturalism: Pluralism and Citizenship in Malaysia, Singapore, and Indonesia*, Honolulu: University of Hawai Press.
- Hefner, Robert W, 2001, "Introduction: Multiculturalism and Citizenship in Malaysia, Singapore, and Indonesia", dalam Robert W Hefner (ed), 2001, *The Politics of Multiculturalism: Pluralism and Citizenship in Malaysia, Singapore, and Indonesia*, Honolulu: University of Hawai Press.
- Hegel. 1977. *The Phenomenology of Spirit, Chapter 4*. Oxford: Oxford University Press.
- Imawan, Riswanda, 1998, *Membedah Politik Orde Baru*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- James, Michael, 1996, *Poststructuralism, Politics and Education*, Westport: Bergin & Garvey.
- Johnson, Doyle Paul, 1990, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Kantaprawira, Rusadi, 1988, *Sistem Politik Indonesia: Suatu Model Pengantar*. Bandung: Sinar Baru Offset.
- Kartika, Sandra dan M. Mahendra, 1999, *Dari Keseragaman Menuju Keberagaman, Wacana Multikultural dalam Media*, Jakarta: LSPP.
- Kayam, Umar. 1989, "Pembebasan Budaya-Budaya Kita". Dimuat dalam majalah *Horison* No. 11 Tahun XXIV.
- Klinken, Gerry Van, 2007, *Perang Kota Kecil: Kekerasan Komunal dan Demokratisasi di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Koentjaraningrat, 1990, *Pengantar Teori Antropologi*. Cetakan ke-8. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

- Korten, David, 1993, *Community Organization and Rurel Development, a Learning Process, Approach*. A Ford Foundation Reprint From Public Administration Review.
- Krippendorff, Klaus. 1980. *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*. Beverly Hills-London: SAGE Publication
- Lembaga Musyawarah Masyarakat Dayak dan Daerah Kalimantan Tengah (LMMDDKT), 2001, *Buku Merah: Konflik Etnik Sampit, Kronologi Kesepakatan Aspirasi Masyarakat, Analisis, Saran*, Sampit: LMMDDKT.
- Lionel Trilling, 1969, *Sincerity and Authenticity*. New York: Norton
- Locke, Don C., 1998, *Increasing Multicultural Understanding: A Comprehensive Model*, California: Sage Publication.
- Lovell, Terry (ed.). 2007. *(Mis)recognition, Social Inequality and Social Justice: Nancy Fraser and Pierre Bourdieu*. London and New York: Routledge
- Marcia, J.E. et.al., 1993. *Ego Identity. A Hand Book for Psychological Research*. New York: Springer Verlag.
- Mas'oeud Mohtar, 2000, *Kekerasan Kolektif: Kondisi dan Pemicu*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Pusat Penelitian Pengembangan Pedesaan dan Kawasan Universitas Gadjah Mada.
- Massachusetts: Massachusetts Institute of Technology, 1992.
- Maswadi Rauf, 2001, *Konsensus Politik: Sebuah Penjajagan Teoritis*. Jakarta: Dirjen Dikti.
- Maulani, Z.A., 2001, *Menjahit Kembali Rajutan Kain yang Tercabik-cabik*, Jakarta: Kaukus Kalimantan
- McClosky, Herbert & Kohn Zaller. 1988. *Ethos Amerika Sikap Masyarakat terhadap Kapitalisme dan Demokrasi*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

- Miall, Hugh., dkk, 2000, *Resolusi Damai Konflik Kontemporer: Menyelesaikan mencegah, melola dan mengubah konflik Sumber Politik, Sosial, Agama dan Ras*, Cetakan Pertama, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- \_\_\_\_\_ “Conflict Transformation: A Multidimensional Task”, dalam *Berghof Handbook of Conflict Transformation*, [www.berghof-handbook.net](http://www.berghof-handbook.net) diakses pada tanggal 23 Agustus 2010
- Mitchell, Christopher, 1996, *Handbook of Conflict Resolution: The Analytical Problem-Solving Approach*, Arlington: Pinter Pub Ltd.
- Moffit, Michael L. dan Bordone. Robert C. 2000. *The Handbook of Dispute Resolution*. San Fransisco, CA: Jossey-Bass A Willey Imprint
- Moleong, Lexy. J., 2001, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cetakan ke-14. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Myers, David G. 1996. *Social Psychology*. New York: The MC Graw-Hill Companies Inc.
- Organista, P. Ball. 1998. *Reading in Ethnic Psychology*. New York: Routledge Ritzer, George., *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Rajawali Pers, Jakarta, 1992.
- Parekh, Bhikku, 2000, *Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory*. Cambridge, Massachusset : Harvard University Press.
- Pickering, Peg. 2000. *How to Manage Conflict: Turn All Conflicts into Win-Win Outcomes*. Franklin Lakes, NJ: Career Press
- Robbins P, Stepen., 1996, *Perilaku Organisasi*, Jakarta: Prenhallindo.

- Rotheram, Bonuss H.J & Whyche, Karen F. 1994. *Ethnic Differences in Identity Development in The United States*, California: SAGE Publication Inc.
- Schmid, Alex P. 1998. "Indicator Development: Issues in Forecasting Conflict Escalation", dalam Davies dan Gurr (eds.). 1998. *Preventive Measures: Building Risk Assessment and Crisis Early Warning Systems*. Maryland, USA: Rowman and Littlefield Publishers Inc
- Schmeidl, Susanne dan Jenkins, J. Craig. "Early Warning Indicators of Forced Indicators", dalam Davies dan Gurr (eds.), 1998, *Preventive Measures: Building Risk Assessment and Crisis Early Warning Systems*. Maryland, USA: Rowman and Littlefield Publishers Inc
- Skinner, G. William (ed). 1995. *Local Ethnic and National Loyalties in Village Indonesia: A Symposium*. Yale University, Cultural Report, South East Studies.
- Sugiono, 2000, *Proses dan Perumusan Kebijakan Publik*, Materi Kuliah MAP-UGM
- Sugiyono, 1994, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung: Alfabeta.
- Suharno, 2006, "Konflik, Etnisitas, dan Integrasi Nasional" , Makalah disampaikan dalam *Seminar dan Lokakarya Resolusi Konflik* pada Civics Community DIY tanggal 18 dan 20 November tahun 2006 di Universitas Negeri Yogyakarta.
- Suharno, 2010, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, 2010, Yogyakarta: UNY Press.
- Sukandar, Rudi, 2007, *Negotiating Post-Conflict Communication: A Case of Ethnic Conflict in Indonesia*, Dissertation to the Faculty of the Scripps College of Communication, Ohio University.

- Surbakti, Ramlan, 2003, *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Mediasarana Indonesia.
- Syaifuan, Rozi, 2006, *Kekuasaan Komunal Anatomi dan Resolusi Konflik di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Syamsu, M., 2003, *Makalah Seminar dan Training Jurnalisme Perdamaian untuk Jurnalis Kalimantan Tengah dan Madura*, yang dilaksanakan di Pangkalan Bun, 24-29 September 2003.
- Trijono, Lambang., 2001, *Mempertanyakan Peran Negara Mengenai Konflik Etnis di Kalimantan*, Seminar Nasional Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Tsing, Anna Lowenhaupt, 2005, *Friction: An Ethnography of Global Connection*, New Jersey, Oxfordshire: Princeton University Press.
- Turner, Jonathan H., 1991, *The Structure of Sociological Theory*, California: Wadworth Publishing Company.
- Viswanathan Rudrakumar, 1999, *The Need for Third Party Conflict Resolution in the Island of Sri Lanka*, Proceedings of International Conference On Tamil Nationhood & Search for Peace in Sri Lanka, Ottawa, Canada.
- Wahab, Solichin Abdul., 1999, *Pengantar Analisis Kebijakan Negara*, Cetakan Pertama, Jakarta: Rineka Cipta.
- Wibawa, Samudra., 1994, *Kebijakan Publik Proses dan Analisis*, Cetakan Pertama, Jakarta: Intermedia.
- Winardi, 2007, *Manajemen Konflik: Konflik Perubahan dan Pengembangan*. Bandung: CV.Mandar Maju.
- Winarno, Budi., 1989, *Teori Kebijakan Publik*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Pusat Antar Universitas-Studi Sosial UGM.

**Internet**

<http://www.kompas.com/kompas-cetak/0105/08/daerah/kong19.htm>

<http://www.kompas.com/kompas-cetak/0106/20/daerah/jemb28.htm>

[http://www.usc.edu/dept/LAS/ir/cews/html\\_pages/cod\\_inprocedure.htm#Phase1](http://www.usc.edu/dept/LAS/ir/cews/html_pages/cod_inprocedure.htm#Phase1) diakses pada tanggal 23 Agustus 2010

**Koran**

Kompas, 4 Maret. 2001. "Ranah dan Resolusi Konflik Etnis di Sampit